NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH

NESPARDA

PROVINSI SUMATERA BARAT

2021

NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH

NESPARDA

PROVINSI SUMATERA BARAT 2021

DINAS PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Provinsi Sumatera Barat dianugerahi keindahan alam dan budaya yang melekat serta kuliner yang lezat. Potensi yang dimiliki ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat. Kegiatan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari pariwisata juga diharapkan akan mempengaruhi sektor lainnya seperti pertanian dan perdagangan.

Untuk mengetahui dan mempelajari dampak ini maka diperlukan suatu kajian atau alat analisis berupa tabel input-output (I-O) yang disusun menjadi Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) untuk menunjang pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Neraca satelit pariwisata adalah suatu sistem, konsep, dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent), dan kontrol (control). Data dan informasi yang diperoleh dari Nesparda Sumatera Barat dapat dijadikan acuan untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat di bidang pariwisata.

Demikian Nesparda ini disusun, walaupun masih ada keterbatasan namun merupakan langkah awal yang baik dalam mendukung pembangunan pariwisata di Sumatera Barat dengan berbasiskan kepada data dan hasil kajian ilmiah. Semoga Nesparda ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menerima masukan, kritik dan saran untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat menjawab informasi yang dibutuhkan.

Padang, November 2021

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Maksud dan Tujuan 4
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan 4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1. Konsep Permintaan dan Penawaran Wisata 7
2.1.1. Produk Wisata Bersifat Saling Melengkapi (*Interdependence*) 8
2.1.2. Determinan Permintaan Wisata 9
2.1.3. Tren Permintaan Wisata 11
2.1.4. Penawaran Wisata 12
2.2. Konsep Wisatawan 14
2.3. Konsep Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) 16
2.3.1. Konsep *Supply* dan *Demand* dalam Nesparda 17
2.3.2. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata 19
2.4. Konsep Dampak Ekonomi Pariwisata 22
2.5. Analisis Input Output 23
2.6. *Update* Tabel Input Output 27

2.7. Peramalan (*Forecasting*) 29
2.7.1. Pengertian Peramalan (*Forecasting*) 29
2.7.2. Kegunaan dan Peran Peramalan 29
2.7.3. Jenis Peramalan 30
2.7.4. Langkah-Langkah Peramalan 31
2.7.5. Jenis-Jenis Pola Data 31
2.7.6. Jenis-Jenis Metode Peramalan 32
2.7.7. Pemilihan Teknik dan Metode Peramalan 33
2.7.8. Ukuran Akurasi 34
BAB 3. METODE PENELITIAN 37
3.1. Jenis dan Sumber Data 38
3.2. Metode Pengumpulan Data 38
3.3. Metode Analisis 39
3.3.1. Metode Eurostat: *Updating* Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat 39
3.3.2. Metode Analisis Input-Output: Menganalisis Keterkaitan Sektor Hilir dan Hulu dari Sektor Pariwisata 41
3.3.3. Metode *Composite Forecasting*: Mengestimasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat 45
BAB 4. *UPDATE* TABEL INPUT DAN OUTPUT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 46
BAB 5. PROFIL PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT 54
5.1. Kondisi Fisik (Administrasi dan Geografis) 55
5.2. Potensi Pulau-Pulau Kecil dan Wisata Bahari 60
5.3. Pewilayahan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 61
5.4. Daya Tarik Wisata Provinsi Sumatera Barat 62

5.5. Pengunjung Daya Tarik wisata di Provinsi Sumatera Barat 68
5.5.1. Kunjungan Wisatawan Nusantara 69
5.5.2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara 73
5.6. Pengeluaran Wisatawan di Provinsi Sumatera Barat 75
5.7. Jumlah Hotel di Provinsi Sumatera Barat 77
5.8. Restoran dan Rumah Makan di Provinsi Sumatera Barat 81
5.9. Perkembangan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata 82
5.10. Perkembangan Pramuwisata, Pokdarwis dan Desa Wisata 84
5.10.1. Perkembangan Pramuwisata di Provinsi Sumatera Barat .. 85
5.10.2. Perkembangan Pokdarwis di Provinsi Sumatera Barat 87
5.10.3. Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Sumatera Barat ... 89
BAB 6. STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN DAN INVESTASI PARIWISATA 92
6.1. Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 93
6.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara 96
6.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 98
6.4. Struktur Pengeluaran Untuk Investasi 99
6.5. Total Pengeluaran dan Investasi Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 101
6.6. Proyeksi Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 105
BAB 7. ANALISIS NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 111
7.1. Peranan Pariwisata terhadap Sektor Perekonomian 112
7.2. Peredaran Uang dari Sektor Pariwisata 116

7.3. Gambaran Mengenai Pariwisata di Masa Pandemi 118
7.3.1. Kunjungan Pada Saat Pandemi dan Asal Wilayah 119
7.3.2. Persepsi Wisatawan terhadap Kecemasan dan Keamanan Berpergian 121
7.3.3. Persepsi Wisatawan terhadap Rencana Kunjungan dan Pola Kunjungan 122
7.3.4. Persepsi Wisatawan terhadap Kebersihan Jasa Wisata... 125
BAB 8. KESIMPULAN 129
8.1. Kesimpulan 130
8.2. Rekomendasi 132
DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN 135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Input-Output 26
Tabel 4.1 Perubahan koefisien input akibat update 53
Tabel 4.2 Evaluasi data hasil update Tabel Input-Output dengan publikasi PDRB 53
Tabel 5.1 Sebaran pulau kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 60
Tabel 5.2 Pewilayahan pariwisatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan KUPP 61
Tabel 6.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah) tahun 2016 - 2020 93
Tabel 6.2 Struktur pengeluaran wisatawan lokal dan luar Sumatera Barat Tahun 2019 97
Tabel 6.3 Struktur pengeluaran wisatawan mancanegara tahun 2019 99
Tabel 6.4 Perkembangan realisasi investasi berdasarkan sektor di Sumatera Barat tahun 2014-2020 100
Tabel 7.1 Dampak aktivitas sektor pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Barat 114
Tabel 7.2 Kontribusi aktivitas pariwisata terhadap output dan NTB setiap sektor perekonomian di Sumatera Barat tahun 2019 115
Tabel 7.3 Peredaran uang dari aktivitas pengeluaran wisatawan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (Juta Rupiah) 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Provinsi Sumatera Barat.....3

Gambar 2. 1 Komponen sistem pariwisata (Vanhove, 2005) 13

Gambar 2. 2 Ruang lingkup ekonomi pariwisata dari sisi permintaan dan penawaran (BPS, 2017) 19

Gambar 2. 3 Kerangka dampak ekonomi pariwisata (BPS, 2017) 23

Gambar 4. 1 Diagram alir metode update Tabel I-O Provinsi Sumatera Barat 49

Gambar 5. 1 Penggunaan dan pemanfaatan luas lahan Sumatera Barat 57

Gambar 5. 2 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis wilayah perairan laut di Provinsi Sumatera Barat.....64

Gambar 5. 3 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis daratan di Provinsi Sumatera Barat.....65

Gambar 5. 4 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis budaya di Provinsi Sumatera Barat.....67

Gambar 5. 5 Beberapa daya tarik wisata alam buatan di Provinsi Sumatera Barat 68

Gambar 5. 6 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Barat tahun 2015-2020 70

Gambar 5. 7 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan Kabupaten/Kota ke Sumatera Barat 71

Gambar 5. 8 Persentase kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan tujuan utama kunjungan tahun 2019 72

Gambar 5. 9 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat Tahun 2015-2020 74

Gambar 5. 10 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan asal negara ke Sumatera Barat Tahun 2015-2020.....75

Gambar 5. 11 Pengeluaran wisatawan nusantara di Sumatera Barat tahun 2011-2018 (Rupiah) 76

Gambar 5. 12 Rata-rata pengeluaran wisawatan mancanegara per kunjungan di Sumatera Barat menurut kelompok negara pada tahun 2016 (US$).....77

Gambar 5. 13 Jumlah hotel bintang dan non bintang di Provinsi Sumatera Barat 78

Gambar 5. 14 Tingkat hunian hotel bintang dan non bintang di Provinsi Sumatera Barat 79

Gambar 5. 15 Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik di hotel berbintang di Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 80

Gambar 5. 16 Jumlah rumah makan dan restoran di Sumatera Barat 81

Gambar 5. 17 Perkembangan jumlah biro perjalanan wisata di Sumatera Barat 82

Gambar 5. 18 Jumlah biro perjalanan wisata di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 84

Gambar 5. 19 Pertumbuhan jumlah pramuwisata di Sumatera Barat 86

Gambar 5. 20 Profil jumlah pramuwisata per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 87

Gambar 5. 21 Jumlah pokdarwis di Sumatera Barat 88

Gambar 5. 22 Profil jumlah pokdarwis per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 89

Gambar 5. 23 Jumlah desa wisata di Sumatera Barat 90

Gambar 5. 24 Profil jumlah desa wisata per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 91

Gambar 6. 1 Pertumbuhan sektor pariwisata pada PRDB Sumatera Barat 2017-2020 94

Gambar 6. 2 Pertumbuhan sub lapangan usaha pada sektor pariwisata Sumatera Barat 2017-2020 95

Gambar 6. 3 Destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan nusantara tahun 2019 98

Gambar 6. 4 Perkembangan nilai konsumsi pemerintah Sumatera Barat untuk pariwisata 103

Gambar 6. 5 Perkembangan nilai dan proporsi investasi sektor pariwisata di Sumatera Barat.....105

Gambar 6. 6 Proyeksi jumlah wisatawan mancanegara Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 (Orang).....107

Gambar 6. 7 Proyeksi jumlah wisatawan nusantara Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2024 (Orang) 108

Gambar 6. 8 Responden post traveler untuk wisatawan nusantara yang melakukan kunjungan wisata kembali ke Sumatera Barat di masa pandemi 109

Gambar 6. 9 Asal daerah wisatawan nusantara post traveler yang melakukan kunjungan wisata kembali ke Sumatera Barat di masa pandemi 110

Gambar 7. 1 Kunjungan wisatawan pada saat pandemi Covid-19 ke Sumatera Barat 120

Gambar 7. 2 Wisatawan di Sumatera Barat berdasarkan asal daerah wisatawan 121

Gambar 7. 3 Persepsi responden terhadap kecemasan akibat covid dan keamanan berpergian 122

Gambar 7. 4 Persepsi wisatawan terhadap rencana kunjungan di masa pandemi 123

Gambar 7. 5 Persepsi wisatawan terhadap pola kunjungan wisata selama pandemi 124

Gambar 7. 6 Persepsi wisatawan terhadap kebersihan dan keamanan di tempat rekreasi dan perjalanan 126

Gambar 7. 7 Persepsi wisatawan terhadap pilihan hotel dan restoran selama pandemi 127

Gambar 7. 8 Preferensi wisatawan terhadap perilaku menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer 128

BAB 1
PENDAHULUAN

Masjid Raya Sumatera Barat - Kota Padang

1.1. Latar Belakang

Sumatera Barat dianugerahi keindahan alam dan budaya yang melekat serta kuliner yang lezat. Potensi yang dimiliki ini memberikan daya Tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara. Kegiatan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan pariwisata dikatakan mempunya energi dorong yang luar biasa yang mampu menciptakan perubahan dalam berbagai aspek.

Sektor pariwisata di Sumatera Barat saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesar seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang interen dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan pada pariwisata akan semakin besar pula.

Pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk menjadi sektor andalan dan penarik ekonomi nasional yang mampu menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi guna menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan perolehan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, banyaknya wisatawan yang berkunjung dan besarnya dana yang dibelanjakan oleh wisatawan selama berada di Sumatera Barat akan sangat menentukan besar kecilnya penerimaan daerah tersebut.

Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan secara total, baik wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri mengalami peningkatan selama tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 jumlah total wisatawan yang datang ke Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7.783,88 ribu orang, sedangkan pada tahun 2019 jumlah wisatawan sebanyak 8.169,15 ribu orang. Persentase peningkatan jumlah wisatawan selama tahun tersebut

adalah sebesar 4,95%. Selanjutnya, dominasi wisawatan Provinsi Sumatera Barat masih berasal dari dalam negeri, yaitu sekitar 99%. Baru sebanyak kurang lebih 1% saja wisatawan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari luar negeri. Masih adanya celah untuk meningkatkan potensi pariwisata di Sumatera Barat terutama untuk menarik wisatawan mancanegara, sehingga pendapatan daerah dapat ditingkatkan.

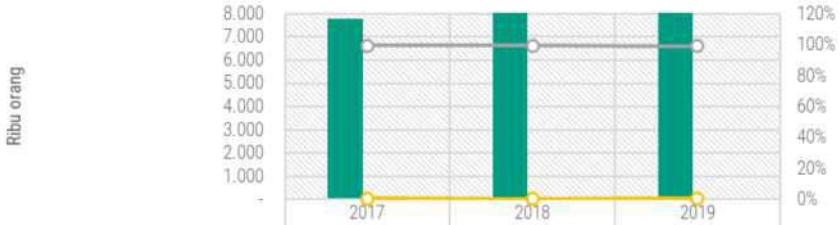

	2017	2018	2019
Wisatawan Nusantara (ribu orang)	7.783,88	8.073,07	8.169,15
Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	56,88	54,37	61,13
% Wisatawan Nusantara	99,27%	99,33%	99,26%
% Wisatawan Mancanegara	0,73%	0,67%	0,74%

(BPS Sumatera Barat, 2021)

Gambar 1.1 Perkembangan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Provinsi Sumatera Barat

Selain dari sudut pandang ekonomi, dampak dari pariwisata juga diharapkan akan mempengaruhi sektor lainnya seperti pertanian dan perdagangan. Untuk mengetahui dan mempelajari dampak ini maka diperlukan suatu kajian atau alat analisis berupa tabel Input-Output (I-O) yang disusun menjadi Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) untuk pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Neraca satelit pariwisata adalah suatu sistem, konsep, dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (general), kompak (*compact*), saling berkait (*interconnected*), konsisten

(*consistent*), dan control (*control*). Melalui perhitungan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) tabel I-O merupakan suatu instrumen penting untuk mengukur dampak permintaan akhir terhadap output yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok serta ekspor barang dagangan sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan pariwisata dapat diukur dengan melihat besar pengeluaran wisatawan baik mancanegara maupun nusantara dalam beraktivitas wisata.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun sebuah sistem, konsep, dan metode yang terkait dengan kepariwisataan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan tabel I-O sektor pariwisata Sumatera Barat.
2. Menjelaskan dampak pariwisata yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat.
3. Menghitung peredaran uang di Sumatera Barat yang berasal dari transaksi sektor pariwisata di bidang akomodasi, rumah makan, transportasi, dan perdagangan.
4. Menyusun sistem, konsep, dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh yang terkait dengan kepariwisataan Sumatera Barat.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) Sumatera Barat 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan kepariwisataan di Sumatera Barat.
2. Wisatawan mencakup wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara yang berwisata di Sumatera Barat.
3. Aspek yang dicakup meliputi struktur pengeluaran, total konsumsi, serta dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Danau Di Arjas - Kab. Solok

2.1. Konsep Permintaan dan Penawaran Wisata

Karakteristik dari kegiatan wisata adalah adanya fenomena musiman atau *seasonality* dari sisi permintaan. Permintaan terhadap wisata yang bersifat musiman ini dapat terlihat dari *trend* kunjungan ke salah satu lokasi wisata. Pada bulan-bulan tertentu seperti di akhir tahun tingkat kunjungan wisata akan tinggi sementara pada bulan-bulan lainnya tingkat kunjungan akan sepi. Karakteristik kunjungan ini berbeda antar daerah dan juga dipengaruhi oleh karakteristik dari lokasi wisatanya, misalkan pada beberapa wisata bahari, atau wisata alam yang berbasis gunung. Ada beberapa daerah di Indonesia yang ramai hanya pada bulan-bulan tertentu wisatanya, tetapi ada juga beberapa daerah di Indonesia yang wisatanya ramai sepanjang tahun meskipun pada bulan tertentu tingkat kunjungannya rendah. Selain permasalahan *seasonality* yang bersifat bulanan, dalam wisata ada juga *trend* peningkatan kunjungan pada akhir pekan (*weekend peaks)*.

Adanya aspek musiman atau *seasonality* dalam wisata mempunyai dampak terhadap ekonomi dan ekologi di suatu lokasi wisata seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola *seasonality* dalam permintaan wisata mempengaruhi tingkat okupansi akomodasi yang akan berpengaruh terhadap *provider* atau penyedia jasa hotel karena sulit mencari keuntungan dengan jumlah hari operasional yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya penggunaan sumberdaya yang dibawah utilitas seharusnya.
2. Infrastruktur wisata (atraksi buatan, peralatan pendukung, tempat parkir, jalan, pelabuhan wisata dan lainnya) bisa mengalami kondisi kosong atau kurang optimal. Hal ini berdampak pada penggunaan modal yang salah alokasi.

3. Pada saat kondisi puncak dari aktivitas wisata, sektor publik terutama pemerintah akan meningkatkan aktivitas pengawasan dan penjagaan sehingga akan meningkatkan biaya operasional (petugas kepolisian mengatur lalu lintas, posko kesehatan, dan lain-lain). Kondisi tersebut akan terus berulang setiap tahunnya.
4. Pada sebagian besar daerah, kondisi ini akan memicu adanya tenaga kerja musiman dan pada saat yang lain ada kondisi dimana tingkat pengangguran tinggi karena aktivitas wisata menurun yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu pada saat *peak season* waktu orang bekerja di wisata juga akan lebih lama dan memunculkan isu lainnya seperti keadilan dari pendapatan yang diperoleh.
5. Konsumen atau turis biasanya akan menghadapi kendala harga yang tinggi, penumpukan pengunjung wisata, kemacetan dan sering kali mendapatkan layanan yang tidak optimal karena banyaknya pengunjung.
6. Pada aspek lingkungan, konsentrasi aktivitas wisata yang cukup tinggi pada beberapa minggu tertentu akan menyebabkan tekanan yang terlalu tinggi terhadap lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan terutama wisata budaya atau alam.

2.1.1. Produk Wisata Bersifat Saling Melengkapi (*Interdependence*)

Karakteristik *interdependence* pada produk wisata merupakan konsekuensi dari produk wisata yang *amalgam* atau merupakan kesatuan dari berbagai macam fasilitas dari mulai wisatawan berangkat ke lokasi wisata sampai dengan pulang lagi ke tempat tinggalnya. Atraksi utama dari suatu lokasi wisata biasanya sulit berkembang jika tidak ada dukungan dari aspek akomodasi ataupun aksesibilitas terhadap lokasi, termasuk di dalamnya

aspek ke ramah tamahan atau *hospitality* dari masyarakat sekitar (Ritchie and Crouch, 2003).

Destinasi wisata merupakan kluster dari berbagai aktivitas dan adanya layanan yang kurang pada satu sub aktivitas akan berpengaruh terhadap keuntungan dari destinasi wisata secara keseluruhan. Interdependensi tidak hanya terjadi antara atraksi wisata dengan fasilitas pendukung tetapi juga antar atraksi atau antar destinasi wisata. Manfaat yang diperoleh dengan menawarkan paket wisata yang terdiri atas beberapa atraksi akan lebih besar jika dibandingkan hanya menawarkan paket wisata secara terpisah.

2.1.2. Determinan Permintaan Wisata

Permintaan wisata adalah salah satu unsur penting dalam pariwisata. Dalam ilmu ekonomi, permintaan diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan dan diinginkannya (Bangun 2010). Menurut Yoeti (2008), permintaan menunjukkan keinginan seseorang atas sejumlah barang yang diikuti dengan kekuatan membeli (*purchasing power*). Lebih lanjut Yoeti (2008) menyatakan permintaan dalam industri pariwisata terdiri atas beberapa fasilitas atau produk yang berbeda bukan saja dalam hal sifat, akan tetapi juga manfaat dan kebutuhannya bagi wisatawan. Satu hal yang perlu diketahui adalah fasilitas atau produk dihasilkan dan disediakan oleh perusahaan yang berbeda dan diperlukan oleh wisatawan pada waktu yang berbeda-beda. Fasilitas dan produk wisata sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi permintaan terhadap produk dan fasilitas tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Determinan permintaan wisata adalah faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat atau pengunjung terhadap liburan atau perjalanan (Burkart and Medlik, 1981). Determinan permintaan wisata dapat menjelaskan mengapa

masyarakat dari beberapa daerah atau negera mempunyai kecenderungan tinggi untuk melakukan aktivitas wisata, sementara daerah lain punya keinginan yang lebih rendah.

Middleton dan Clarke (2001) merangkum determinan permintaan wisata ke dalam sembilan faktor utama, yaitu:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Harga Pembanding
3. Faktor Demografi
4. Faktor Geografis
5. Faktor Sosial Budaya
6. Mobilitas
7. Pemerintah/Regulator
8. Media Komunikasi
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Vanhove (2005), permintaan wisata menunjukkan kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata sehingga dalam pengembangan industri pariwisata perlu memperhatikan unsur-unsur permintaan wisata. Unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisatawan dan masyarakat lokal yang menggunakan sumberdaya (produk dan jasa) wisata (Damanik dan Weber 2006). Lanjut Damanik dan Weber (2006), wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan wisata sedangkan masyarakat lokal adalah penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata yang menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

Menurut Yoeti (2008), faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menarik kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata, yaitu:

1. Harga

2. Daya tarik wisata (falisitas yang tersedia, kondosi lingkungan yang ada, dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya).
3. Kemudahan-kemudahan untuk berkunjung (*accesibilities*).

Sementara itu, menurut Clawson dan Knetsch (1975) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wisata adalah sebagai berikut;

1. Faktor individu atau yang berhubungan dengan pemakai potensial, meliputi: jumlah rombongan individu dalam kunjungan, distribusi domisili individu, karakteristik sosial ekonomi (umur, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan status pendidikan), dan pendapatan.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat rekreasi, meliputi: keindahan dan daya tarik, alternatif pilihan tempat rekreasi, kapasitas akomodasi untuk pemakaian potensial, dan karekteristik iklim serta cuaca tempat rekreasi.
3. Hubungan antara pemakai potensial dengan tempat rekreasi, meliputi: lamanya dan waktu perjalanan ke tempat rekreasi, kenyamanan dalam perjalanan, biaya perjalanan, dan peningkatan permintaan wisata akibat promosi.

2.1.3. Tren Permintaan Wisata

Adanya determinan sosial ekonomi berkaitan permintaan wisata yang telah dijelaskan sebelumnya berpengaruh terhadap perubahan tren permintaan wisata. Secara umum permintaan wisata dari masyarakat terus berkembang secara dinamis. Menurut Vanhove (2005), beberapa perubahan tersebut diindikasikan dengan beberapa hal berikut;

1. Globalisasi permintaan wisata.
2. Fragmentasi liburan tahunan.
3. Perhatian terhadap lingkungan dan semakin pentingnya ekowisata.
4. Perubahan tata nilai (*Personalized Demand*).
5. Perubahan gaya hidup (*Lifestyle*).

6. Turis yang lebih mandiri/independen dibandingkan dengan turis masal.
7. Peningkatan kepedulian terhadap kualitas.
8. Wisatawan yang lebih berpengalaman dan berpendidikan.
9. Turis yang lebih fleksibel.

2.1.4. Penawaran Wisata

Pariwisata adalah fenomena yang kompleks: ada banyak pelaku yang berbeda, permintaan dan penawaran terpisah secara geografis, tetapi produksi dan konsumsi berlangsung di tempat yang sama. Sistem pariwisata dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja yang menunjukkan interaksi antara: penyediaan pariwisata di destinasi, elemen penghubung antara penawaran dan permintaan, serta permintaan pariwisata (Gambar 2.1). Hubungan antara permintaan dan penawaran yang terjadi melalui elemen penghubung, merupakan interaksi dua arah. Dalam sistem pariwisata, penyediaan produk di tempat tujuan adalah elemen kunci. Produsen wisata menyediakan elemen dasar itu yang menjadi dasar untuk membentuk pengalaman pengunjung secara keseluruhan.

Pada kenyataannya memang terdapat banyak sumber atau faktor yang dibutuhkan oleh produsen pariwisata dan perhotelan - jauh lebih banyak dari bagan pada Gambar 2.1. Bagi supplier tersebut, tenaga kerja merupakan faktor kunci, dan faktor suplai lainnya termasuk produsen makanan dan minuman, kerajinan lokal, dan produsen peralatan (seperti wahana taman hiburan, peralatan berkemah), dan lain-lain. Pemasok terhubung ke wisatawan melalui saluran pemasaran pariwisata terutama terdiri dari perantara (operator tur, perdagangan, pertemuan seminar, konvensi dan acara lainnya).

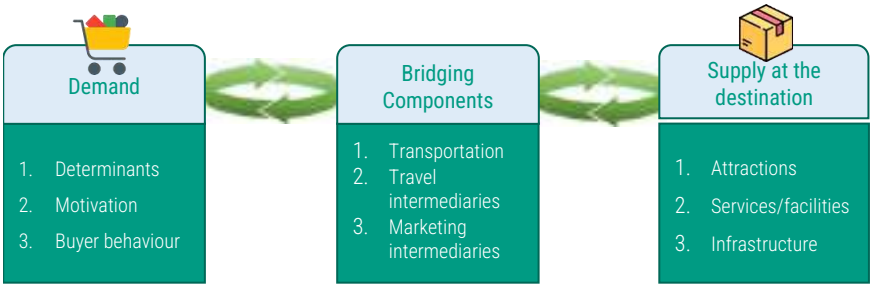

Gambar 2. 1 Komponen sistem pariwisata (Vanhove, 2005)

Menurut Yoeti (2008), penawaran diartikan sebagai jumlah barang, jasa, atau komoditas yang tersedia di pasar dengan harga tertentu pada suatu waktu tertentu. Lanjut Yoeti (2008), penawaran dalam indutri pariwisata diartikan sebagai bentuk daya tarik wisata (*tourist attractions*), semua bentuk untuk memperlancar perjalanan (*accebilities*), dan semua bentuk dan pelayanan (*facilities and services*) yang tersedia pada suatu Daya Tarik Wisata (DTW) yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berkunjung ke DTW. Menurut Vanhove (2005), penawaran terdiri atas tiga komponen, antara lain: objek wisata alam, atraksi buatan manusia, dan objek wisata yang dibuat secara khusus.

Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (a) harga produk itu sendiri, (b) harga produk lainnya dan (c) biaya operasional (Bangun 2010). Penawaran industri pariwisata dipengaruhi oleh faktor sumberdaya alam, *man made supply*, fasilitas yang tersedia, dan aksesibilitas (Yoeti 2008). Sementara itu, menurut Damanik dan Weber (2006), penawaran wisata dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia dan kualitas produk wisata sedangkan menurut Vasudevan *et al.* (2017), penawaran wisata dipengaruhi oleh produk wisata, fasilitas yang tersedia, promosi wisata, dan kebijakan pemerintah. Penawaran dalam industri pariwisata bersifat kaku dan sukar menyesuaikan dengan permintaan wisata, hal itu dikarenakan jumlah produk yang ditawarkan terbatas sedangkan permintaan tidak terbatas (Yoeti 2008).

2.2. Konsep Wisatawan

Terdapat beberapa konsep wisatawan yang dapat dilihat dari sisi konsumen (permintaan) yang diacu dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif serta badan pusat statistik. Secara lebih rinci penjelasan untuk setiap jenis wisatawan tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Wisatawan Mancanegara (*inbound*)

   Sesuai dengan rekomendasi World Tourism Organization (UNWTO), batasan/definisi wisatawan mancanegara atau wisman adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori tamu mancanegara, yaitu:

   a. Wisatawan (*Tourist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dikunjungi paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan maksud utama kunjungan:
      - Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
      - Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

   b. Pelancong (*Excursionist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dikunjungi kurang dari 24 jam, termasuk *cruise passenger* yang berkunjung ke suatu negara dengan kapal pesiar untuk tujuan wisata, lebih atau kurang dari 24 jam tetapi tetap menginap di kapal yang bersangkutan.

2. Wisatawan Nusantara (*Wisnus*)

Wisnus adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di dalam wilayah teritorial Indonesia (perjalanan dalam negeri) secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria:

a. Mereka yang melakukan perjalanan ke objek wisata komersial, tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang dari 100 km pulang-pergi (pp).
b. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel/akomodasi komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km pp.
c. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/akomodasi komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km pp

3. Wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (*outbound*)

Konsep wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke negara lain bukan untuk bekerja pada penduduk negara yang dikunjungi dan tinggal tidak lebih dari 12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: (a) berlibur, (b) bisnis, (c) kesehatan, (d) pendidikan, (e) misi/pertemuan/kongres, (f) mengunjungi teman/keluarga, (g) keagamaan, (h) olahraga, dan (i) lainnya.

2.3. Konsep Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda)

Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) merupakan perangkat neraca yang berisikan data tentang peran kegiatan pariwisata dalam perekonomian suatu daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Nesparda ini mengacu kepada penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Nesparda disebut sistem karena terdiri dari berbagai elemen neraca, dimana satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi, yang digambarkan melalui keterkaitan berbagai jenis transaksinya. Secara spesifik Nespada berisikan data tentang perilaku pariwisata dalam melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai institusi ataupun pelaku-pelaku ekonomi domestik dalam bentuk neraca dan matriks.

Nesparda menggambarkan semua kegiatan dan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan barang-barang dan jasa-jasa pariwisata, baik sisi penyediaan (*supply*) maupun sisi permintaan (*demand*). Sebagai suatu sistem data yang komprehensif, cakupan Nesparda meliputi: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarannya, (2) struktur sektor ekonomi yang terkait pariwisata, (3) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi daerah, (4) struktur pengeluaran pemerintah terkait pariwisata, (5) peranan pariwisata pada perekonomian daerah, serta (6) struktur pekerja pada usaha pariwisata.

Nesparda menyajikan informasi tentang hubungan antara kegiatan pariwisata dengan kegiatan proses produksi barang dan jasa, dalam wilayah ekonomi suatu daerah. Hubungan tersebut merupakan interaksi antara pelaku pariwisata dengan produsen pariwisata, dan antar produsen pariwisata itu sendiri. Beberapa analisis akan diturunkan dari perangkat tersebut, diantaranya analisis tentang nilai tambah yang dihasilkan ataupun analisis tentang dampak pariwisata terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil.

Hubungan transaksi antara pelaku pariwisata (fungsi konsumsi) dengan pelaku ekonomi (fungsi produksi) domestik tersebut dalam konteks makro disebut sebagai interaksi antara *supply* dan *demand*. Secara konteks makro, *supply* harus sama dengan *demand* atau adanya keseimbangan. Namun demikian pada kegiatan ekonomi pariwisata teori tersebut tidak terjadi dengan mudah. Tidak semua produk kegiatan ekonomi tersebut langsung dikonsumsi habis oleh pariwisata, karena ada kegiatan di luar pariwisata yang juga mengkonsumsi produk tersebut. Produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik tersebut apabila dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (*non-resident*) maka akan dicatat sebagai ekspor suatu negara. Begitu pula berlaku sebaliknya apabila produk negara lain dikonsumsi oleh wisatawan nusantara (*resident*) akan dianggap sebagai impor.

Struktur neraca yang disajikan dalam Nesparda adalah keterkaitan *demand* terhadap *supply* pariwisata yang diturunkan dari neraca produksi, tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta tabel Input-Output. Dari neraca produksi dapat dilihat struktur neraca kegiatan ekonomi khusus yang layanan/produknya memang sebagian besar ditujukan bagi permintaan wisatawan, baik dalam negeri (wisnus dan wisnas) maupun luar negeri (wisman). Hubungan tersebut menggambarkan transaksi langsung yang terjadi antara *supply* dengan *demand*. Sedangkan hubungan secara tidak langsung akan disajikan dalam tabel Input-Output. Tabel Input-Output yang disajikan dalam bentuk matriks tersebut juga akan menghitung dampak kegiatan pariwisata terhadap tatanan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di sektor riil (*multiplier effect*).

2.3.1. Konsep *Supply* dan *Demand* dalam Nesparda

Konsep *supply* (penyediaan atau penawaran) dan *demand* (permintaan) bagi kegiatan pariwisata disini mempunyai arti yang lebih spesifik. Interaksi ini

lebih menggambarkan tentang keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Dari sisi penyediaan produk jasa pariwisata, terdapat berbagai aktivitas seperti hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, rekreasi dan hiburan, objek wisata, serta kegiatan penunjang seperti persewaan, *money changer*, pusat industri kerajinan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Termasuk juga disini penyediaan layanan pemerintah dalam hal keimigrasian, kepabeanan, informasi pariwisata, keamanan dan sejenisnya. Sedangkan sisi permintaan atau *tourist demand* merupakan permintaan akan barang dan jasa oleh wisatawan untuk tujuan dikonsumsi langsung yang jenisnya merupakan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata tersebut. Secara sederhana pemisahan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat dilihat dalam **Gambar 2.2**.

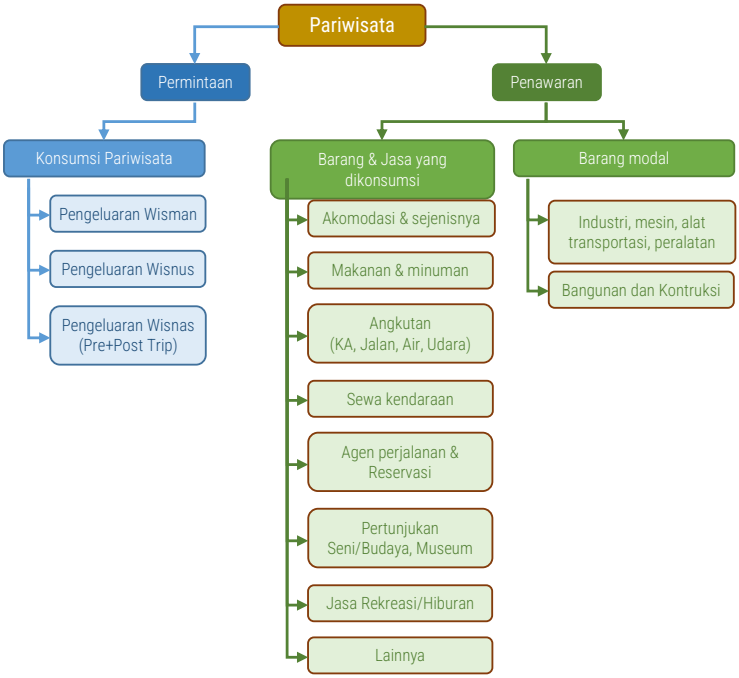

Gambar 2. 2 Ruang lingkup ekonomi pariwisata dari sisi permintaan dan penawaran (BPS, 2017)

2.3.2. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata

Untuk menyusun Nesparda dibutuhkan berbagai jenis data baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata maupun data makro. Jenis data dalam Nespada pada umumnya berupa data kuantitatif yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam suatu daerah. Namun demikian aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan nesparda ini adalah aspek pengeluaran terkait pariwisata. Struktur pengeluaran terkait wisata ini dilihat dari sisi konsumen (wisatawan) dan diklasifikasikan sesuai dengan tiga jenis wisatawan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (*Inbound)*

   Secara konsep penghitungan jumlah wisman dilakukan berdasarkan rekomendasi World Tourism Organization (UNWTO) yaitu melalui lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan terhadap pencatatan dan pengawasan lalu lintas orang yang masuk ke atau keluar dari suatu negara, yaitu kantor imigrasi. Dalam penyusunan Nesparda, bukan hanya data jumlah kunjungan wisman, namun juga diperlukan nilai pengeluaran mereka selama di Indonesia yang perlu diketahui.

   Secara ideal penghitungan devisa pariwisata baik yang diterima maupun yang dikeluarkan seperti yang dilakukan dalam penghitungan ekspor dan impor barang melalui dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Setiap barang yang keluar masuk dari dalam dan luar negeri harus mengisi daftar PEB atau PIB yang mencantumkan jenis barang, volume dan nilai dari barang tersebut.

Namun, karena data tersebut tidak tersedia, maka untuk mendapatkan data pengeluaran wisman dilakukan survei yaitu *Passenger Exit Survey* (PES).

Tujuan utama PES adalah untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia menurut negara tempat tinggal mereka, selain itu juga rata-rata lama tinggal mereka di Indonesia. Untuk melengkapi keakuratan hasil survei tersebut juga dilakukan studi mendalam ke biro-biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan paket *inbound* guna lebih mencermati distribusi pengeluaran wisman. Total pengeluaran wisman merupakan perkalian antara jumlah wisman dengan rata-rata pengeluaran mereka selama di Indonesia.

2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Pengeluaran yang dicatat dalam pengumpulan data wisnus adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial Indonesia. Sebelum tahun 2016, pengumpulan data wisnus dilakukan dengan pendekatan rumah tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan metode sampel. Namun sejak tahun 2016 pengumpulan data wisnus dilakukan secara terpisah melalui survei rumah tangga hasil kerjasama Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik. Adapun rincian tentang pengeluaran yang ditanyakan mencakup biaya-biaya untuk:

1) Akomodasi
2) Makan dan minum
3) Angkutan, baik angkutan kereta api, jalan raya, angkutan air, maupun angkutan udara
4) Sewa kendaraan
5) Paket perjalanan
6) Pemandu wisata

7) Hiburan dan rekreasi
8) Cenderamata atau oleh-oleh dan belanja
9) Kesehatan dan kecantikan
10) Lain-lain

Semua rincian biaya di atas adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk selama melakukan perjalanan, baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar oleh pihak lain.

3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia yang ke luar Negeri (*Outbound)*

Untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa diperoleh dari Ditjen Imigrasi. Namun apabila ingin dilihat negara tujuan mereka di luar negeri masih belum bisa terpenuhi karena sejak tahun 2014 tidak ada kewajiban bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke atau datang dari luar negeri untuk mengisi kartu kedatangan dan keberangkatan (A/D Card). Sehingga data mengenai karakteristik wisnas saat ini belum tesedia sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Data pengeluaran penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri diperoleh melalui survei yang dilakukan di beberapa pintu keluar (*Outbound Survey*). Pendekatan yang dilakukan adalah mewawancarai mereka saat tiba di Indonesia dan menanyakan berbagai karakteristik perjalanan mereka termasuk biaya perjalanan mereka di luar negeri. Dalam menanyakan pengeluaran biaya tiket perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya, dipisah (atau bahkan tidak ditanyakan) karena dalam konsep neraca, biaya tersebut sudah termasuk dalam neraca jasa-jasa (angkutan).

Jenis pengeluaran yang ditanyakan dalam survei *outbound* ini hampir sama dengan survei wisnus, yaitu:
1) Akomodasi

2) Makan dan minum
3) Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara yang dilakukan di luar negeri (tidak termasuk angkutan dari dan ke Indonesia)
4) Rekreasi dan hiburan
5) Belanja/Cendera mata
6) Pendidikan
7) Kesehatan dan kecantikan
8) Lain-lain

Dalam rincian pengeluaran di atas juga termasuk pengeluaran sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan dari luar negeri yang masih berkaitan dengan perjalanannya seperti contoh dalam wisnus.

2.4. Konsep Dampak Ekonomi Pariwisata

Secara ekonomi, dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa negara dari konsumsi wisman terhadap produk barang dan jasa (Gambar 2.3). Dampak pariwisata terhadap perekonomian sangat ditentukan oleh: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarannya, (2) struktur investasi pariwisata dan nilainya, dan (3) struktur dan nilai pengeluaran pemerintah untuk pariwisata. Pendekatan yang digunakan untuk melihat dampak kegiatan pariwisata terhadap perekonomian adalah menggunakan analisis dampak dengan model Input-Output.

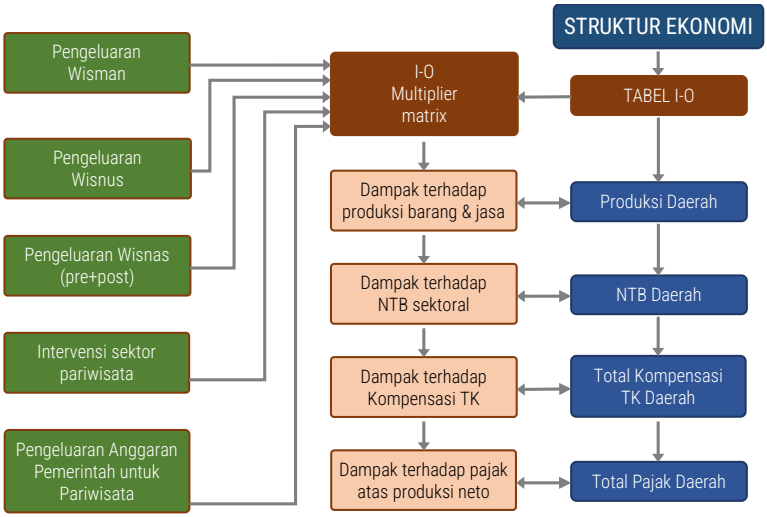

Gambar 2. 3 Kerangka dampak ekonomi pariwisata (BPS, 2017)

2.5. Analisis Input Output

Menurut Leontief dalam Priyarsono (2008), analisis Input-Output atau IO merupakan suatu metode yang secara sistematis mengukur hubungan timbal balik diantara beberapa sektor dalam sistem ekonomi yang kompleks. Pengertian dari tabel Input-Output adalah suatu tabel yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks. Sepanjang baris tabel IO menunjukkan pengalokasian output yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir.

Selain itu, pada baris nilai tambah menunjukkan komposisi penciptaan nilai tambah sektoral, sedangan sepanjang kolomnya menunjukkan struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam produksi, baik yang berupa

input antara maupun input primer. Konsep dasar model I-O Leontief didasarkan atas:

1. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor (industri) yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual beli.
2. Output suatu sektor dijual kepada sektor lainnya untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan ekspor.
3. Input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumah tangga dalam bentuk jasa dan tenaga kerja, pemerintah dalam bentuk pajak tidak langsung, penyusutan, surplus usaha dan impor.
4. Hubungan Input-Output bersifat linier.
5. Dalam suatu kurun waktu analisis, biasanya satu tahun, total input sama dengan total output.
6. Suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan.

Terdapat beberapa kegunaan atau manfaat dari analisis Input-Output (Tarigan 2006), antara lain:

1. Menggambarkan kaitan antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. Dapat dilihat bahwa perekonomian wilayah bukan lagi sebagai kumpulan sektor-sektor, melainkan merupakan satu sistem yang saling berhubungan. Perubahan pada salah satu sektor akan langsung mempengaruhi keseluruhan sektor walaupun perubahan itu terjadi secara bertahap.
2. Dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik (*backward linkages*) dan daya mendorong (*forward linkages*) dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah.
3. Dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran, seandainya permintaan akhir dari beberapa sektor dikethui akan meningkat. Hal ini dapat dianalisis melalui kenaikan input antara dan kenaikan input primer yang merupakan nilai tambah.

4. Sebagai salah satu analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif.
5. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, seandainya inputnya dinyatakan dalam bentuk tenaga kerja atau modal.

Model I-O didasarkan atas beberapa asumsi. Asumsi itu diantaranya adalah:

1. Homogenitas, berarti suatu komoditas hanya dihasilkan secara tunggal oleh suatu sektor dengan susunan yang tunggal dan tidak ada substitusi output diantara berbagai sektor.
2. Linieritas, ialah prinsip dimana fungsi produksi bersifat linier dan homogen. Artinya perubahan suatu tingkat output selalu didahului oleh perubahan pemakaian input yang proporsional.
3. Aditivitas, ialah suatu prinsip dimana efek total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka tabel I-O sebagai model kuantitatif memiliki keterbasan, yakni bahwa koefisien input ataupun koefisien teknis diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis atau proyeksi. Karena koefisien teknis dianggap konstan, maka teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi pun dianggap konstan. Akibatnya perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Tabel 2. 1 Tabel Input-Output

Input \ Output		Sektor Produksi				Permintaan Akhir	Output Total
		1	2		N		
Sektor Produksi	1	Z_{11}	Z_{12}	...	Z_{1n}	Y_1	X_1
	2	Z_{21}	Z_{22}	...	Z_{2n}	Y_2	X_2
	.	.	.	...	.	.	.
	.	.	.	...	.	.	.
	N	Z_{n1}	Z_{n2}	...	Z_{nn}	Y_n	X_n
Input Primer	V	V_1	V_2	...	V_n		
Input Total	X	X_1	X_2	...	X_n		

Sumber: Daryanto dan Hafizryanda, 2012

Tabel 2.1 di atas juga menjelaskan tabel Input-Output yang terbagi menjadi empat kuadran. Pengertian dari masing-masing kuadran sebagai berikut:

a. Kuadran I

Kuadran I merupakan transaksi antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran ini memberikan informasi mengenai saling ketergantungan antar sektor produksi dalam suatu perekonomian.

b. Kuadran II

Kuadran II menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian untuk memenuhi permintaan akhir. Permintaan akhir adalah output suatu sektor yang langsung dipergunakan oleh rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor. Total permintaan akhir merupakan penjumlahan total dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor.

c. Kuadran III

Kuadran III menunjukkan pembelian input yang dihasilkan di luar sistem produksi oleh sektor-sektor dalam kuadran antara. Kuadran ini terdiri dari pendapatan rumah tangga (upah/gaji), surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Jumlah keseluruhan nilai tambah ini akan menghasilkan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.

d. Kuadran IV

Merupakan kuadran input primer permintaan akhir yang menunjukkan transaksi langsung antara kuadran input primer dengan permintaan akhir tanpa melalui sistem produksi atau kuadran antara. Tabel Input-Output yang ditampilkan pada Tabel 2.1, memuat tiga matriks dasar yaitu matriks Z (matriks transaksi input antara), matriks Y (matriks permintaan akhir) yang terdiri atas konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor, dan selanjutnya matriks V (matriks input primer) yang terdiri atas upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung dan subsidi.

2.6. *Update* Tabel Input Output

Analisis input output perekonomian suatu negara atau daerah dapat dilakukan jika suatu negara atau wilayah memiliki Tabel Input-Output (I-O). Dalam penyusunan Tabel I-O diperlukan survei yang sangat besar, yaitu melalui survei terhadap keseluruhan sektor industri, survei rumah tangga, dan harus digabungkan lagi dengan data-data lain tentang pendapatan daerah, sisi penerimaan dan sisi penawaran. Oleh karena itu, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga tidak mungkin suatu negara atau daerah

mempublikasikan tabel Input-Output setiap tahun. Paling cepat suatu negara atau daerah mempublikasikan tabel Input-Output periode lima tahunan.

Selain metode survei, dapat digunakan pula metode non survei antara lain: *Regional Supply Percentage Method*, *Location Quontient Method*, metode RAS, dan *euostat method*. Untuk dua metode pertama, penaksiran matriks teknologi suatu daerah berdasarkan matriks wilayah yang lebih tinggi dari daerah tersebut. Misalnya matriks teknologi kabupaten/ kota ditaksir dari matriks teknologi provinsi. Sedangkan metode RAS, merupakan metode penaksiran matriks teknologi tahun tertentu, berdasarkan matriks teknologi tahun sebelumnya.

Metode RAS pada prinsipnya merupakan metode estimasi koefisien I-O non survei. Ahli ekonomi yang pertama kali memperkenalkan cara pembuatan tabel I-O seperti ini adalah Richard Stone dari Cambridge University pada tahun 1961 (Miller dan Blair, 1985). Metodenya dikenal dengan nama RAS. RAS adalah sebuah nama rumus matriks yang dikembangkan oleh Richard Stone, dimana R dan S adalah matriks diagonal berukuran n x n, dan A adalah matriks berukuran n x n yang menunjukkan banyaknya sektor industri.

Selanjutnya, metode *Eurostat* hanya menggunakan hasil estimasi makro ekonomi sebagai masukan eksogen untuk prosedur iteratif. Vektor kolom dan baris untuk konsumsi antara dan permintaan akhir diturunkan sebagai variabel endogen, bukan sebagai variabel eksogennya. Dengan metodologi ini, prosedur baru untuk memperbarui dan memproyeksikan tabel Input-Output berdasarkan ekonomi makro prakiraan telah diterapkan dalam penelitian empiris. Ide dasar dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan tabel Input-Output, yang konsisten dengan estimasi makro ekonomi untuk PDB tetapi menghindari penyesuaian koefisien input yang sewenang-wenang untuk memastikan konsistensi penawaran dan permintaan. Dalam banyak kasus, proyeksi produk domestik bruto mencakup estimasi untuk PDB dan

berbagai kategori permintaan akhir dan dalam beberapa kasus untuk tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor tertentu.

2.7. Peramalan (*Forecasting*)

2.7.1. Pengertian Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan merupakan usaha untuk melihat situasi dan kondisi pada masa yang akan datang dengan cara memperkirakan pengaruh situasi dan kondisi pada masa yang akan datang terhadap perkembangan di masa yang akan datang (Ginting, 2007). Tersine (1994) menjelaskan bahwa peramalan adalah sebuah prediksi, proyeksi, atau estimasi dari ketidakpastian masa depan.

Pada umumnya kegiatan peramalan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien.
2. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang.
3. Untuk membuat keputusan yang tepat.

2.7.2. Kegunaan dan Peran Peramalan

Kegunaan dari peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. (Ginting, 2007).

2.7.3. Jenis Peramalan

Pada umumnya peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dan cara melihatnya. Apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam (Ginting, 2007):

1. Peramalan yang subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya.
2. Peramalan yang objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut.

Disamping itu, jika dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, maka peramalan dibedakan menjadi dua, yaitu (Ginting, 2007):

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester.
2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan dengan jangka waktu yang kurang dari satu setengah tahun atau tiga semester.

Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu (Ginting, 2007):

1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya.
2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut.

2.7.4. Langkah-Langkah Peramalan

Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. Pada dasarnya ada tiga langkah peramalan yang penting, yaitu (Ginting, 2007):

1. Menganalisa data yang lalu. Analisa ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu. Dengan tabulasi tersebut dapat diketahui pola dari data tersebut.
2. Menentukan metode yang dipergunakan.
3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang digunakan, dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan.

2.7.5. Jenis-Jenis Pola Data

Langkah penting sebelum menentukan metode peramalan adalah menentukan pola data. Pola data dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (Ginting, 2007):

1. Pola Horizontal (H), terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan.
2. Pola Musiman (S), terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman (misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu.
3. Pola Siklis (C), terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis.
4. Pola Trend (T), terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data.

2.7.6. Jenis-Jenis Metode Peramalan

Sejauh ini telah dikembangkan beberapa metode atau teknik-teknik peramalan untuk menghadapi bermacam-macam keadaan yang terjadi. Namun pada dasarnya metode peramalan kuantitatif dapat dibedakan atas (Ginting, 2007):

1. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan deret waktu, atau *time-series*.
2. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, yang bukan waktu, yang disebut korelasi atau sebab akibat (*causal methods*).

Metode-metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, terdiri dari (Ginting, 2007):

a. Metode smoothing, yang mencakup metode data masa lalu (*past data*), metode rata-rata kumulatif, metode rata-rata bergerak (*moving averages*), dan metode *exponential smoothing*.
b. Metode Box Jenkins, menggunakan dasar waktu dengan model matematis, agar kesalahan yang terjadi dapat sekecil mungkin.
c. Metode proyeksi *trend* dan regresi, dasar garis *trend* untuk suatu persamaan matematis, sehingga dengan dasar persamaan tersebut dapat diproyeksikan hal yang diteliti untuk masa depan.

Metode-metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya, yang bukan waktu, yang disebut korelasi atau sebab akibat (*causal methods*), terdiri dari (Ginting, 2007):

a. Metode regresi dan korelasi, didasarkan pada penetapan estimasi menggunakan teknik "*least square*".

b. Metode ekonometri, didasarkan atas peramalan pada sistem persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan.
c. Metode Input-Output, dipergunakan untuk menyusun proyeksi *trend* ekonomi jangka panjang.

2.7.7. Pemilihan Teknik dan Metode Peramalan

Dalam pemilihan teknik dan metode peramalan, pertama kita perlu mengetahui ciri-ciri yang penting yang perlu diperhatikan bagi pengambilan keputusan dan analisa keadaan, dalam mempersiapkan peramalan. Ada enam ciri utama yang perlu diperhatikan, yaitu (Ginting, 2007):

1. Horison waktu (*time horizon*). Horizon waktu umumnya dibagi ke dalam jangka pendek (satu sampai dengan tiga bulan), menengah (tiga sampai dengan setahun), dan jangka panjang (lebih dari satu setengah tahun).
2. Tingkat perincian (*level of detail*).
3. Jumlah produk.
4. Pengawasan versus perencanaan.
5. Stabilitas.
6. Prosedur perencanaan yang ada.

Banyak ciri-ciri lain yang penting dalam pemilihan teknik dan metode peramalan, akan tetapi enam hal di atas adalah yang terpenting. Sebagai tambahan dalam memperimbangkan keadaan, pengambil keputusan atau analisa harus pula mempertimbangkan ciri-ciri dari berbagai teknik dan metode peramalan. Adapun enam faktor utama yang dapat diidentifikasikan sebagai teknik dan metode peramalan, yaitu (Ginting, 2007):

1. Horison waktu (*time horizon*).
   Ada dua aspek dari horizon waktu yang berhubungan dengan metode peramalan, yaitu cakupan waktu di masa yang akan datang dan jumlah periode untuk mana ramalan diinginkan.

2. Pola dari data.
   Dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa macam dari pola yang didapati di dalam data yang diramalkan akan berkelanjutan.
3. Jenis dari model.
   Ada dua model dari keadaan yang diramalkan, yaitu model *time-series* dan *causal model*.
4. Biaya.
   Umumnya ada empat unsur biaya yang tercakup dalam penggunaan suatu prosedur peramalan, yaitu biaya-biaya pengembangan, penyimpanan data, operasi pelaksanaan dan kesempatan dalam penggunaan teknik-teknik dan metode lain.
5. Ketepatan (*accuracy*).
   Tingkat ketepatan yang dibutuhkan sangat erat hubungannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramalan.
6. Mudah tidaknya penggunaan atau aplikasinya.

2.7.8. Ukuran Akurasi

Peramalan Model-model peramalan yang dilakukan kemudian divalidasi menggunakan sejumlah indikator. Indikator-indikator yang umum digunakan adalah rata-rata penyimpangan absolut (*Mean Absolute Deviation*), rata-rata kuadrat terkecil (*Mean Square Error*), rata-rata persentase kesalahan absolut (*Mean Absolute Percentage Error*), validasi peramalan (*Tracking Signal*), dan pengujian kestabilan (*Moving Range*).

1. *Mean Absolute Deviation* (MAD)

   Metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut. *Mean Absolute Deviation* (MAD) mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan

(nilai absolut masing-masing kesalahan). MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli.

2. *Mean Square Error* (MSE)

   Mean Squared Error (MSE) adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Metode itu menghasilkan kesalahan-kesalahan sedang yang kemungkinan lebih baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang besar.

3. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

   Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE mengindikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata.

4. *Tracking Signal*

   Validasi peramalan dilakukan dengan *Tracking Signal*. *Tracking Signal* adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Nilai *Tracking Signal* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebegai berikut. *Tracking signal* yang positif menunjukan bahwa nilai aktual permintaan lebih besar daripada ramalan, sedangkan *tracking signal* yang negatif berarti nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. *Tracking signal* disebut baik apabila memiliki RSFE yang rendah, dan mempunyai positif *error* yang sama banyak atau seimbang dengan negatif *error*, sehingga pusat dari *tracking signal*

mendekati nol. *Tracking signal* yang telah dihitung dapat dibuat peta kontrol untuk melihat kelayakan data di dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah.

5. *Moving Range* (MR)

   Peta *Moving Range* dirancang untuk membandingkan nilai permintaan aktual dengan nilai peramalan. Data permintaan aktual dibandingkan dengan nilai peramalan pada periode yang sama. Peta tersebut dikembangkan ke periode yang akan datang hingga dapat dibandingkan data peramalan dengan permintaan aktual. Peta *Moving Range* digunakan untuk pengujian kestabilan sistem sebab-akibat yang mempengaruhi permintaan.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Batu Runcing - Kota Sawahlunto

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat dan referensi lainnya yang terkait. Sementara data primer diperoleh melalui survei lapangan di beberapa lokasi obyek wisata melalui wawancara terhadap wisatawan, sektor usaha yang beroperasi di lokasi wisata atau sektor usaha yang terlibat langsung dengan kegiatan wisata, pengelola wisata, serta masyaraat sekitar lokasi wisata. Selain itu, data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap *stakeholder* terkait kepariwisataan Sumatera Barat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada kegiatan ini meliputi survei lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi pustaka.

a. **Survei Lapangan;** yaitu kunjungan lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait perkembangan pariwisata di beberapa lokasi utama pariwisata Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada pengunjung wisata (lokal, nusantara, maupun manca negara), sektor usaha yang ada di lokasi sampel wisata, pengelola wisata dan asosiasi terkait wisata. Wawancara dilakukan dengan bantuan kuesioner melalui *online* (dalam jaringan) maupun tatap muka langsung dilokasi (*offline*).

b. ***Focus Group Discussion* (FGD);** yaitu diskusi terfokus dengan para *stakeholder* untuk memperoleh masukan terkait dengan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat. FGD dilakukan dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan

Sumatara Barat seperti Dinas Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat, dan pelaku usaha di sektor pariwisata.

c. **Studi Pustaka,** yaitu melakukan penelusuran data-data sekunder seperti data statistik mengenai profil sosial ekonomi wilayah Sumater Barat, kondisi umum lokasi wisata di Sumatera Barat, dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah dan studi pustaka lainnya yang terkait dengan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Sumatera Barat.

3.3. Metode Analisis

Dalam menjawab tujuan penelitian, tentunya diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas metode yang akan digunakan dalam menjawab masing-masing tujuan kajian.

3.3.1. Metode Eurostat: *Updating* Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat

Seperti halnya dijelaskan pada bagian kajian literatur, terdapat banyak metode untuk melakukan penyusunan tabel Input-ouput suatu wilayah, bisa melalui teknik survei penuh ataupun melalui *updating*. Dari berbagai metode yang ada, dalam kajian ini akan dilakukan teknik updating yang dikembangkan oleh Eurostat.

Pengembangan teknik updating *Eurostat method* didasari pada kondisi bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara dan wilayah memiliki jeda waktu yang cukup lama untuk menyusun publikasi tabel

Input-Output. Oleh karena itu aplikasi analisis Input-Output dianggap usang karena basis datanya sudah ketinggalan zaman. Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya penyusunan tabel Input-Output yang sangat bergantung pada survei dan statistik utama. Oleh karena itu, Eurostat mengembangkan Teknik *update* baru yang diprakarsai oleh Beutel (Beutel 2002, Beutel et al. 1994, Penzkofer, Schmalholz, Scholz dan Beutel 1989) guna memberikan alternatif teknik *updating* tabel Input-Output disamping yang sudah ada sebelumnya seperti RAS, MODOP, *Linear Programming Method* atau *Statistical Correction Method*.

Pada dasarnya*, Eurostat method* ini menggunakan ide dasar dari Teknik RAS. Hal yang paling menonjol dari metode ini adalah dengan menghindari perubahan "asal-asalan" dari koefisien input yang sering kali terjadi ketika menggunakan prosedur RAS. Asumsi dasar dari *Eurostat method* adalah: proses substitusi mengubah input (baris); pengaruh produksi mempengaruhi keluaran (kolom) dan pengaruh harga mempengaruhi masukan dan keluaran. Metode EURO ini mencoba untuk menghindari kekurangan-kekurangan dari metode sebelumnya.

Teknik *updating* Eurostat hanya menggunakan prakiraan/publikasi ekonomi makro resmi sebagai masukan eksogen untuk prosedur iteratif. Vektor kolom dan baris untuk konsumsi antara dan permintaan akhir diturunkan sebagai variabel endogen, bukan ditetapkan sebagai variabel eksogen. Dan bagian ini yang sering kali menjadi pekerjaan besar bagi seorang peneliti untuk menentukan koefisien teknologi dan konsumsi, sehingga dibutuhkan kegiatan survei dan kajian tambahan yang membutuhkan lebih banyak waktu, biaya dan tenaga. Dan bagian ini pula yang sering kali mengakibatkan perubahan koefisien yang ada dianggap "asal-asalan".

Dengan metodologi yang dikembangan Eurostat, prosedur untuk memperbarui dan memproyeksikan tabel Input-Output bisa hanya

menggunakan data ekonomi makro. Ide dasar dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan tabel Input-Output yang konsisten dengan prakiraan makro ekonomi resmi untuk PDB/PDRB tetapi menghindari penyesuaian koefisien input yang sewenang-wenang untuk memastikan konsistensi penawaran dan permintaan.

3.3.2. Metode Analisis Input-Output: Menganalisis Keterkaitan Sektor Hilir dan Hulu dari Sektor Pariwisata

Analisis Input-Output mencakup beberapa perhitungan dalam menganalisis suatu sektor yaitu:

1. Matriks Pengganda

   Dampak Pengganda adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian nasional. Untuk menghitung matriks pengganda dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

   a. Menghitung matriks koefisien input (matriks A)

      Unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus:

      $$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

      Keterangan:

      a_{ij} = koefisien Input sektor ke i oleh sektor ke j

      x_{ij} = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j

      X_j = output sektor ke j.

   b. Menghitung Matriks (I-A)

Mengurangkan suatu matriks identitas (yaitu matriks dengan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0) terhadap matriks koefisien input.

c. Menghitung matriks pengganda (B) dan total.

Matriks pengganda (B) dihitung dengan cara menginverskan matriks yang diperoleh pada tahap 2 diatas ($B = (I-A)^{-1}$).

2. Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan

a. Hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai $X = (I- A)^{-1} F$, dimana X adalah vektor kolom dari output, F adalah vektor kolom dari permintaan akhir.

b. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi (rj) dapat dirumuskan sebagai:

$$r_j = b1_j + b2_j \ldots + bn_j = \sum i\, b_{ij}$$

c. Jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya, dengan membagi jumlah dampak tersebut (r_j) dengan banyaknya sektor (n), dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing- masing sektor akibat perubahan permintaan akhir.

d. Namun demikian, karena sifat permintaan akhir masing-masing sektor saling berbeda, maka baik jumlah maupun rata-rata dampak tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai ukuran pembanding dampak pada setiap sektor. Oleh karenanya, ukuran tersebut perlu dinormalkan (*normalized*) dengan cara membagi rata-rata dampak

suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dinormalkan ini dinamakan dengan indeks daya penyebaran (α_j) atau tingkat dampak keterkaitan kebelakang (*backward linkages effect ratio*), yang dapat dirumuskan:

$$\alpha_j = \frac{\sum_i b_{ij}}{(\frac{1}{n})\sum_i \sum_j b_{ij}}$$

Dimana:

α_j = 1 daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

α_j > 1 daya penyebaran sektor j diatas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

α_j < 1 daya penyebaran sektor j dibawah rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

Dari persamaan tadi juga dapat dilihat jumlah dampak output suatu sektor i sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor, yang dapat dirumuskan sebagai: $s_j = \Sigma_j b_{ij}$.

Nilai s_j disebut dengan jumlah derajat kepekaan, merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan kedepan (*forward linkage*) sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah.

Dengan pola pikir yang sama seperti ketika menghitung indeks daya penyebaran, kita juga bisa menghitung indeks derajat kepekaan (β_i) dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta_i = \frac{\sum_j b_{ij}}{(\frac{1}{n})\sum_i \sum_j b_{ij}}$$

Dimana :

β_i = 1 derajat kepekaan sektor j sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi.

β_i > 1 derajat kepekaan sektor j diatas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi.

β_i < 1 derajat kepekaan sektor j dibawah rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi.

3. Analisis Dampak

a. Dampak permintaan akhir terhadap output.

Rumus dampak permintaan akhir terhadap output: $X = (I-A)^{-1} F$
Artinya: mengalikan matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir

b. Dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto (NTB).

Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap NTB, terlebih dahulu dibentuk matriks diagonal koefisien NTB. Koefisien NTB dicari dengan cara membagi nilai tambah bruto (input primer) dengan total input. (lihat pada contoh kasus).

Tahap penghitungan dampak permintaan akhir terhadap NTB:

- Membentuk matriks diagonal koefisien NTB dengan cara membagi nilai tambah bruto (input primer) dengan total input.
- Mengalikan matriks diagonal koefisien NTB dengan matriks dampak permintaan akhir terhadap output yang telah dihitung sebelumnya.

c. Dampak permintaan Akhir Terhadap kebutuhan Impor.

Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor, diperlukan informasi mengenai komponen impor pada

masing-masing sektor, baik untuk permintaan antara maupun permintaan akhir.

3.3.3. Metode *Composite Forecasting*: Mengestimasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat

Dalam rangka memperoleh peramalan yang *robust*, dalam penelitian ini akan digunakan *composite forecasting* yang merupakan gabungan dari berbagai teknik peramalan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kajian literatur sebelumnya. Secara teori, masing-masing teknik peramalan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, oleh karena itu *composite forecasting* menjadi salah satu solusi untuk mampu mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh setiap teknik peramalan yang ada.

Pada tahap awal, peramalan jumlah wisatawan ke Sumatera Barat akan dilakukan dengan teknik *univatiate time series analysis* yang akan mengunakan setidaknya tiga teknik peramalan yang diantaranya, analisis dekomposisi, metode *smoothing*, dan *seasonal* ARIMA. Penggunaan ketiga metode peramalan ini dilakukan karena data kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara tersedia dalam bentuk data bulanan. Dalam prakteknya, data bulanan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, sehingga analisisnya perlu menggunakan metode *forecasting* yang mampu menangkap hal tersebut.

Tahap akhir dari bagian ini adalah melakukan *composite forecasting* dari hasil analisis yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya. Untuk melakukan evaluasi terhadap hasil peramalan akan dilakukan *back casting* terhadap data sebelumnya.

BAB 4
UPDATE TABEL INPUT DAN OUTPUT

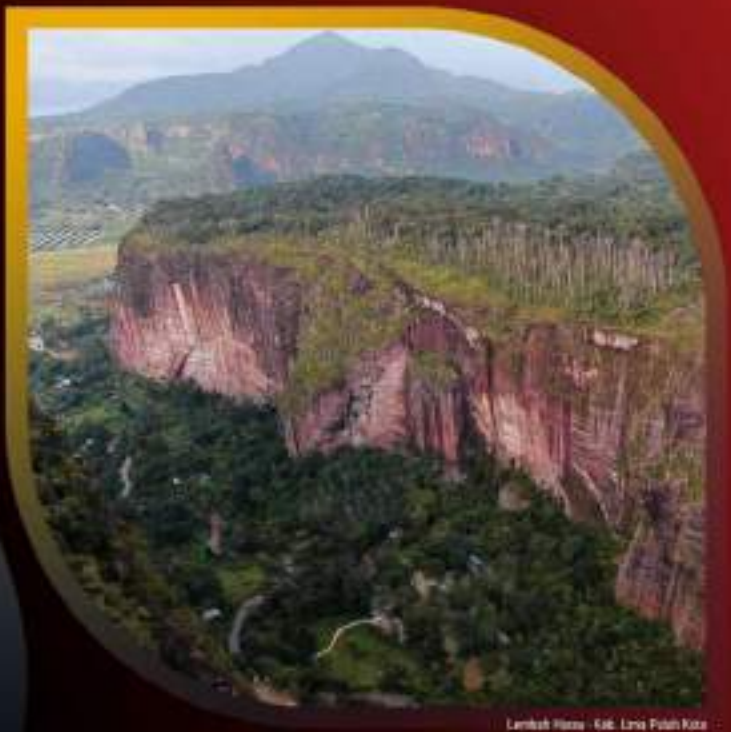

Lembah Harau - Kab. Lima Puluh Kota

Pada bagian metodologi sudah dikemukakan, bahwa salah satu yang dilakukan untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat adalah menggunakan Tabel Input-Output (I-O). Tabel I-O merupakan alat yang efektif untuk analisis dan proyeksi dalam suatu perencanaan pembangunan. Untuk menghasilkan model Input-Output yang dapat menerangkan keadaan perekonomian suatu wilayah pada waktu yang sedang dan telah berlangsung serta di masa mendatang, diperlukan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tabel I-O Sumatera Barat terakhir yang dipublikasikan oleh BPS adalah tabel I-O tahun 2016. Perkembangan level dan nominal sektor-sektor ekonomi yang mengalami perubahan cukup berarti diperlukan upaya untuk *update*. Pada bagian ini akan dibahas mengenai *updating* Tabel Input-Output yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar suatu kegiatan dalam perekonomian suatu wilayah.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan *updating* Tabel I-O diantaranya:

1. *Univariate methods*
    a. *Proportional Correction Method*
    b. *Statistical Correction Method*
2. *Bivariate methods*
    a. *RAS procedure*
    b. *Model of Double Proportional Patterns*
3. *Stochastic procedures*
    a. *Lagrange method*
    b. *Least Squares Method*
    c. *Minimisation approach*
    d. *Euro method*

Namun demikian, permilihan metode *updating* Tabel I-O yang dipilih adalah teknik *Euro Method.* Terdapat beberapa alasan pemilihan teknik *updating*

dengan metode ini, yaitu yang pertama metode ini telah menjadi standar negara-negara Uni Eropa dalam melakukan *updating* Tabel I-O. Selain itu, keunggulan lainnya yaitu dibutuhkan informasi yang lebih sederhana namun mampu menangkap perubahan nilai makro ekonomi. Beberapa informasi yang dibutuhkan dalam proses *updating* Tabel I-O dengan metode ini adalah nilai tambah bruto sektoral dan komponen pengeluaran dalam PDB. Metode ini juga dapat menghindari penggunaan koefisien input yang bersifat "*arbitrary*" dalam rangka memperoleh nilai *supply* dan *demand* yang konsisten. Alasan terakhir pemilihan metode ini adalah teknik estimasi yang lebih mudah dan hanya membutuhkan algoritma sederhana dalam melakukan proses iterasi. Secara rinci, proses *updating* Tabel I-O Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini:

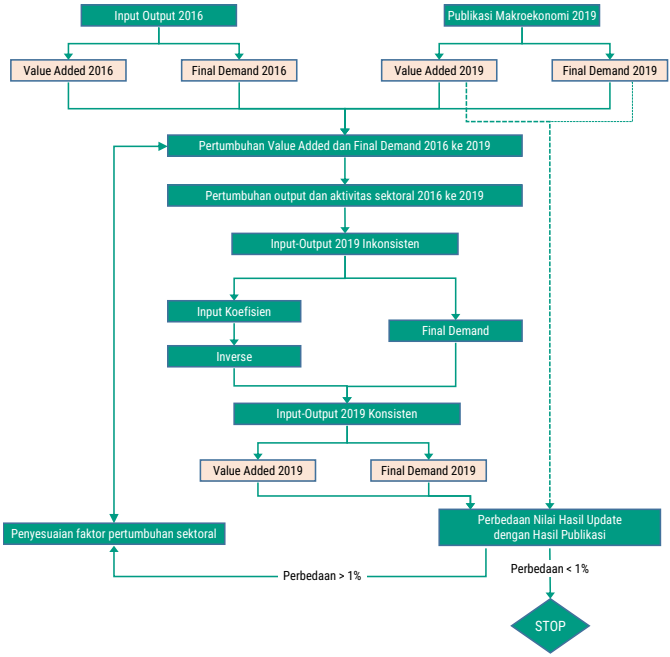

Gambar 4. 1 Diagram alir metode update Tabel I-O Provinsi Sumatera Barat

Tahapan yang dilakukan dalam proses *update* Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. **Tahap 1 :** Update kebutuhan input untuk *intermediate* and *final demand.*

$$T_2 = Z * T_1$$
$$T_3 = T_1 * S$$
$$T_4 = (T_2 + T_3)/2$$

T_1 = *matrix indetmediate* dan *final demand* IO tahun 2016

T_2 = *matrix* kebutuhan input hasil perkalian antara pertumbuhan output dengan tabel input output 2016

T_3 = *matrix* kebutuhan input hasil perkalian antara pertumbuhan produksi sektoral dengan input output 2016

T_4 = *matrix* rataan antara T_2 dan T_3

S = diagonal *matrix* pertumbubuhan output domestik dan impor

Z = diagonal *matrix* pertumbubuhan produksi domestik dan final demand

2. **Tahap 2** : Update *value added* berdasarkan sektor.

$$T_5 = v * w_i$$

T_5 = vector nilai *value added* hasil update

v = nilai *value added* sektoral pada tahun 2016

w_i = diagonal matrix pertumbuhan output sektoral

3. **Tahap 3** : Menggabungkan Input-Output dan *value added* menghasilkan tabel Input-Output yang *inconsisten*.

4. **Tahap 4 :** Menghitung koefisien input dari data Input-Output *inconsisten.*

$$a_{ij} = x_{ij}/x_{.j}$$
$$b_{ij} = m_{ij}/x_{.j}$$
$$c_{.j} = v_{.j}/x_{.j}$$

a_{ij} = input koefisien untuk komoditas domestik

b_{ij}= input koefisien untuk komoditas impor

$c_{.j}$= input koefisien untuk value added

x_{ij}= *intermediate demand* komoditas domestik

m_{ij}= *intermediate demand* komoditas impor

$v_{.j}$= *value added*

$x_{.j}$= total produksi

5. **Tahap 5 :** Membentuk model Input-Output.

$$x = (1 - A)^{-1}y$$

x = *vector* output domestik
A = *matrix* koefisien input
$(1-A)^{-1}$= *matrix inverse* koefisien input
y = vektor *final demand*

6. Tahap 6 : menghitung kebutuhan input menggunakan model Input-Output berdasarkan total otutput dari tabel Input-Output *inconsisten.*

$$Z = B * (1-A)^{-1}y$$

Z = matrix input produksi
B = matrix koefisien input (komoditas domestik, impor dan *value added*)

7. Tahap 7 : membentuk tabel Input-Output yang konsisten.

8. Tahap 8 : Evaluasi perbedaan pertumbuhan sektoral dan komponen pengeluaran berdasarkan tabel Input-Output dan data pertumbuhan PDB yang dipublikasikan BPS.
   a) Jika perbedaan lebih dari 1%, maka proses updating dilakukan ulang dari tahap satu sampai dengan tahap 7 dengan melakukan penyesuaian terhadap komponen koefisien kebutuhan input.
   b) Jika perbedaan kurang dari 1% maka update selesai.

Sehingga, untuk melakukan *update* Tabel I-O Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 ke 2019 dilakukan proses iterasi sebanyak 20 kali. Basis data yang digunakan dalam proses *updating* ini adalah Data IO Sumatera Barat tahun 2016 transaksi domestik atas dasar harga produsen 52 sektor lapangan usaha. Selanjutnya, untuk melakukan *updating* digunakan data seperti PDRB Sumatera Barat atas dasar harga berlaku, baik menurut lapangan usaha maupun menurut pengeluaran.

Dalam proses updating ini juga, terdapat beberapa penyesuaian sektor lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang dilakukan, diantaranya:

1. Terdapat 4 Sektor Usaha yang nilai produksinya Nol sehingga dilakukan agregasi dengan sektor yang paling mirip
    a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi menjadi Pertambangan Batubara dan Lignit.
    b. Industri Pengolahan Tembakau menjadi Industri Makanan dan Minuman.
    c. Industri Logam Dasar menjadi Industri Barang Galian bukan Logam.
    d. Industri Mesin dan Perlengkapan menjadi Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik.
2. Total Sektor yang bisa dilakukan update menjadi 48 Sektor
3. Komponen Pengeluaran
    a. Konsumsi Rumah Tangga diagregasi dengan konsumsi LNPRT
    b. Konsumsi Pemerintah
    c. Nilai ekspor dan impor merupakan total ekspor domestik dan luar negeri
    d. Komponen inventory diagaregasikan dengan PMTDB

Dengan demikian, setelah melalui berbagai tahapan *update* dan penyesuaian, maka proses *updating* telah dinyatakan selesai. Selanjutnya, Tabel Input-Output hasil *update* ini dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya dalam mengetahui dampak sektor pariwisata bagi perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Beberapa perubahan dan evaluasi data akibat proses *updating* yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel berikut menunjukkan perubahan koefisien input akibat *updating* yang dilakukan. Perbedaan koefisien input domestik dan koefisien nilai tambah bruto di tabel Input-Output tahun 2019 berbeda masing-masing 2,52% dan 2,48%. Sedangkan koefisien input impor berbeda sebesar -17,33%.

Tabel 4. 1 Perubahan koefisien input akibat update

Indikator	Pesentase Perbedaan Nilai Koefisien Input 2019 dibanding 2016		
	Rata-rata	Min	Max
Koefisien Input Domestik	2,52	-23,17	41.94
Koefisien Input Impor	-17,33	-25,15	-7,18
Koefisien Nilai tambah Bruto	2,48	-9,74	10,97

Tabel 4.2 menunjukkan evaluasi data hasil *update* tabel Input-Output dengan publikasi PDRB. Rata-rata perbedaan pertumbuhan 2016 ke 2019 dengan data publikasi PDRB untuk PDRB sektoral sebesar -0,01%. Sedangkan perbedaan dengan PDRB pengeluaran berbeda sebesar -0,05%.

Tabel 4. 2 Evaluasi data hasil update Tabel Input-Output dengan publikasi PDRB

Indikator	Pesentase Perbedaan Pertumbuhan 2016 ke 2019 antara data I-O dengan data Publikasi PDRB		
	Rata-rata	Min	Max
PDRB Sektoral	-0,01	-0,20	0,20
PDRB Pengeluaran	-0,05	-0,37	0,06

BAB 5
PROFIL PARIWISATA PROV. SUMATERA BARAT

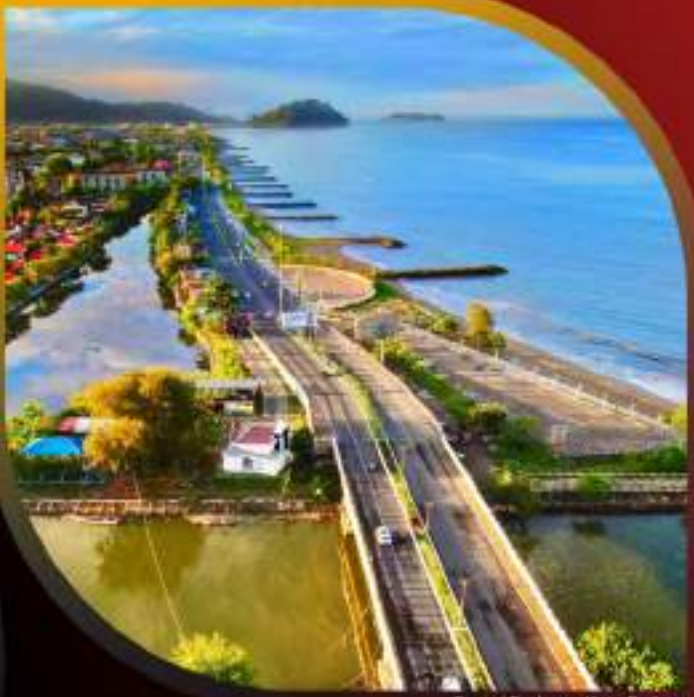

Pantai Padang - Kota Padang

5.1. Kondisi Fisik (Administrasi dan Geografis)

Kondisi fisik dari suatu wilayah mempunyai keterkaitan erat dengan potensi untuk pengembangan wilayah tersebut. Beberapa wilayah mempunyai faktor kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sementara wilayah lainnya mempunyai sumber daya alam yang terbatas. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kelimpahan sumber daya alam. Wilayah Provinsi Sumatera Barat secara administrasi terdiri atas 12 kabupaten dan 7 Kota dengan luas wilayah mencapai 42.012,89 km^2. Potensi luas wilayah dan kelimpahan sumber daya alam tersebut didukung dengan pengelolaan secara aktif dari level desa sampai dengan kecamatan. Terdapat 179 kecamatan, 230 Kelurahan, 803 nagari dan 126 desa di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat secara geografis terletak antara 0^0 54' Lintang Utara sampai dengan $3^0$30' Lintang Selatan, dan 98^0 36' sampai 101^0 53' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
b. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
c. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
d. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat memiliki keunggulan karena memiliki garis pantai sepanjang 375 km yang berbatasan langsung dengan Lautan Hindia dan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 km, sehingga total garis pantai seluruhnya adalah sepanjang 1.378 km. Wilayah di sekitra pantai dengan ketinggian tempat (topografi) 0-100 mdpl berjumlah 1.286,79 ha (30,41%) yang berada pada sepanjang pantai Barat yakni di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Garis pantai tersebut menunjukkan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang potensial baik untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan maupun aktivitas wisata bahari. Dalam mendukung pengembangan wisata bahari, di Provinsi

Sumatera Barat terdapat 220 pulau-pulau kecil. Beberapa pulau-pulau kecil tersebut menjadi daerah tujuan wisata bahari bagi wisatawan nusantara maupun mancangera.

Pada wilayah daratan potensi SDA di Sumatera Barat terdiri atas lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi. Persentase hutan lindung masih dominan disetiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat di Kabupaten Pasaman yang mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, disusul oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%. Porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka alam dan perlindungan alam, sedangkan lahan untuk hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, dalam pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi, terutama untuk ekowisata dan wisata alam liar. Oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan kepariwisataan ke depannya.

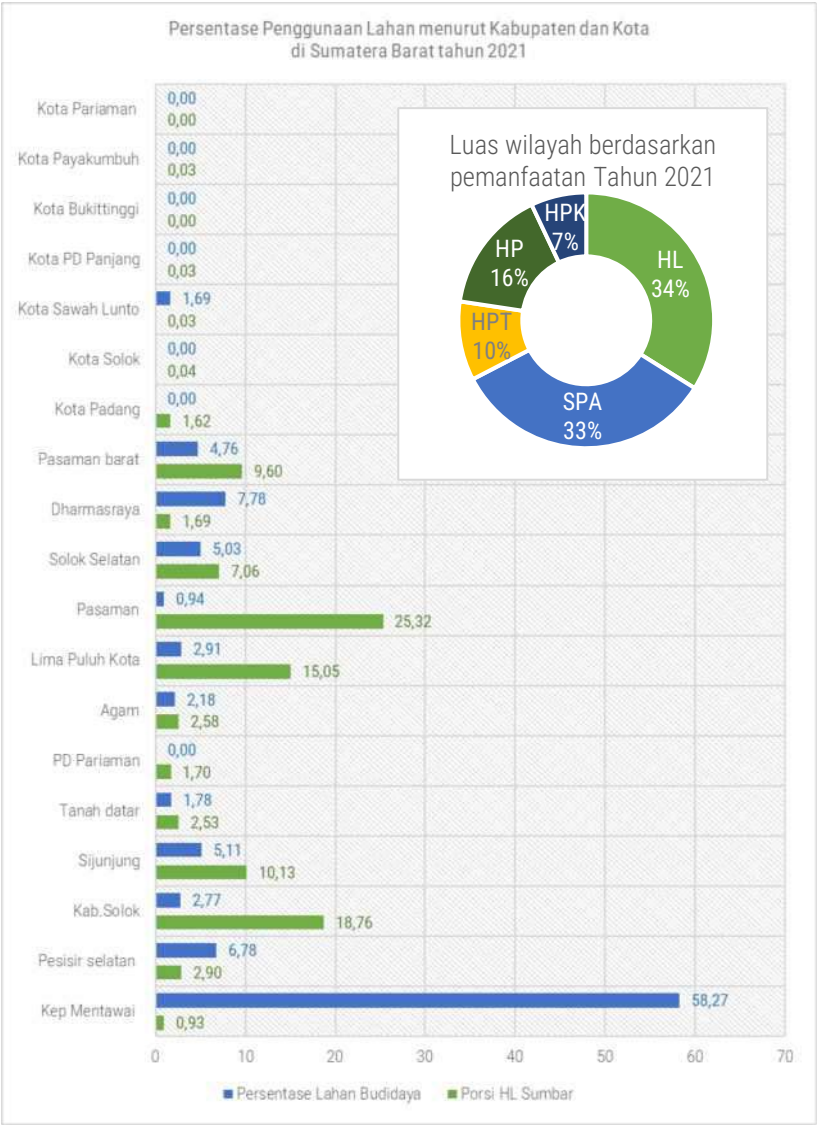

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026

Gambar 5. 1 Penggunaan dan pemanfaatan luas lahan Sumatera Barat

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Hutan Suaka Perlindungan Alam (SPA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK). Dari pola penggunaan tersebut, luas Suaka Perlindungan Alam (SPA) mencapai 33% diikuti oleh Hutan Lindung sebesar 34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi lahan di wilayah darat didominasi oleh pemanfaatan lahan untuk fungsi lindung. Potensi lindung ini apabila dikaitkan dengan aktivitas wisata dapat mendukung kegiatan ekowisata. Pengembangan ekowisata di Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar sumber daya alam yang dimiliki bisa tetap terjaga namun disaat yang bersamaan bisa menjadi sumber perekonoian masyarakat.

Berdasarkan data pada Gambar 5.1 juga dapat dilihat bahwa proporsi hutan lindung dibandingkan dengan Lahan untuk budidaya di beberapa Kabupaten/Kota lebih dominan. Letak wilayah yang tepat berada pada garis kahatulistiwa serta dikombinasikan dengan luasan hutan hujan yang memiliki kelembaban sepanjang tahun menyebabkan suhu rata-rata berkisar antara 25,35^{0}C dengan rata-rata kelembaban udara adalah 83,79%. Kondisi geografis yang cukup ideal menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata utama bagi penduduk yang berada di provinsi yang berdekatan seperti seperti Riau, Jambi dan Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Mayoritas wilayah di Sumatera barat berada pada ketinggian diantara 500-1000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan luas mencapai 1.357.045 ha (32,07%). Terdapat wilayah dengan ketinggian 1000-1500 mdpl seluas 767.117 ha atau sebesar 18,13%. Potensi topografi yang bervariasi ini menjadikan wilayah Sumatera Barat potensial untuk pertanian baik pangan maupun hortikultura. Pada daerah dengan ketinggi 500- 1000 mdpl daerah tersebut merupakan bentangan bukit barisan yang membentang disepanjang Pulau Sumtera dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Potensi bukit barisan ini menjadikan daya tarik wisata untuk geologi seperti geopark.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat seluruhnya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5,5 juta paling banyak menetap pada kawasan pantai dengan Kota Padang menempati urutan pertama penduduk terbanyak mencapai 909.040 jiwa lebih, diikuti oleh Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan wilayah *hinterland*-nya paling padat itu adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sijunjung dan Dharmasraya. Struktur umur penduduk didominasi oleh struktur umur muda mencapai lebih dari 89,17% sisanya struktur umur lansia mencapai 10,83%, sehingga angka beban tanggungan cukup besar, karena penduduk yang berkerja jauh lebih sedikit dengan penduduk yang belum bekerja dan lansia. Tekanan terhadap beban tanggungan ini, telah menyebabkan angka kemiskinan menjadi lebih tinggi di kawasan yang padat penduduk ini. Oleh karena, diperlukan pembukaan kesempatan kerja diluar sektor pertanian seperti pengembangan kawasan wisata terutama wisata pantai dan wisata kelautan yang mampu memberikan peluang kesempatan kerja yang lebih besar bagi angkatan kerja yang jumlahnya semakin besar dari waktu ke waktu.

Keunikan karakteristik masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau khususnya sebagaimana disinyalir oleh Kato (1980) terdapat pada tiga karakteristiknya yakni: kepercayaan yang sangat kuat pada ajaran agama Islam, sistem migrasi penduduk dari wilayah “darek” ke wilayah “rantau” yang lebih popular dengan sebutan ”Merantau”, dan dianutnya sistem garis keturunan ibu, yakni sistem matrilineal dalam pola pewarisannya. Karakteristiknya yang unik ini secara budaya, juga telah memberikan potensi keuntungan dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat melalui penetapan nagarinya sebagai tujuan wisatawan melalui konsep desa wisata.

5.2. Potensi Pulau-Pulau Kecil dan Wisata Bahari

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa potensi untuk wisata di Provinsi Sumatera Barat salah satunya berada pada wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Potensi pengembangan pada wilayah pulau kecil tersebut diantaranya untuk pemanfaatan budidaya maupun konservasi. Selain pemanfaatan untuk perikanan baik tangkap maupun budidaya, pemanfaatan pulau-pulau kecil juga sangat tepat untuk pengembangan wisata bahari. Potensi ekosistem pantai, laut, *mangrove* dan terumbu karang pada pulau tersebut dapat digunakan unutk menunjang aktivitas wisata bahari seperti berselancar, *snorkeling,* menyelam dan aktivitas lainnya. Beberapa pulau-pulau yang sudah dikelola untuk menunjang aktivtias wisata dan konservasi diantaranya Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Terdapat juga Kawasan Wisata Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Tabel 5. 1 Sebaran pulau kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
	Kabupaten	
1	Kep. Mentawai	98
2	Pesisir Selatan	47
3	Agam	2
4	Pasaman Barat	12
5	Padang Pariaman	1
	Kota	
1	Padang	19
2	Pariaman	3
	Provinsi Sumatera Barat (P. Bando, Sironjong, Bintangua)	**3**
	Jumlah	**185**

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Berdasarkan data, mayoritas pulau kecil tersebut terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (98 pulau) diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan 47 Pulau. Potensi wisata bahari utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah aktivitas untuk berselancar *(surfing)* dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Secara berkala terdapat *event* pariwisata yang dilaksakanan di lokasi ini seperti kejuaraan Dunia (World Champions Surfing Series).

5.3. Pewilayahan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pewilayahan terhadap destinasi pariwisata. Pewilayahan tersebut didasarkan atas; 1) kualitas destinasi di wilayah Kabupaten/Kota yang dikenal secara nasional dan internasional, 2) memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta *event* pariwisata yang berskala nasional dan internasional, 3) memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung, serta 4) memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah. Pewilayahan destinasi pariwisata tersebut dikelompokan dalam Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP). Pada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi (RPIPKP) Sumatera Barat Tahun 2014-2025 terdapat lima KUPP.

Tabel 5. 2 Pewilayahan pariwisatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan KUPP

No	Nama KUPP	Wilayahnya	Tema Pengembangan Parwisata
1.	Padang dan sekitarnya (KUPP I)	Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan	"*Marine adventure tourism*"

No	Nama KUPP	Wilayahnya	Tema Pengembangan Parwisata
2.	Bukittinggi dan sekitarnya (KUPP II)	Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Kabupaten 50 Kota	*"Geopark Tourism"*
3.	Tanah Datar dan Sekitarnya (KUPP III)	Kabupaten Tanah Datar Kota Solok Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota padangpanjang	*"Ancient Minangkabau Tourism"*
4.	Sawahlunto dan Sekitarnya (KUPP IV)	Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya	*"Colonial the Old Mining Town Tourism"*
5.	Kepulauan Mentawai (KUPP V)	Kepulauan Mentawai	*"Whitesand Tourism"*

Sumber : RIPKP Sumatera Barat 2014 - 2025

5.4. Daya Tarik Wisata Provinsi Sumatera Barat

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, pembahasan daerah tujuan wisata salah satunya akan fokus pada

pembahasan Daya Tarik Wisata (DTW). Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata alam Provinsi Sumatera Barat adalah ekosistem dan keanekaragaman pesona alam di wilayah perairan laut dan wilayah daratan; sementara daya tarik wisata budaya adalah cagar budaya, perkampungan tradisional, adat istiadat dan kesenian. Daya tarik wisata buatan diantarnaya mencakup fasilitas rekreasi, olahraga. Secara lebih rinci penjelasan mengenai Daya Tarik Wisata (DTW) yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

1. Daya Tarik Wisata Alam

   Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

   1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan, Pantai Aie Manih di Kota Padang, Pantai Gandoriah di Kota Pariaman dan sebagainya.

Sumber: https://bit.ly/3np1G8C
(a) Kawasan Pantai Carocok

Sumber: https://bit.ly/3np1G8C
(b) Kawasan Pantai Mandeh

Gambar 5. 2 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis wilayah perairan laut di Provinsi Sumatera Barat

2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
   a. pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/ taman hutan raya contoh: Taman Hutan Raya Bung Hatta, Kawasan Harau dan sebagainya.
   b. perairan sungai dan danau, contoh: Danau Singkarak, Danau Maninjau dan sebagainya.
   c. pertanian dan perkebunan, contoh: Agrowisata di Kotobaru, Kebun Teh di Alahan Panjang dan sebagainya.
   d. bentang alam khusus seperti Ngalau di Payakumbuh, Gua di Silokek, Kabupten Sijunjung dan sebagainya.

Sumber: Youtube Disparprov Sumbar

(a) Geopark Gua Batu Kapal

Sumber: Disparpov Sumbar

(b) Geopark Lembah Harau

(c) Danau Singkarak

(d) Danau Maninjau

Gambar 5. 3 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis daratan di Provinsi Sumatera Barat

2. Daya Tarik Wisata Budaya

Daya Tarik Wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa cagar budaya antara lain
   a. Cagar budaya, yang meliput, a) benda cagar budaya, b) bangunan cagar budaya, c) struktur cagar budaya d) situs cagar budaya dan e) kawasan cagar budaya
   b. Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Nagari Tuo Pariangan, Kampung Adat Nagari Sijunjung Koto Padang Ranah dan Tanah Bato dan sebagainya
   c. Museum, contoh: Museum Nagari, Museum Gempa dan sebagainya

2) Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
   a. Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/ tempat, contoh: basyafa, perayaan tabuik, dan pacu jawi sebagainya.
   b. Kesenian, contoh: randai, talempong, saluang, rabab, salawaik dulang, alu katentong dan sebagainya.

Sumber: Youtube Disparprov Sumbar
(a) Museum Kereta Api Kota Sawahlunto

Sumber: Disparpov Sumbar
(b) Jam Gadang Bukittinggi

Sumber: https://bit.ly/3zd7cxz
(c) Istana Pagaruyung

Sumber: https://bit.ly/2X7HI7O
(d) Tradisi Pacu Jawi

Gambar 5. 4 Beberapa daya tarik wisata alam berbasis budaya di Provinsi Sumatera Barat

3. Daya Tarik Wisata Buatan

Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1) Fasilitas rekreasi dan hiburan/ taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema

{*theme park*)/ taman hiburan (Taman kupu-kupu (*butterfly garden*), Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan)

2) Fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Stadion GOR H. Agus Salim, kawasan Padang Golf di Malibo Anai, dan area olahraga lainnya.

Sumber: https://bit.ly/3zd7cxz
(a) Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan

Sumber: https://bit.ly/2X7HI7O
(b) Anai Golf dan Mountain Resort

Gambar 5. 5 Beberapa daya tarik wisata alam buatan di Provinsi Sumatera Barat

5.5. Pengunjung Daya Tarik wisata di Provinsi Sumatera Barat

Wisatawan merupakan salah satu unsur utama yang penitng dalam menunjang aktivtias pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan wisatawan yang dilakukan akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian akibat pengeluaran yang dilakukan. Namun demikian, pengunjung juga mempunyai preferensi terhadap destinasi pariwisata yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi, geografis, informasi di media, sosial budaya, regulasi dan lainnya. Faktor-faktor tersebut akan menyebabkan adanya perubahan terhadap tren permintaan wisata. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020 perkembangan destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat cukup pesat terutama untuk daya

tarik wisata alam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan promosi pariwisata yang dilakukan cukup efektif dan menarik masyarakat untuk berwisata. Wisata alam menyajikan pemandangan yang menarik, aktivitas wisata yang beragam serta dokumentasi wisata yang *instragamable*.

5.5.1. Kunjungan Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara masih menjadi tumpuan utama untuk menunjang pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum selama lima tahun terakhir terjadi tren peningkatan dari kunjungan wisata ke Provinsi Sumatera Barat. Walupun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, namun berdasarkan data jumlah kunjungan yang tercatat masih cukup tinggi dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kondisi pandemi namun minat wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata di Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi. Pada kondisi pandemi wisata alam merupakan jenis wisata yang paling banyak diminati karena hal ini berkaitan dengan potensi resiko penyebaran covid-19 yang lebih rendah pada ruang terbuka (*outdoor*).

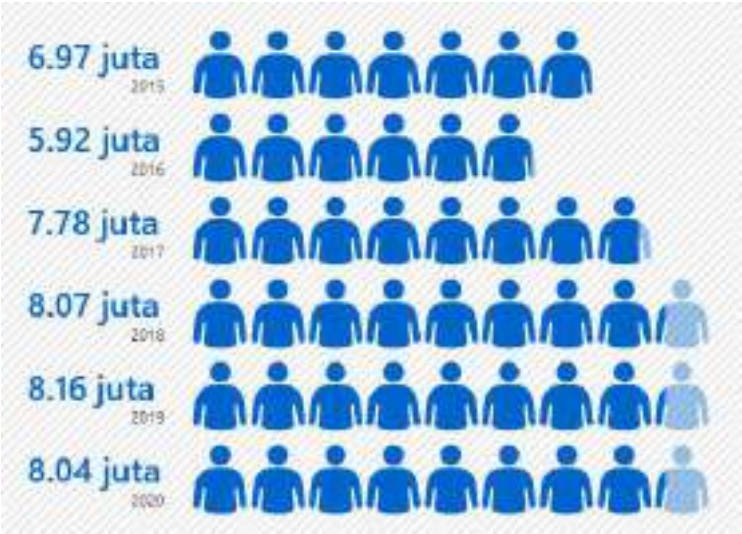

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021

Gambar 5. 6 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Barat tahun 2015-2020

Apabila ditelaah lebih dalam berdasarkan lokasi atau kabupaten/kota yang menjadi destinasi wisata maka ada beberapa perubahan tren kunjungan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Pada tahun 2018, Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi utama dengan jumlah kunjungan sekitar 2,3 juta kunjungan, sementara Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terendah pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi destinasi utama yang dikunjungi dengan jumlah kunjungan mencapai 994 ribu kunjungan, sementara jumlah kunjungan terendah pada tahun 2019 masih di Kabupaten Dharmasraya. Kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perubahan lokasi yang menjadi destinasi wisata utama, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yang cukup drastis, sementara Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan total

kunjungan pada tahun 2020 sebanyak 2,6 juta orang. Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi juga menjadi salah satu destinasi utama di tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 1,47 juta orang. Pembatasan mobilitas yang dilakukan selama kondisi pandemi menyebabkan orang berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mempertimbangkan lokasi wisata yang mudah diakses seperti Bukittinggi dan Padang.

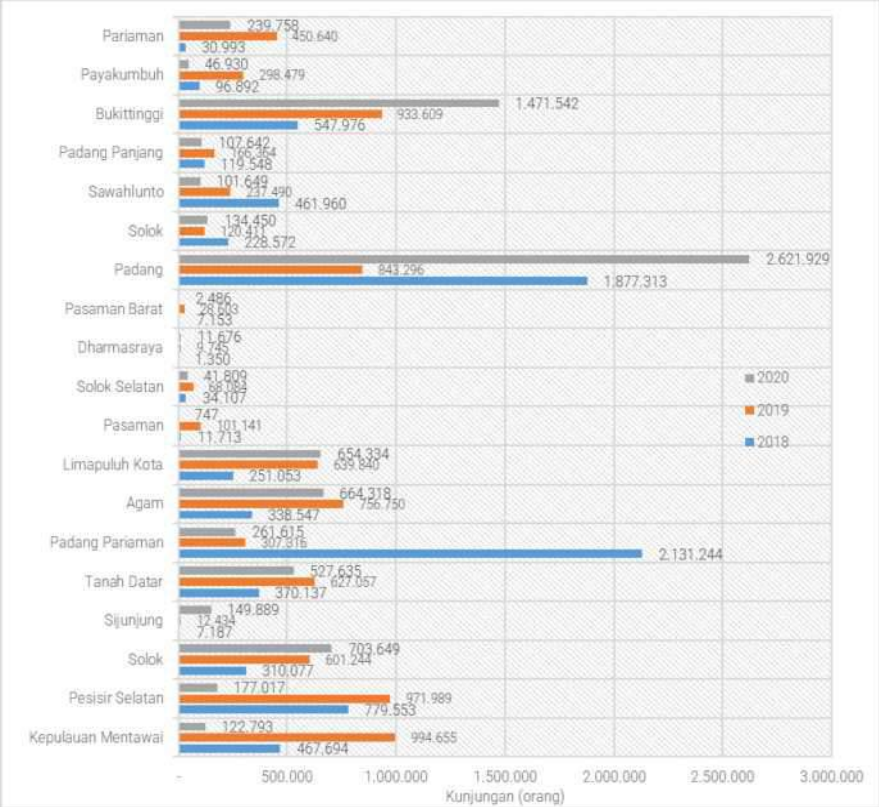

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021

Gambar 5. 7 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan Kabupaten/Kota ke Sumatera Barat

Berdasarkan suvei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik secara umum terdapat berbagai macam tujuan kunjungan dari wisatawan nusatara ke Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat mempunyai tujuan untuk berlibur dan mengunjungi keluarga/teman. Proporsi responden wisatawan yang berkunjung untuk tujuan berlibur lebih dari setengah atau sekitar 47,98% sementara 31,52% lainnya bertujuan untuk mengunjungi keluarga/kerabat serta teman. Tujuan wisata selanjutnya yang relatif cukup besar adalah mudik. Sekitar 11,28% tujuan utama wisatawan adalah mudik. Ketiga tujuan utama ini mendominasi kunjungan utama ke Sumatera Barat. Sisanya seperti mengikuti pendidikan/pelatihan, pertemuan/ kongres/ seminar ataupun bisnis dan olahraga tidak lebih dari satu persen kunjungan.

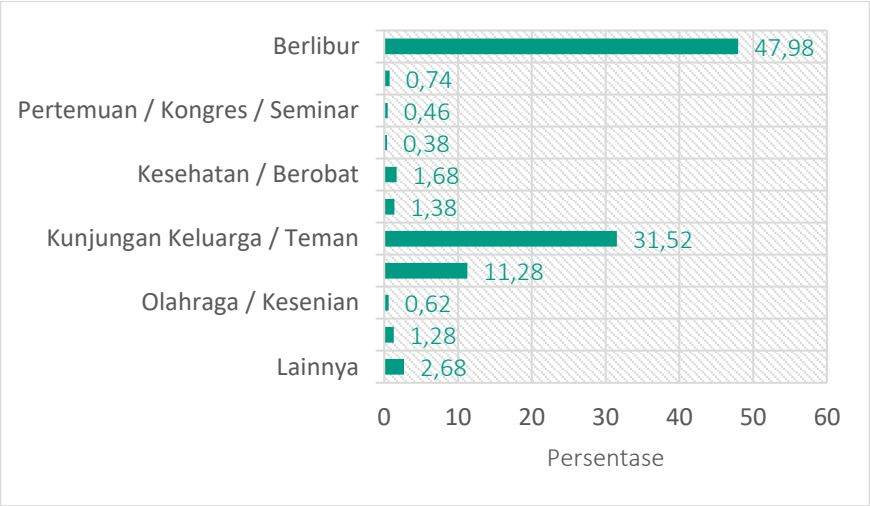

Sumber : Statistik Wisatawan Nusantara 2019, BPS

Gambar 5. 8 Persentase kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan tujuan utama kunjungan tahun 2019

5.5.2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Selain wisatawan nusantara, Sumatera Barat juga sudah menjadi destinasi pariwisata internasional karena sudah banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Selama tahun 2015-2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara cenderung mengalami peningkatan. Salah satu destinasi utama yang menjadi tujuan dari wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Keupalaun Mentawai. Selain itu juga terdapat *event* internasional seperti *tour de singkarak* yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Tidak hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai ada juga beberapa destinasi wisata lainnya yang menjadi tujuan kunjungan dari wisatawan asing seperti Bukittinggi dan Tanah Datar. Pada tahun 2020, ketika kondisi pandemi covid-19 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (82,2%). Jumlah kunjungan pada tahun 2020 hanya sebesar 10.875 jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembatasan perjalan khususnya untuk wisatawan asing diberlakukan baik oleh negara asal (*travel warning*) maupun pembatasan masuk oleh pemerintah Indonesia, oleh karena itu untuk pemulihan kunjungan wisatawan asing akan terjadi lebih lama daripada wisatawan nusantara.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021

Gambar 5. 9 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat Tahun 2015-2020

Berdasarkan asal negara, mayoritas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir berasal dari Malaysia (73,11%). Berikutnya ada Australia pada posisi kedua dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, untuk seluruh negara mengalami penurunan dengan rata-rata 80,97% dibandingkan tahun 2019. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing negara menerapkan kebijakan yang ketat untuk bepergian ke luar negeri sehingga wisatawan mancanegara banyak menunda perjalanan. Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha wisata *tour travel* dan beberapa pengelola wisata di destinasi favorit wisatawan mancanegara.

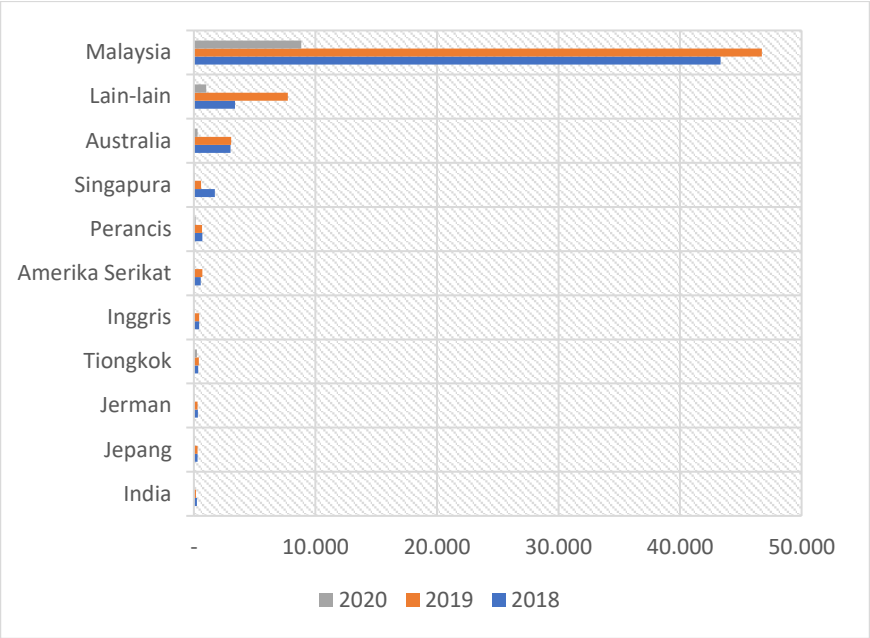

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021

Gambar 5. 10 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan asal negara ke Sumatera Barat Tahun 2015-2020

5.6. Pengeluaran Wisatawan di Provinsi Sumatera Barat

Pengeluaran wisatawan berperan penting dalam mendorong perputaran uang dan mendorong penciptaan dampak pengganda (*multiplier*). Pengeluaran wisatawan dapat memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung pada sektor perekonomian tertentu baik untuk pengelola usaha maupun tenaga kerja. Berdasaran data, rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara di Sumatera Barat mengalami peningkatan semenjak tahun 2010. Walaupun pada tahun 2013 dan 2014 sedikit mengalami penurunan, pengeluaran wisatawan nusantara secara konsisten terus mengalami peningkatan sampai

tahun 2018. Pertumbuhan pengeluaran wisatawan nusantara dalam tiga tahun terakhir sekitar 15,1%, bergerak dari Rp 477.850 pada tahun 2015 menjadi RP 728.670 pada tahun 2018.

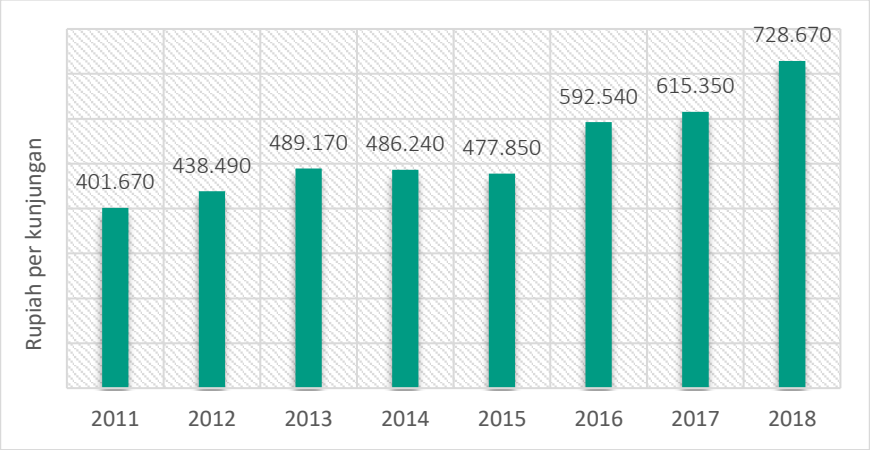

Keterangan : nilai tahun 2019 dan 2020 merupakan nilai estimasi
(Dikompilasi dari Statistik Profil Wisatawan Nusantara, Nesparnas, beberapa edisi, BPS)

Gambar 5. 11 Pengeluaran wisatawan nusantara di Sumatera Barat tahun 2011-2018 (Rupiah)

Selain untuk wisatawan nusantara, BPS juga melakukan survei untuk mengidentifikasi pengeluaran dari wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan mancanegara, pengeluaran per kunjungan ke Sumatera Barat pada tahun 2016 secara rata-rata mencapai US$ 1.267,34. Apabila dilihat lebih dalam berdasarkan asal negara, pengeluaran tertinggi berasal dari wisatawan mancanegara di kawasan Amerika Serikat yaitu sebesar US$ 2.366,5, kemudian diikuti oleh wisatawan mancanegara yang berasal Kawasan Oseania yaitu sebesar US$ 2.041,5. Wisatawan mancanegara yang berasal dari Kawasan Afrika, Eropa dan Timur Tengah, memiliki pengeluaran per kunjungan antara US$ 1.000-US$ 2.000. Sedangkan pengeluaran per

kunjungan dibawah US$ 1.000 pada umumnya berasal dari wisatawan kawasan Asean dan Asia. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara jumlah kunjungan wisatawan dari ASEAN mendominasi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat, namun untuk pengeluaran wisatanya masih terbatas. Grafik berikut memperlihatkan rata-rata pengeluaran wisawatan mancanegara per kunjungan di Sumatera Barat menurut kelompok negara pada tahun 2016.

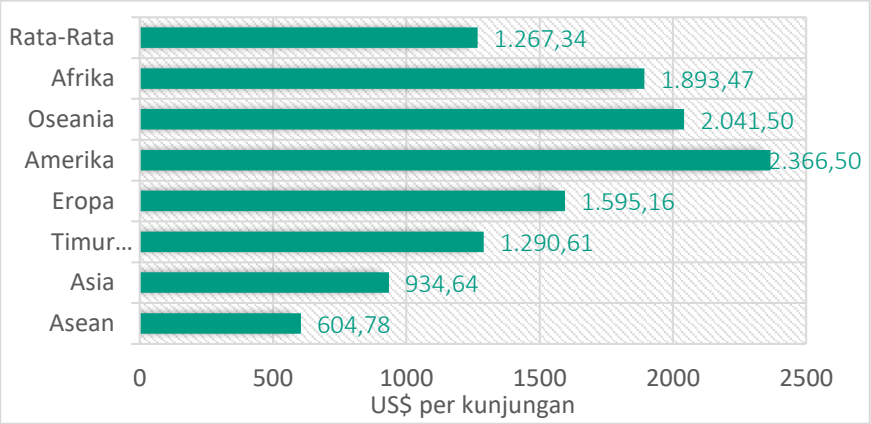

(Statistik Pariwisata Sumbar 2020, BPS)

Gambar 5. 12 Rata-rata pengeluaran wisawatan mancanegara per kunjungan di Sumatera Barat menurut kelompok negara pada tahun 2016 (US$)

5.7. Jumlah Hotel di Provinsi Sumatera Barat

Fasilitas akomodasi merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang aktivitas pariwisata. Keberadaan hotel dan penginapan yang memadai merupakan syarat utama dalam pengembangan dari destinasi pariwisata, keberadaan hotel yang memadai juga dapat meningkatkan waktu menginap dari wisatawan. Berdasarkan data, jumlah hotel berbintang di provinsi

Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 79 buah yang tersebar pada 7 wilayah kabupaten dan kotanya, sedangkan hotel non bintang sebanyak 786 unit, tersebar merata di 19 kabupaten dan kotanya. Sebaran Hotel berbintang dengan fasilitas kamarnya hanya terdapat pada Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, semua wilayah ini selama ini memang menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan asing, meskipun demikian untuk fasilitas hotel non bintang lebih tersebar merata disemua wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

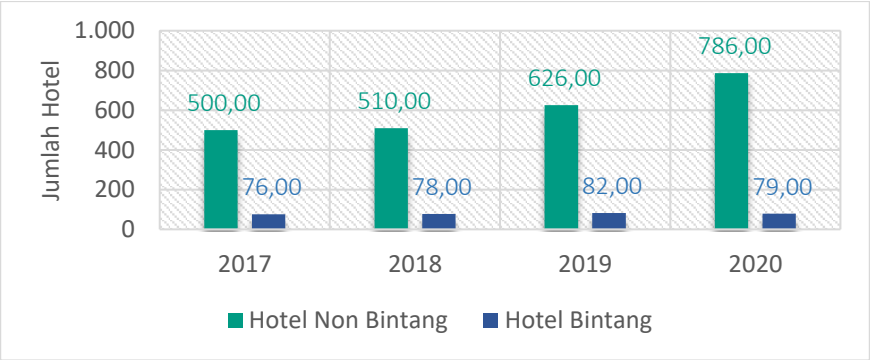

(Statistik Pariwisata Sumbar 2020, BPS)

Gambar 5. 13 Jumlah hotel bintang dan non bintang di Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2020 tingkat hunian hotel berbintang lebih tinggi di bandingkan dengan tingkat hunian hotel non bintang yakni sebesar 31,88% pada hotel berbintang dan 16,19% pada hotel non bintang. Tingkat hunian hotel berbintang ini menurun semenjak pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2019 lalu tingkat huniannya mencapai 55,10% untuk hotel bintang dan tingkat hunian hotel non bintang mencapai 30,55%.

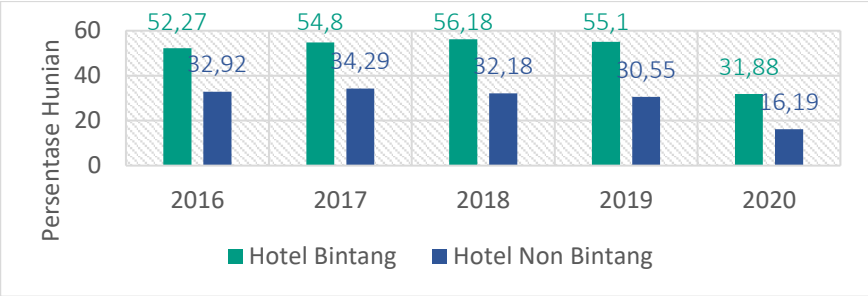

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 5. 14 Tingkat hunian hotel bintang dan non bintang di Provinsi Sumatera Barat

Secara umum walupun tingkat hunian hotel berbintang lebih tinggi daripada hoten non bintang, namun jumlah hotel untuk non bintang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan hotel bintang. Dari rata-rata waktu lama menginap tamu, data yang tersedia hanya pada hotel berbintang. Berdasarkan data tersebut rata-rata lama menginap tamu hotel di Provinsi Sumatera Barat berkisar antara 1,4 hari sampai 1,53 hari selama tahun 2016-2020. Rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel berbintang jumlahnya lebih lama dibandingkan dengan tamu domestil walaupun pada atahun 2020 rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel berbintang menurun cukup drastis.

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 5. 15 Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik di hotel berbintang di Sumatera Barat tahun 2016 - 2020

Upaya untuk meningkatkan hunian hotel pada masa pandemi covid-19 perlu terus dilakukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong dan memafasilitasi hotel baik bintang maupun non bintang agar bisa tersertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sertifikasi CHSE diharapkan dapat menambah keyakinan wisatawan atau tamu untuk menginap di hotel yang telah terjamin penerapan protokol kesehatannya.

5.8. Restoran dan Rumah Makan di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 5. 16 Jumlah rumah makan dan restoran di Sumatera Barat

Rumah makan dan restoran selama menjadi simbol yang melekat pada etnik masyarakat Minangkabau di wilayah perantau. Restoran dan rumah makan Padang telah menjadi *trade mark* sendiri bagi kenikmatan dan keafikan kuliner secara Nasional saat ini. Oleh sebab itu, ia telah menjadi salah satu faktor pemicu wisatawan nusantara untuk datang ke wilayah Sumatera Barat (Penelitian TDC Unand dan BI, 2020). Berdasarkan data BPS jumlah seluruh Restoran yang mampu melayani tamu wisatawan adalah sebanyak 1.594 unit yang tersebar pada wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terdapat 5 wilayah kabupaten dan kota yang memiliki jumlah rumah makan dan restoran yang dominan yakni, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Persoalan yang menarik dalam pembangunan rumah makan dan restoran di Sumatera Barat selama ini adalah masalah layanan higienitas dan fitur layanan yang terintegrasi dengan rumah makan dan restoran yang melayani wisatawan. Sering rumah makan dan restoran belum dilengkapi dengan sarana tambahan seperti tempat ibadah, dan parkir yang memadai, sehingga pada saat kunjungan puncak wisatawan, kendaraan tamu rumah makan dan

restoran sering tumpah ke jalan raya, sehingga menimbulkan kemacetan jalan raya.

Penataan rumah makan dan restoran untuk masalah higienitas, telah dilakukan dengan mewajibkan rumah makan dan restoran untuk melabeli usahanya dengan sertifikat halal, melalui Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal di provinsi Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong usaha rumah makan dan restoran untuk mengikuti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh DSN-BPOM MUI.

5.9. Perkembangan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2010 tentang kepariwisataan dijelaskan secara khusus tentang pengertian Usaha Pariwisata yaitu Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Salah satu usaha yang menunjang dalam aktivitas wisata adalah Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Sumber ; ASITA, 2020

Gambar 5. 17 Perkembangan jumlah biro perjalanan wisata di Sumatera Barat

Selama beberapa tahun terakhir kegiatan Biro Perjalanan Wisata di Sumatera Barat menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke Sumatera Barat. Namun pandemi yang melanda di tahun 2020 telah memberikan implikasi yang sangat besar dalam kegiatan perjalanan wisata yang tentunya berakibat

secara signifikan terhadap usaha Biro Perjalanan wisata berikut pertumbuhan jumlah Biro Perjalanan WIsata di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat penurunan sebanyak 35% biro perjalanan di Sumatera Barat. Penurunan ini berkaitan erat dengan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung terutama wisatawan asing. Selain itu untuk wisatawan domestik pola berwisata yang dilakukan pada tahun 2020 lebih bersifat individu atau grup kecil yang pelaksanaanya dikelola secara mandiri tanpa melalui biro perjalanan wisata.

Apabila dilihat lebih detail berdasarkan lokasi, biro wisata paling banyak berada di Kota Padang. Hal ini dapat dipahami karena Kota Padang merupakan pusat pemerintahan provinsi sekaligus menjadi gerbang masuk utama ketika wisatawan akan melakukan aktivitas wisata di Sumatera Barat, khususnya untuk wisatawan yang menggunakan transportasi pesawat dan atau pelabuhan Biro perjalanan wisata lainnya yang cukup banyak berada di Kota Bukittinggi, sementara untuk di Kabupaten/Kota lainnya jumlah biro perjalanan wisata relatif sangat terbatas. Berikut jumlah Biro Perjalanan Wisata per kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat per tahun 2019.

Sumber ; ASITA, 2020

Gambar 5. 18 Jumlah biro perjalanan wisata di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

5.10. Perkembangan Pramuwisata, Pokdarwis dan Desa Wisata

Pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari peran *stakeholder* wisata lainnya. Pemerintah tidak bisa hanya

berjuang sendiri dalam melakukan pembangunan kepariwisataan. Selain pelaku usaha di pariwisata, kelembagaan lokal yang ada di masing-masing destinasi punya peran penting dalam menunjang kegiatan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu pemerintah perlu terus membina hubungan kerjasama dengan para *stakeholder* dalam mendukung target pembangunan kepariwisataan. Beberapa *stakeholder* lainnya yang perlu diperhatikan diantaranya adalah Pramuwisata, Pokdarwis, Desa Wisata.

5.10.1. Perkembangan Pramuwisata di Provinsi Sumatera Barat

Pemandu wisata/Pramuwisata atau kerap disebut *tour guide* merupakan profesi di bidang pariwisata. Pemandu wisata bertanggung jawab mendampingi wisatawan dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada wisatawan. Tugas pramuwisata telah diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pariwisata. Pada peraturan tersebut standar usaha jasa pramuwisata mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Khusus untuk aspek produk bagi pemandu wisata unsur yang perlu dilakukan adalah;

1. Memberikan jasa penyediaan dan/atau pengorganisasian tenaga pemandu wisata, dengan lingkup/area kerja antara lain: a. pemandu wisata lokal; b. pemandu wisata kota; dan/atau c. pemandu wisata lintas provinsi.
2. Memberikan jasa kepemanduan wisata kepada wisatawan di dalam negeri, dengan menggunakan media komunikasi antara lain: a. bahasa Indonesia; dan/atau b. 1 (satu) bahasa asing.
3. Menyediakan jasa kepemanduan, dengan lingkup pengetahuan/kompetensi: a. sejarah; b. seni budaya; dan/ atau c. minat khusus.

Dapat disimpulkan bahwa tugas yang diemban pramuwisata mencakup sebagai '*frontliner*' yang sekaligus berfungsi sebagai '*information agent*' terkait dengan informasi wisata di Provinsi Sumatera Barat.

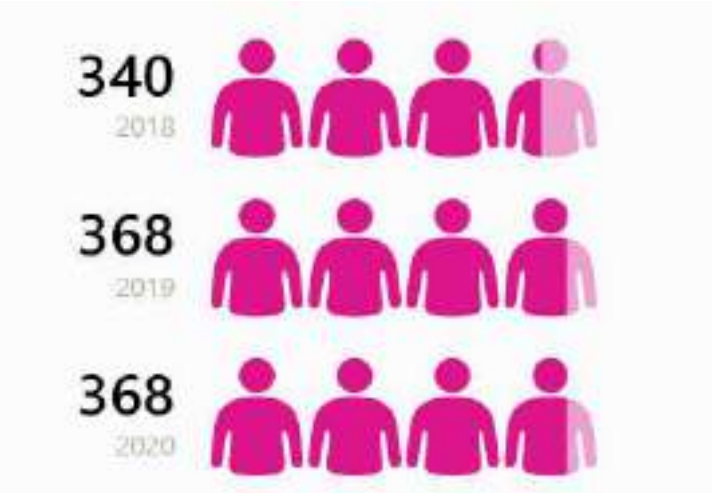

Sumber : PHI Sumbar 2020

Gambar 5. 19 Pertumbuhan jumlah pramuwisata di Sumatera Barat

Keberadaan pramuwisata di Sumatera Barat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun yang menarik pada kondisi pandemi covid-19 jumlah pramuwisata yang terdaftar jumlahnya masih sama dengan tahun 2019. Hal ini karena data yang dipakai adalah data pramuwisata yang terdaftar pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 artinya tidak ada data penambahan untuk pramuwisata. Apabila dilihat dari masing-masing Kabuapten/Kota, sebaran pramuwisata terbanyak berada di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain berdasarkan lokasi terdapat juga pramuwisata untuk kategori wisata minat khusus.

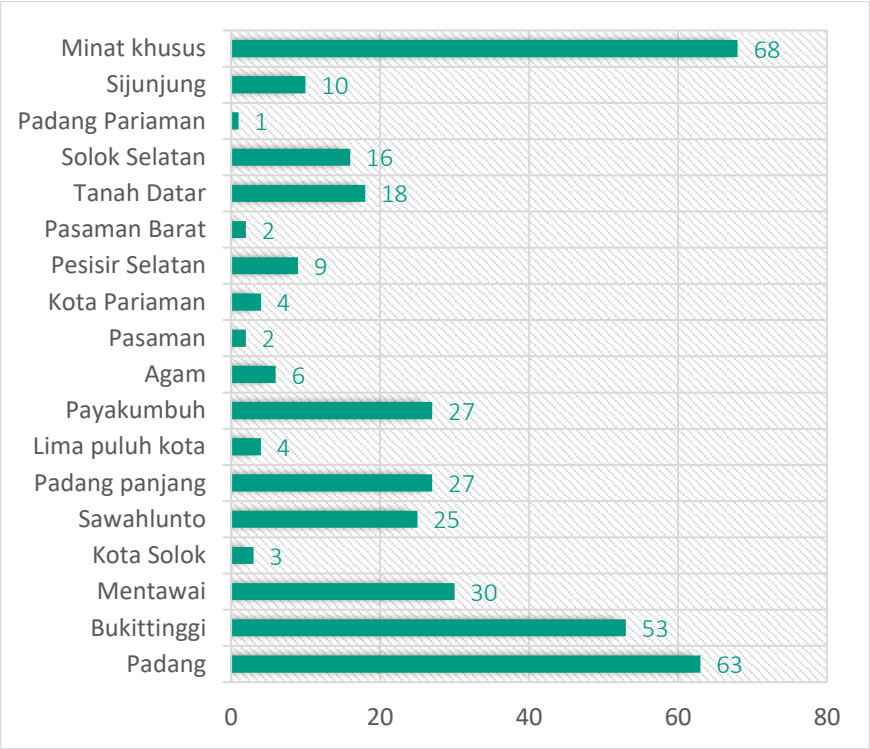

Sumber ; Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 5. 20 Profil jumlah pramuwisata per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

5.10.2. Perkembangan Pokdarwis di Provinsi Sumatera Barat

Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis diatas adalah organisasi

masyarakat yang disebut Kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata). Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat
2. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi pembangunan kepariwisataan.
4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan masyarakat/anggota Pokdarwis.

Kelompok sadar wisata berisi pelaku wisata, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sehingga mereka lebih mudah mengelola objek wisata karena mereka sudah bekerja dalam satu organisasi. Perkembanagan pokdarwis di beberapa daerah terlihat cukup signifikan dalam hal jumlah dan kualitas. Fungsi mereka semakin kuat dalam mengelola suatu destinasi agar dapat menjadi destinasi unggulan yang menarik dan unik. Berikut perkembangan jumlah pokdarwis di Sumatera Barat tiga tahun terakhir yang jumlah nya terus meningkat seiring maraknya pertumbuhan wisata di masing-masing daerah.

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 5. 21 Jumlah pokdarwis di Sumatera Barat

Dari gambar diatas terlihat peningkatan jumlah pokdarwis di Sumatera Barat tiga tahun terakhir. Walaupun pandemi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisata ke Sumatera Barat namun keberadaan Pokdarwis tetap menjadi pilar utama dalam mengelola destinasi secara profesional untuk lebih detailnya berikut profil jumlah pokdarwis di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat.

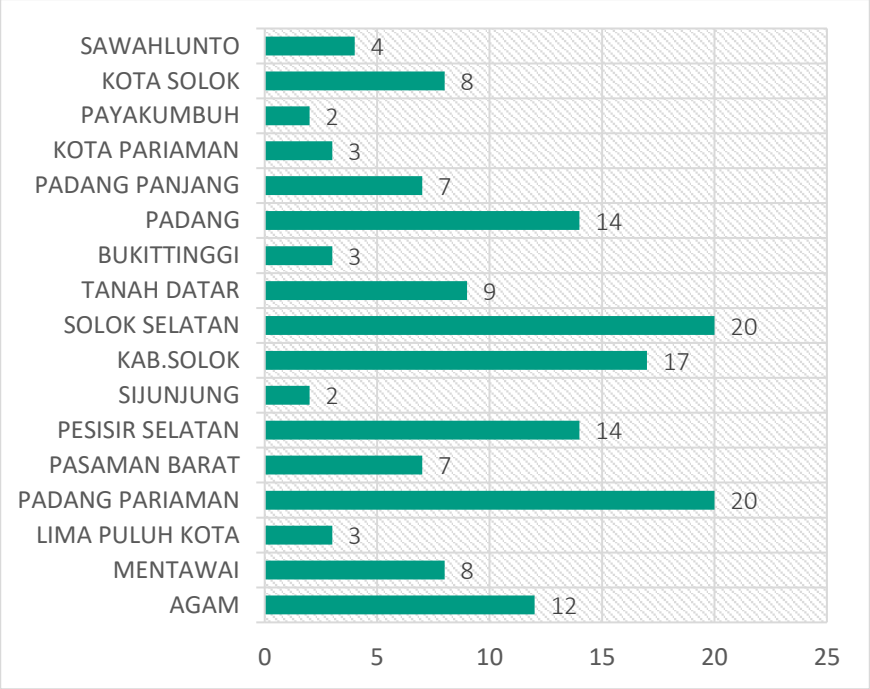

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 5. 22 Profil jumlah pokdarwis per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

5.10.3. Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Sumatera Barat

Desa wisata adalah wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan dan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman

keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di desa dengan segala potensinya. Kriteria dari sebuah desa wisata adalah sebagai berikut:

1. Memiliki potensi daya tarik wisata (alam, budaya, buatan, karya kreatif)
2. memiliki komunitas masyarakat
3. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata
4. memiliki kelembagaan pengelolaan
5. memiliki peluang dan dukungan kesediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata
6. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisata.

Banyaknya desa wisata pada satu dasawarsa terakhir menjadi potensi besar dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Keberadaan desa wisata yang mampu menjaga kuat kearifan lokal, lingkungan, dan memberdayakan ekonomi warga membuat desa wisata makin layak diperhitungkan dalam menunjang pembangunan pariwisata. Berikut perkembangan jumlah desa wisata 3 tahun terakhir di Sumatera Barat:

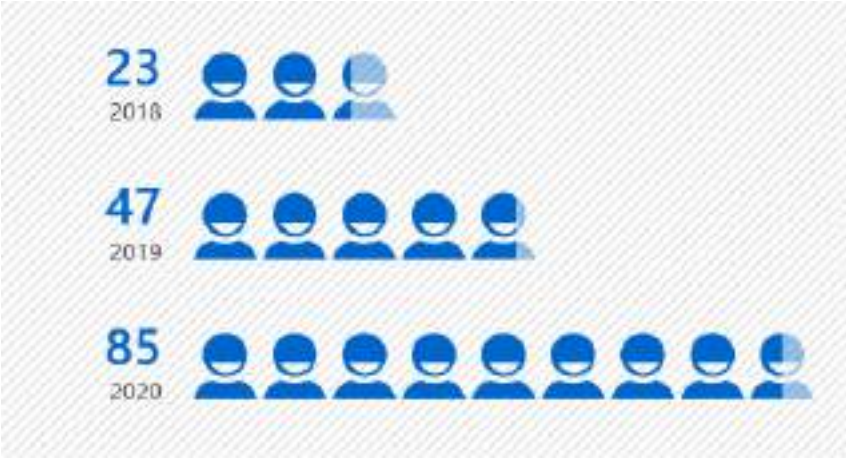

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 5. 23 Jumlah desa wisata di Sumatera Barat

Berdasarkan sebarannya, Desa Wisata paling banyak berada di Kabuapten Sijunjung serta di beberapa lain yang mempunyai keunikan atau kekhasan baik dalam bentuk daya tarik wisata budaya maupun wisata alam.

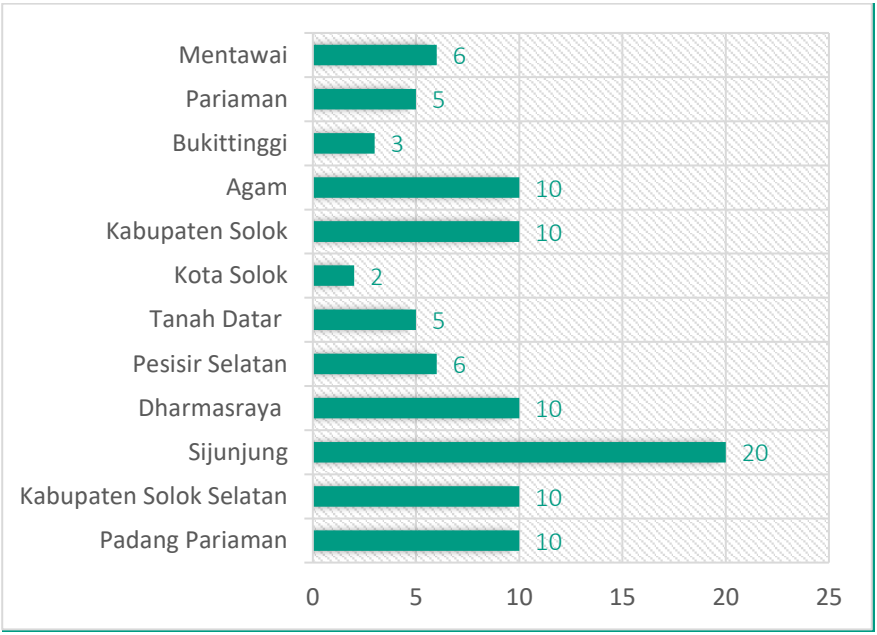

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 5. 24 Profil jumlah desa wisata per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

BAB 6
STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN DAN INVESTASI PARIWISATA

Istana Basa Pagaruyung | Kab. Tanah Datar

6.1. Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha

Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan beberapa aspek lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB adalah melalui pendekatan produksi yang melihat jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Tabel 6. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah) tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Angkutan Rel	24,12	26,01	28,16	29,81	21,89
2	Angkutan Darat	13.105,32	14.031,49	14.943,25	16.302,64	14.546,75
3	Angkutan Laut	563,87	566,66	577,74	501,01	506,09
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	377,62	410,28	435,51	446,71	287,70
5	Angkutan Udara	2.030,27	2.215,74	2.365,21	1.947,72	716,91
6	Penyediaan Akomodasi	377,61	399,86	432,74	467,09	304,05
7	Penyediaan Makan Minum	1.179,49	1.293,63	1.400,13	1.514,47	1.361,46
8	Jasa lainnya	2.476,54	2.673,39	2.883,40	3.099,51	2.786,31
9	Total Pariwisata	20.134,85	21.617,06	23.066,14	24.308,96	20.531,17
10	PDRB/GDRB	148.134,24	155.984,36	163.996,19	172.213,79	169.458,11

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021
*Notes : * Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Dari 17 lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB, Pariwisata tidak menjadi suatu lapangan usaha khusus melainkan gabungan dari beberapa lapangan usaha. Mengacu kepada publikasi *tourism satellite account (TSA)* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statstitik, jenis produk wisata merupakan akumulasi dari; 1) jasa akomodasi, 2) jasa makanan dan minuman, 3) jasa angkutan darat rel untuk penumpang, 4) jasa angkutan air untuk penumpang, 5) jasa angkutan udara untuk penumpang, 6) jasa pariwisata lainnya.

Berdasarkan data pada Tabel 6.1, nilai PDRB terbesar untuk sektor pariwisata berasal dari sub lapangan usaha angkutan darat. Sementara untuk nilai PDRB terkecil berasal dari sub lapangan usaha angkutan rel. Angkutan darat memang menjadi alternatif utama untuk menuju Sumatera Barat terutama bagi wisatawan dari daerah tetangga seperti Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Apabila dilihat berdasarkan pertumbuhan, maka sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan (kontraksi) sebesar 15,54% dibandingkan tahun 2019. Kondisi pandemi menyebabkan adanya penurunan dalam mobilitas penduduk sehingga berdampak cukup besar terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

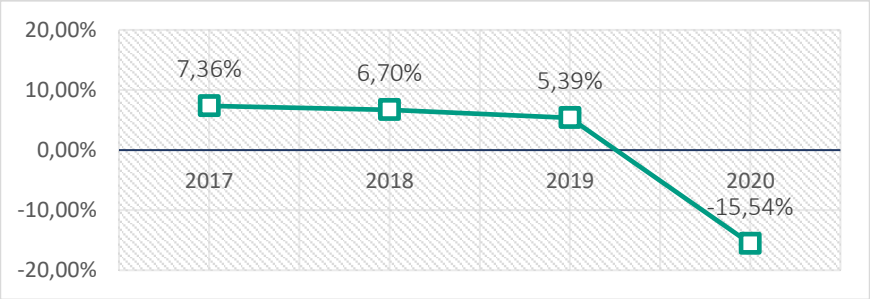

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021 (diolah)

Gambar 6. 1 Pertumbuhan sektor pariwisata pada PRDB Sumatera Barat 2017-2020

Selama periode 2017-2018 sub lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif walupun trennya menurun, bahkan pada beberapa lapangan usaha seperti angkutan udara dan angkutan laut tumbuh negatif pada tahun 2019. Pada tahun 2020 hampir semua sub lapangan usaha mengalami kontraksi,, dimana sub lapangan usaha yang memiliki kontraksi paling besar pada tahun 2020 adalah angkutan udara (-63,19%).

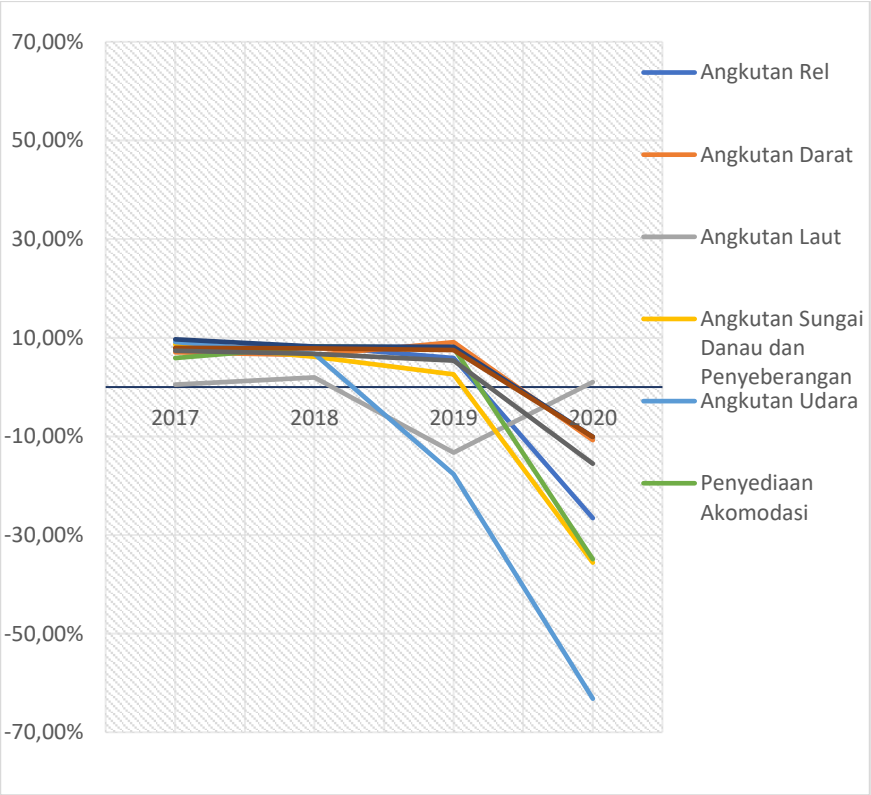

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021 (diolah)

Gambar 6. 2 Pertumbuhan sub lapangan usaha pada sektor pariwisata Sumatera Barat 2017-2020

Aktivitas penciptaan nilai tambah pada berbagai lapangan usaha di sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh permintaan dari sisi wisatawan. Permintaan terhadap produk wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bersifat "*amalgam",* artinya permintaan wisata tersebut merupakan gabungan dari berbagai fasilitas yang diperlukan dari mulai keberangkatan dari lokasi tempat tinggal, di lokasi wisata sampai dengan pulang kembali. Gambaran aktivitas ini menunjukkan bahwa wisatawan akan mengeluarkan Biaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan selama perjalanan wisatanya. Pengeluaran wisatawan tersebut akan dialokasikan ke berbagai lapangan usaha dari mulai jasa angkutan, akomodasi, makan dan minum serta jasa pariwisata lainnya.

6.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Wisatawan Nusantara dalam Nesparda Sumatera Barat Tahun 2019 ini adalah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Informasi mengenai struktur pengeluaran wisatawan diperolah dari hasil survei tahun 2021 kepada *post traveler*, yaitu wisatawan nusantara yang pernah berwisata ke Sumatera Barat tahun 2019. Wisatawan nusantara dalam kajian Nesparda Sumatera Barat Tahun 2019 ini terdiri dari wisatawan lokal di Sumatera Barat sendiri dan wisatawan luar Sumatera Barat.

Hasil survei menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara yang berkunjung ke Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp 1,06 juta per wisatawan. Lebih lanjut jika dirinci, rata-rata pengeluaran wisatawan lokal sebesar Rp 836 ribu per wisatawan lebih rendah dibanding rata-rata pengeluaran wisatawan luar Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 1,59 juta per wisatawan. Proporsi jumlah wisatawan lokal lebih besar dibanding jumlah wisatawan yang berasal dari luar Sumatera Barat, khususnya Jambi dan Riau.

Tabel 6. 2 Struktur pengeluaran wisatawan lokal dan luar Sumatera Barat Tahun 2019

No	Komponen Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Lokal (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Luar Sumbar (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp)
1	Akomodasi	124.491	225.454	154.780
2	Makan Minum	209.000	222.225	212.967
3	Transportasi	220.370	333.150	254.204
4	Sewa Kendaraan	71.296	209.411	112.731
5	Tiket Masuk+Parkir	19.598	35.019	24.224
6	Paket Perjalanan	3.472	8.614	5.015
7	Belanja Cinderamata	79.398	387.728	171.897
8	Kesehatan dan Kecantikan	16.389	29.483	20.317
9	Lainnya	91.991	135.936	105.174
Total		836.006	1.587.020	1.061.310

Sumber: Hasil Survei Post Traveler 2021

Komposisi pengeluaran wisatawan nusantara paling besar adalah untuk pengeluaran transportasi dan makan minum yaitu masing-masing sekitar 24,0% dan 20,1%. Komposisi paling kecil adalah untuk belanja paket perjalanan yaitu sekitar 0,5%. Wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar wilayah Sumatera Barat sebagian besar tidak menggunakan jasa agen perjalanan karena mereka merupakan warga lokal atau warga Sumatera Barat yang merantau sehingga mengetahui kondisi lokasi destinasi wisata yang dikunjungi.

Destinasi wisata yang menjadi favorit untuk dikunjungi sebagian besar berada di Kota Buktitinggi seperti destinasi Jam Gadang, Ngarai Sianok dan Kebun Binatang. Selanjutnya adalah destinasi Kawasan Mandeh yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan. Destinasi wisata lainnya yang menjadi pilihan para

pengunjung wisatawan nusantara adalah lembah harau, istana pagaruyung, kepulaauan Mentawai, pantai air manis, dan lainnya.

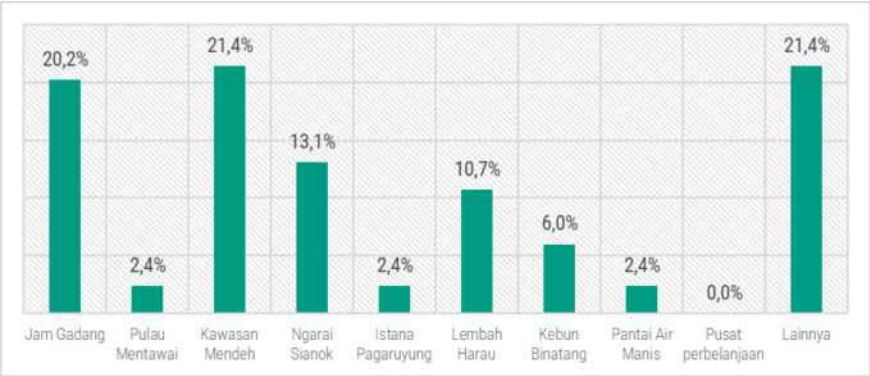

Sumber: Hasil Survei Post Traveler 2021

Gambar 6. 3 Destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan nusantara tahun 2019

6.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara merupakan wisatawan potensial yang banyak berkunjungan ke Sumatera Barat. Wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Sumatera Barat didominasi oleh wisatawan dari Malaysia. Struktur pengeluaran wisatawan mancanegara berdasarkan hasil survey post traveler yaitu rata-rata sebesar Rp 8,41 juta per wisatawan untuk sekali kunjungan. Proporsi pengeluaran terbesar wisatawan mancanegara adalah untuk pengeluaran makan dan minum (25.3%), transportasi pesawat (17.1%), paket perjalanan (14.3%), sewa kendaraan (12.6%), belanja cinderamata dan akomodasi (10,7%).

Tabel 6. 3 Struktur pengeluaran wisatawan mancanegara tahun 2019

No	Komponen Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Rp)	Proporsi Pengeluaran (%)
1	Akomodasi	903.571	10,7
2	Makan Minum	2.127.381	25,3
3	Transportasi	1.437.500	17,1
4	Sewa Kendaraan	1.063.095	12,6
5	Tiket Masuk+Parkir	27.500	0,3
6	Paket Perjalanan	1.200.000	14,3
7	Belanja Cinderamata	901.429	10,7
8	Seminar/Pertemuan	350.000	4,2
9	Lainnya	395.000	4,7
	Total	8.405.476	100,0%

Sumber: Hasil Survei Post Traveler 2021

6.4. Struktur Pengeluaran Untuk Investasi

Semakin majunya perkembangan teknologi digital dalam negeri, tentunya memiliki pengaruh yang cukup kuat juga pada sektor pariwisata. Tourism 4.0 merupakan salah satu gagasan yang diusung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menargetnya di tahun 2019 jumlah wisatawan milenial mencapai 50% (Kementerian Pariwisata, 2019). Upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah teknologi digital, misalnya dengan promosi melalui media sosial hingga website khusus yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai review perjalanan wisata setelah liburan usai.

Dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata dengan berbasiskan digitalisasi tentunya diperlukan modal/ investasi yang memadai. Dimana, investasi merupakan modal utama dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Investasi sebagai modal

pembangunan berasal dari investasi domestik maupun investasi asing. Secara keseluruhan, realisasi invetasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke 2017 (Tabel 6.4). Dimana pada tahun 2016 nilai investasi sebesar Rp 4.854,55 miliar sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 4.018,93 Miliar. Namun, setelah itu hingga 2020 total nilai investasi di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp4.713,85 miliar (walaupun nilai ini masih belum menyamai nilai di tahun 2016 lalu).

Sebagai salah satu penyokong sektor pariwisata, tentunya investasi pada sektor hotel dan restoran perlu untuk terus ditingkatkan. Jika dilihat nilai investasi pada tahun 2014-2020 memiliki tren yang terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 120% per tahunnya. Walaupun pada tahun 2020, nilai investasi sektor hotel dan restoran juga mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid 19, namun sektor ini tetap yang termasuk tinggi nilai investasinya.

Tabel 6. 4 Perkembangan realisasi investasi berdasarkan sektor di Sumatera Barat tahun 2014-2020

Sektor	Investasi (PMA+PMDN) (Rp Juta)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	338.014	146.684	248.771	296.465	902.071	1.122.751	914.281
Kehutanan	-	-	-	295	251	9.039	7.949
Perikanan	-	-	-	-	-	-	970
Pertambangan	729.809	641.511	218.489	2.256.632	696.609	1.163.063	268.080
Industri Makanan	261.680	406.331	1.395.359	298.717	622.989	537.449	1.347.035
Industri Tekstil	-	-	-	-	-	332	1.200
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	29	72

Sektor	Investasi (PMA+PMDN) (Rp Juta)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Kayu	1.919	6.119	7.733	4.164	14.466	8.622	6.893
Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-	-	-
Industri Kimia Dan Farmasi	48.195	32.055	6.511	13.411	310.594	7.661	190.207
Industri Karet dan Plastik	-	-	-	4.636	-	67.177	24.548
Industri Mineral Non Logam	195.269	878.186	2.749.252	647.380	222.527	508.892	9.457
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	51.500	23.000	163.766	-	-
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-	-
Industri Lainnya	44	-	-	-	-	92.751	-
Listrik, Gas dan Air	17.001	58.777	91.381	281.862	1.004.888	600.146	330.566
Konstruksi	452	13.875	25.254	14.096	39.185	240.076	1.227.439
Perdagangan dan Reparasi	1.333	19.073	22.707	76.349	31.159	107.098	46.294
Hotel dan Restoran	19.358	9.199	37.598	101.921	395.904	580.583	338.853
Total Sumatera Barat	1.613.075	2.211.810	4.854.555	4.018.928	4.404.408	5.045.671	4.713.845

Sumber: BKPM 2021

6.5. Total Pengeluaran dan Investasi Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Pengeluaran lain terkait pariwisata adalah pengeluaran yang yang dilakukan oleh pemerintah. Komponen tersebut mencakup pengeluaran promosi, pembinaan serta pengeluaran lainnya yang bersifat non investasi atau modal. Pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran promosi, periklanan pada kegiatan

yang terkait dengan pariwisata seperti *event* tertentu, kegiatan perhotelan, restoran, industri pengolahan dan pertanian yang terkait dengan pariwisata, serta sektor jasa yang terkait dengan pariwisata. Secara garis besar pengeluaran ini akan tergambar dalam belanja barang dalam pengeluaran rutin pemerintah. Termasuk pula balas jasa dalam rangka pembinaan pegawai pemerintah yang bergerak di sektor pariwisata yang tercermin dari belanja pegawai dari anggaran rutin pemerintah. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan pengeluaran lainnya terkait pariwisata oleh pemerintah berasal dari pengeluaran rutin APBD untuk pemerintah pusat di Kementerian Keuangan, serta pengeluaran rutin APBD seluruh kabupaten/kota. Disamping itu, juga dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat provinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota, serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang mencakup pengeluaran rutin dari pemerintahan desa yang berasal dari BPS.

Pengeluaran pemerintah (*current expenditure*) dalam promosi dan pembinaan pariwisata adalah cerminan dari pelaksanaan sebagian besar anggaran rutin yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota, yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya. Berdasarkan data realiasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Sumater Barat, estimasi perkembangan nilai konsumsi pemerintah se Sumatera Barat untuk pariwisata dapat dilihat pada Gambar 6.4.

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat

pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa trend investasi menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.

Dari studi empiris yang dilakukan di berbagai negara hampir dipastikan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh pola dan struktur investasinya, bahkan juga sumber investasi tersebut apakah dari dana domestik atau dari luar negeri. Investasi dapat terbentuk karena terjadinya surplus usaha yang pada gilirannya kan membentuk tabungan yang merupakan sumber dana utama investasi.

Sumber : DJPK, Restra dan Lakip Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat, 2021 (diolah)

Gambar 6. 4 Perkembangan nilai konsumsi pemerintah Sumatera Barat untuk pariwisata

Secara konsep investasi dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu "investasi finansial" dan "investasi non-finansial". Investasi finansial lebih dititik beratkan pada investasi dalam bentuk kepemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, emas, tabungan, deposito, saham dan sejenisnya. Sedangkan investasi fisik lebih menekankan pada realisasi berbagai jenis investasi fisik

seperti bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan investasi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata disini adalah investasi fisik saja

Secara definitif yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektorsektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku investasi tersebut adalah produsen penghasil produk barang dan jasa, baik pemerintah, BUMN/BUMD maupun pihak swasta (termasuk rumah tangga). Investasi fisik tersebut berupa pembuatan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (hotel, kantor, tempat hiburan dan sebagainya), pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, kendaraan dan barang modal lainnya, termasuk juga perbaikan besar yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas barang modal atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Barat. Investasi tersebut direalisasikan dalam bentuk berbagai jenis barang modal, diberbagai kegiatan ekonomi dan yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Sebagai data pembanding digunakan data investasi yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam bentuk persetujuan investasi berdasarkan fasilitas yang diberikan yang dibedakan menurut asal modal perusahaan, yaitu PMA dan PMDN. Perkembangan nilai Investasi Sektor Pariwisata di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 6.5 berikut:

Sumber : BKPM dan BPS, 2021 (diolah)

Gambar 6. 5 Perkembangan nilai dan proporsi investasi sektor pariwisata di Sumatera Barat

6.6. Proyeksi Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat di tahun 2021-2024 dapat telihat pada **Gambar 6.6**, di bawah ini. Proyeksi ini dilakukan dengan analisis *tren* dan beberapa *judgement* penyesuaian kondisi covid-19 yang memengaruhi kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 2.002 orang. Jumlah ini diperoleh dengan asumsi bahwa hingga Oktober 2021 PPKM masih diberlakukan dan pelarangan dari negara-negara lain bagi masyarakatnya yang akan berkunjung ke Indonesia. Asumsi tambahan yang digunakan yaitu pada bulan November-Desember 2021 kondisi covid-19 sudah mulai terkendali dan pelarangan perjalanan sudah mulai dilonggarkan, sehingga arus wisatawan mancanegara sudah mulai kembali masuk ke Sumatera Barat. Hal ini terbukti bahwa di bulan Oktober akhir 2021 Indonesia menjadi

salah satu negara dengan risiko penularan covid-19 yang relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Selanjutnya, dengan semakin banyaknya warga negara di Indonesia serta seluruh dunia yang melakukan vaksin, maka semakin terkendali juga penularan covid-19. Hal ini membuka peluang mulai masuknya wisatawan asing yang datang untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Pada tahun 2022, diproyeksikan jumlah wisatawan mancanegara semakin meningkat dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 2.121 orang. Hingga tahun 2024, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat sebanyak 2.585 orang. Walaupun secara jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumatera Barat belum sebanyak kondisi sebelum pandemi, namun hingga tahun 2024 kondisi pariwisata akan semakin membaik dan semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung kembali ke Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil survei lapang, wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat kebanyakan merupakan wisatawan yang sudah transit terlebih dahulu dari beberapa kota destinasi wisata lainnya di Indonesia. Misalnya saja, wisatawan mancanegara yang telah berkunjung terlebih dahulu ke Medan, Bali, Jakarta, dan wilayah destinasi wisata maupun bisnis lainnya. Kondisi pandemi covid-19 tentunya berdampak pada kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara yang melakukan *lockdown* negara dan pelarangan kunjungan ke negara-negara dengan potensi penularan yang tinggi.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah melalui kebijakan *travel corridor arrangement/ bubble travel* yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini memperbolehkan wisatawan asing untuk dapat berpergian keluar/masuk ke Indonesia melalui kesepakatan antar negara. Tidak hanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif saja yang mendukung program pemulihan wisata, namun didukung juga oleh Kementerian Luar Negeri yang juga turut memberikan panduan untuk kesepakatan dua negara yang dilihat dari level vaksinasi, level terinveksi covid-19, kesiapan protokol yang dilakukan dalam rangka kebijakan ini, serta *tracing* dengan aplikasi dan asuransi untuk menjamin kondisi kesehatan wisatawan.

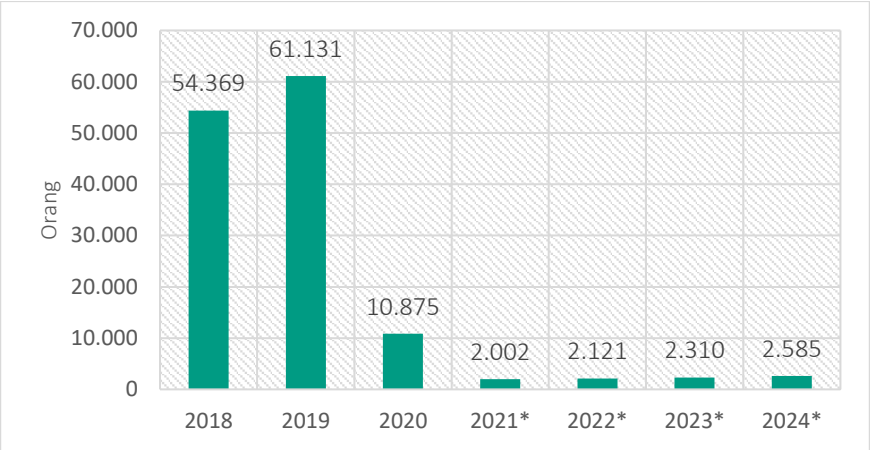

*Keterangan : *) Angka proyeksi*
Sumber : Data BPS, 2021 (diolah)

Gambar 6. 6 Proyeksi jumlah wisatawan mancanegara Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 (Orang)

Pandemi covid-19 juga tetap berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya berdampak pada jumlah wisatawan nusantara di tahun 2021. Pada tahun 2020, yaitu saat awal pandemi covid-19 merebak di Indonesia, jumlah wisatawan domestik menurun walau tidak signifikan penurunannya. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 8.128.389 orang. Pada tahun 2021, masyakarat sudah berada pada fase

tahun kedua adanya pandemi covid-19, sehingga mereka sudah lebih *aware* akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Hingga tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara diproyeksikan akan terus meningkat, hingga mencapai 9.519.417 orang.

Peningkatan jumlah wisatawan nusantara di masa pandemi covid-19 ini selain disebabkan program vaksin dari pemerintah yang sudah hampir merata membuat masyarakat domestik yakin untuk mulai kembali melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi prokes. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan vaksin, diharapkan *herd immunity* akan terbentuk sehingga masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas di luar rumah. Secara rinci, proyeksi jumlah wisatawan nusantara di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 6. 7

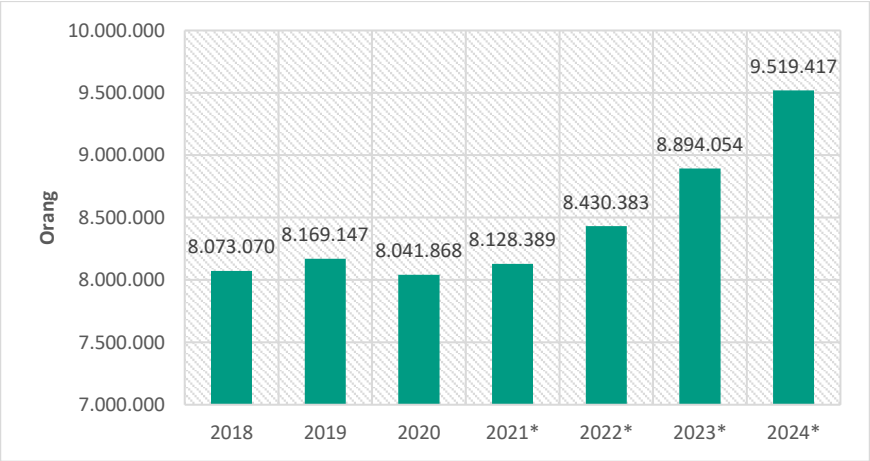

*Keterangan : *) Angka proyeksi*
Sumber : Data BPS, 2021 (diolah)

Gambar 6. 7 Proyeksi jumlah wisatawan nusantara Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2024 (Orang)

Berdasarkan hasil lapang, beberapa alasan wisatawan domestik sudah meningkat di tahun 2021 karena pandemi dirasa sudah membaik, kebanyakan wisatawan yang datang ke Sumatera Barat berasal dari Pulau Sumatera juga (misalnya Pekanbaru, Medan, dan beberapa wilayah di Sumatera lainnya). Wisatawan dari wilayah lain di luar Sumatera Barat menyatakan bahwa mereka tidak perlu naik pesawat serta melakukan swab antigen/PCR untuk berwisata ke Sumatera Barat dan bisa ditempuh dengan jalur darat.

Hasil survei lapang juga menunjukkan bahwa responden *post traveler* untuk wisatawan nusantara sebagian besar melakukan kunjungan kembali ke Sumatera Barat untuk berwisata selama masa pandemi sekitar 64%, sisanya 36% belum melakukan kunjungan kembali akibat dampak pandemi covid-19. Kondisi ini menunjukan terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat untuk wisatawan nusantara di masa pandemi dibanding periode sebelum pandemi.

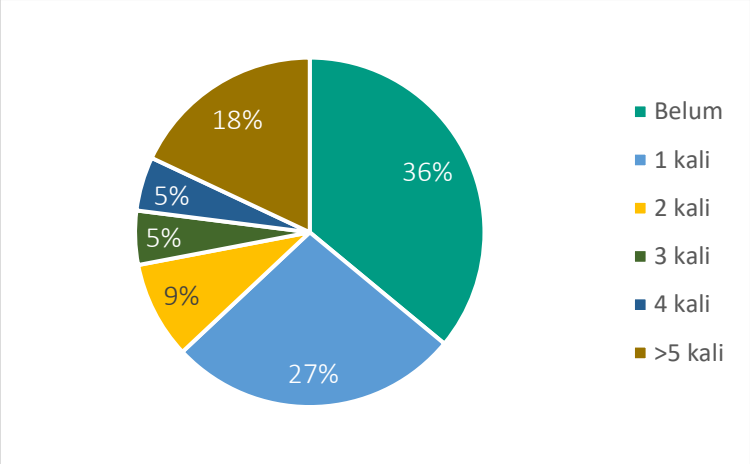

Sumber: Hasil Survei 2021

Gambar 6. 8 Responden post traveler untuk wisatawan nusantara yang melakukan kunjungan wisata kembali ke Sumatera Barat di masa pandemi

Gambar 6.9 di bawah ini menunjukkan asal wilayah *post traveler* dari domestik yang sudah melakukan kunjungan kembali selama pandemi. Hasil survei menunjukan bahwa responden *post traveler* untuk wisatawan nusantara yang tetap melakukan kunjungan wisata ke Sumatera Barat di masa pandemi sebagian besar berasal dari daerah Jambi, Riau, Jawa Barat dan wisatawan lokal di Sumatera Barat sendiri.

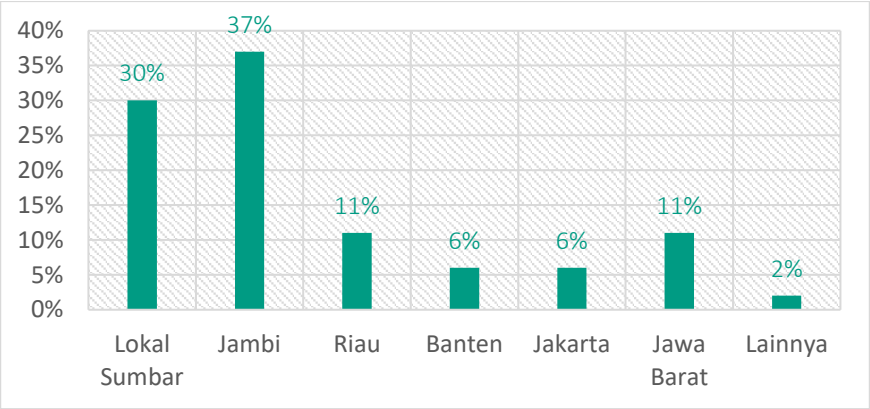

Sumber: Hasil Survei 2021

Gambar 6. 9 Asal daerah wisatawan nusantara post traveler yang melakukan kunjungan wisata kembali ke Sumatera Barat di masa pandemi

BAB 7
ANALISIS NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH PROV. SUMATERA BARAT

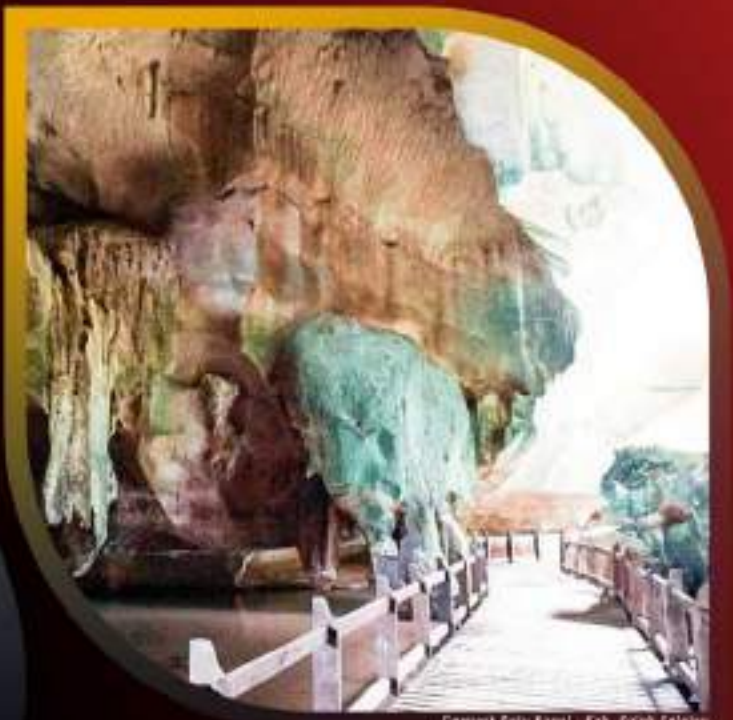

Geopark Batu Kapal - Kab. Solok Selatan

7.1. Peranan Pariwisata terhadap Sektor Perekonomian

Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa negara dari konsumsi wisman terhadap produk barang dan jasa. Tidak kalah pentingnya adalah perjalanan wisnus yang memberi porsi besar dalam penciptaan ekonomi daerah maupun regional. Model Input-Output digunakan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Barat. Model ini menggunakan Tabel Input-Output (I-O) berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Kerangka dasar Tabel I-O menggambarkan transaksi produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama (kolom) menunjukkan struktur input sektor-sektor ekonomi, komposisi nilai tambah yang dihasilkan dan struktur permintaan akhir (*final demand*) terhadap barang dan jasa. Sisi kedua (baris) menunjukkan distribusi (alokasi) output barang dan jasa untuk proses produksi, *final demand*, dan impor.

Tabel I-O yang digunakan dalam mengukur dampak pariwisata Tabel I-O Sumatera Barat Tahun 2019 yang merupakan hasil updata dari data IO tahun 2016. Dalam analisis I-O ini, permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran wisnus (lokal Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat) dan wisman, (2) investasi sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dan (3) pengembangan dan promosi pariwisata oleh pemerintah, menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Pengeluaran dari wisnus lokal Sumatera Barat adalah bagian dari konsumsi rumah tangga. Adapun pengeluaran wisnus luar-Sumatera Barat dan wisman merupakan bagian dari ekspor barang dan jasa, kemudian pengeluaran untuk

investasi sektor pariwisata adalah bagian dari pembentukan modal tetap dan pengeluaran untuk promosi merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah.

Dalam pengukuran dampak pariwisata, masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir diklasifikasikan kembali sesuai klasifikasi sektor dari Tabel I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief (dikenal dengan matriks A). Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi Sumatera Barat, permintaan akhir menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata, faktor pendorong (*exogenous variable*) berupa konsumsi wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, serta lembaga-lembaga nirlaba yang ikut andil dalam kegiatan pariwisata. Analisis I-O ini digunakan untuk mengukur dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Barat khususnya terhadap output dan Nilai Tambah Bruto (NTB).

Output sektor produksi terbentuk karena adanya permintaan baik dari domestik maupun luar negeri. Untuk dapat menghasilkan output komoditi diperlukan suatu input antara (*intermediate input*) dalam bentuk barang dan jasa dalam suatu proses produksi. Dalam sektor pariwisata, input dari sektor pariwisata misalnya saja berupa pengeluaran wisatawan mancanegara maupun nusantara, serta berbagai pengeluaran yang mendorong perkembangan sektor pariwisata tentunya berkontribusi pada pembentukan output barang dan jasa di sektor ini.

Nilai Tambah Bruto (NTB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Secara konseptual, NTB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Besarnya NTB ini biasanya sejalan dengan nilai output yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula dengan perminyaan produk pariwisata yang diharapkan akan mampu untuk mendorong perubahan pada besarnya NTB di seluruh unit usaha.

Hasil analisis menunjukan bahwa **secara agregat aktivitas pariwisata di Sumatera Barat memberikan kontribusi sekitar 6,87% terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) atau PDRB**, dan **berkontribusi sekitar 7,09% terhadap nilai output yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2019**. Nilai ini, secara umum **lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional secara keseluruhan pada tahun 2017** dimana kontribusi pariwisata nasional terhadap nilai tambah bruto hanya sebesar 4,1% dan kontribusi terhadap nilai output sebesar 4,29% (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tabel 7. 1 Dampak aktivitas sektor pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Barat

No	Sektor	Pembentukan Output		Pembentukan NTB	
		Nilai (Rp Miliar)	Kontribusi terhadap Total Output (%)	NIlai (Rp Miliar)	Kontribusi terhadap Total NTB (%)
1	Penyediaan Makan Minum	9.363	2.31	4.361	1.88
2	Angkutan Darat	3.766	0.93	1.903	0.82
3	Jasa Perusahaan	3.352	0.83	1.885	0.81
4	Penyediaan Akomodasi	2.675	0.66	1.630	0.70
5	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	2.397	0.59	1.703	0.73
6	Jasa Lainnya	1.304	0.32	835	0.36
7	Jasa Informasi dan Komunikasi	837	0.21	498	0.21
8	Industri Makanan Minuman Tembakau	725	0.18	246	0.11
9	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	545	0.13	428	0.18
10	Perikanan	430	0.11	363	0.16
11	Sektor Lainnya	3.328	0.82	2.069	0.89
Kontribusi Aktivitas Pariwisata		28.722	7.09	15.920	6.87
Total Output Sumatera Barat Rp 405.207 Miliar					
Total NTB Sumatera Barat Rp 231.822 Miliar					

Sumber: Hasil analisis I-O

Dampak paling besar dari aktivitas pariwisata terjadi di sektor **penyediaan makan dan minum** yaitu sebesar Rp 9.363 miliar atau berkontribusi sebesar 2,31% terhadap total output wilayah atau 1,88% terhadap total NTB wilayah tahun 2019. Selanjutnya dampak aktivitas pariwisata di Sumatera Barat paling besar dirasakan oleh **sektor angkutan darat** dengan nilai output yang tercipta sebesar Rp 3.766 miliar atau berkontribusi sebesar 0,93% terhadap total output wilayah, dan berkontribusi sebesar 0,82% terhadap total NTB.

Selanjutnya sektor perekonomian yang menerima manfaat terbesar dari aktivitas pariwisata di Sumatera Barat setelah sektor penyedia makan dan minum dan sektor angkutan darat adalah sektor jasa perusahaan, penyedia akomodasi, dan sektor perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa peran penting aktivitas pariwisata dapat menggerakan perekonomian wilayah di Sumatera Barat dan dapat dijadikan sebagai sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah.

Tabel 7. 2 Kontribusi aktivitas pariwisata terhadap output dan NTB setiap sektor perekonomian di Sumatera Barat tahun 2019

No	Sektor	Total Nilai Output (Rp Miliar)	Kontribusi Aktivitas Pariwisata terhadap Output Sektoral		Total NTB (Rp Miliar)	Kontribusi Aktivitas Pariwisata terhadap NTB Sektoral	
			(Rp Miliar)	%		(Rp Miliar)	%
1	Penyediaan Makan Minum	17.411	9.363	**53,78**	8.109	4.361	**53,78**
2	Angkutan Darat	32.853	3.766	**11,46**	16.595	1.903	**11,46**
3	Jasa Perusahaan	4.146	3.352	**80,84**	2.331	1.885	**80,84**
4	Penyediaan Akomodasi	3.037	2.675	**88,06**	1.851	1.630	**88,06**
5	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	37.153	2.397	**6,45**	26.398	1.703	**6,45**
6	Jasa Lainnya	8.753	1.304	**14,90**	5.600	835	**14,90**
7	Jasa Informasi dan Komunikasi	22.586	837	**3,71**	13.425	498	**3,71**
8	Industri Makanan Minuman Tembakau	30.689	725	**2,36**	10.400	246	**2,36**
9	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	11.209	545	**4,86**	8.817	428	**4,86**
10	Perikanan	11.015	430	**3,90**	9.313	363	**3,90**
11	Sektor Lainnya	226.353	3.328	**1,47**	128.983	2.069	**1,60**
Total		405.207	28.722	7,09	231.822	15.920	6,87

Sumber: Hasil analisis I-O

Secara sektoral, aktivitas pariwisata di Sumatera Barat telah menjadi sumber pertumbuhan khususnya dalam pembentukan output dan NTB setiap sektor perekonomian di Sumatera Barat. Sektor jasa perusahaan dan penyediaan akomodasi adalah sektor perkeonomian dimana output yang tercipta sebagian besar (lebih dari 80%) dihasilkan dari adanya aktivitas pariwisata. Untuk sektor jasa perusahaan, dari total output sektoral Rp 4.146 miliar, sekitar Rp 3.352 miliar (88,8%) output yang dihasilkan berasal dari aktivitas pariwisata. Begitupun dengan sektor penyediaan akomodasi, dari Rp 3.037 miliar yang tercipta sekitar Rp 2.675 miliar (atau 88,1%) output yang dihasilkan berasal dari aktivitas pariwisata. Nilai ini menunjukkan bahwa sektor jasa perusahaan dan penyedia akomodasi di Sumatera Barat sangat bergantung dari kegiatan pariwisata yang terjadi, dimana seperti yang diketahui bahwa sektor penyediaan akomodasi berkembang karena adanya kegiatan pariwisata. Begitupun dengan sektor perekonomian lainnya, yang menunjukan bahwa kontribusi pariwisata sangat berperan dalam kontribusinya terhadap pembentukan output maupun NTB sektoral.

7.2. Peredaran Uang dari Sektor Pariwisata

Kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dengan menggunakan total nilai transaksi ekonomi yang diciptakan dengan adanya kegiatan pariwisata, maka kinerja sektor pariwisata dapat diukur. Salah dampak ekonomi langsung dari aktivitas pariwisata adalah jumlah peredaran uang yang terjadi di Sumatera Barat yang dapat menjadi indikator kemajuan pembangunan sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil survei dan data jumlah wisatawan, diperoleh informasi bahwa total pengeluaran untuk wisatawan nusantara yang berasal dari dalam Sumatera Barat (wisatawan lokal) berkontribusi sekitar 53,14% atau sebesar

Rp 4.780,62 miliar terhadap total peredaran uang yang ada di Sumatera Barat dari kegiatan pariwisata. Sedangkan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Sumatera Barat berkontribusi sekitar 43,24% atau sebesar Rp 3.889,38 miliar terhadap total peredaran uang yang ada di Sumatera Barat dari kegiatan pariwisata. Sementara sisanya sebesar 3,62% atau sebesar Rp 325,6 miliar terhadap total peredaran uang yang ada di Sumatera Barat dari kegiatan pariwisata.

Besarnya jumlah uang beredar dari aktivitas wisata juga sangat ditentukan oleh **lama berkunjung** dari setiap wisatawan sendiri. Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa lama berkunjung wisatawan nusantara dari luar Sumatera Barat rata-rata 4-5 hari, wisatawan nusantara asal Sumatera Barat (lokal) rata-rata 2-3 hari, dan wisatawan mancanegara rata-rata 6-7 hari. Secara keseluruhan, **peredaran uang** yang diciptakan dari aktivitas wisatawan berdasarkan total pengeluaran wisatawan atau disebut juga *direct economic transaction* dari kegiatan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sekitar Rp 8.995,61 miliar. Jika dibandingkan maka besarnya jumlah peredaran uang ini **setara dengan 30% dari total APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota** di Sumatera Barat Tahun 2019.

Komponen pengeluaran wisatawan yang berkontribusi besar pada peredaran uang dari aktivitas pariwisata adalah **pengeluaran transportasi** dengan komposisi sebesar 33,9% baik wisman maupun wisnus. Selanjutnya komponen pengeluaran wisatawan terbesar kedua yang berkontribusi terhadap peredaran uang adalah **pengeluaran untuk makan dan minum** dengan proporsi sebesar 20,4%. Dengan kata lain, wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat sebagian besar pengeluarannya dalam bentuk aktivitas kuliner (makan dan minum) yang dibantu dengan jasa transportasi. Terlebih kuliner yang ditawarkan di Sumatera Barat cukup beragam dan memiliki kekhasan di berbagai destinasi wisata.

Tabel 7. 3 Peredaran uang dari aktivitas pengeluaran wisatawan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	Peredaraan Uang Terkait Pengeluaran Wisatawan				*Share* Komponen Pengeluaran (%)
		Wisman	Wisnus Asal Sumbar	Wisnus Luar Sumbar	Total	
1	Akomodasi	42.224	711.888	552.531	1.306.643	14,5%
2	Makan Minum	99.413	1.195.146	544.616	1.839.175	20,4%
3	Transportasi/sewa kendaraan[1)]	49.678	1.667.868	1.329.680	3.047.226	33,9%
4	Tiket Masuk+Parkir	1.285	112.070	85.822	199.177	2,2%
5	Paket Perjalanan	56.076	19.856	21.111	97.043	1,1%
6	Belanja Cinderamata	42.124	454.031	950.222	1.446.377	16,1%
7	Kesehatan dan Kecantikan	-	93.718	72.255	165.973	1,8%
8	Seminar/Pertemuan	16.356	-	-	16.356	0,2%
9	Lainnya	18.458	526.040	333.143	877.642	9,8%
Total		325.614	4.780.617	3.889.380	8.995.611	100,00%

Ket : [1)] diluar biaya tiket pesawat
Sumber : Hasil Survei 2021 (diolah)

7.3. Gambaran Mengenai Pariwisata di Masa Pandemi

Pandemi covid-19 menyebabkan aktivitas wisata terdampak karena adanya pembatasan perjalanan serta kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas masyarakat. Secara prinsip aktivitas perekonomian dalam wisata terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran wisata. Pada kondisi pandemi covid-19 aspek penawaran wisata terganggu karena ada kebijakan dari pemerintah untuk menutup sebagian atau seluruh lokasi wisata. Selain itu ada batasan untuk kapasitas tempat wisata yang boleh dikunjungi sehingga jumlah wisatawan yang diterima tidak maskimal. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi dalam kegiatan pariwisata terganggu dimana pendapatan bagi unit usaha dan tenaga kerja yang ada di sektor wisata menjadi berkurang. Namun demikian permasalahan dari sektor wisata pada masa pandemi tidak hanya terjadi karena keterbatasan penawaran wisata, sisi permintaan wisata juga dapat mempengaruhi terhadap penciptaan aktivitas ekonomi wisata selama pandemi. Wisatawan dalam hal ini mempunyai banyak pertimbangan untuk

melaksanakan kegiatan wisata selama pandemi. Kekhawatiran akan adanya penularan covid-19 serta persyaratan yang harus dipenuhi menjadi beberapa hal yang dipertimbangkan. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pariwisata di masa pandemi covid-19 khususnya dari sisi permintaan dilakukan wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menunjukkan persepsi terhadap perilaku wisata selama masa pandemi. Responden yang digunakan dalam menjelaskan persepsi terhadap wisata di masa pademi terdiri atas dua kategori yaitu; 1) responden wisatawan *post traveler* yang diwawancarai dengan menggunakan formulir secara daring, dan 2) responden *on going traveler* yang diwawancarai dengan formulir secara luring di lokasi wisata. Gambaran lebih rinci mengenai persepsi kedua jenis responden terhadap wisata nusantara di masa pandemi dijelaskan sebagai berikut;

7.3.1. Kunjungan Pada Saat Pandemi dan Asal Wilayah

Wawancara terhadap wisatawan yang sedang melaksanakan kegiatan wisata (*on going traveler)* dilakukan secara langsung pada beberapa destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan wawacara terhadap *post traveler* dilakukan secara daring. Beberapa lokasi yang dikunjungi untuk wawancara wisatawan diantanyara adalah Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukittingi. Pada ketiga lokasi tersebut dilakukan proses wawancara untuk memperoleh informasi mengenai persepsi wisatawan terkait dengan preferensi wisata di masa pandemi covid-19. Sdangkan untuk kuesioner secara daring disebarkan kepada berbagai lokasi melalui berbagai media. Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (75%) yang diwawancara baru berkunjung satu kali ke Sumatera Barat selama pandemi Covid-19. Namun demikian terdapat juga beberapa pengunjung yang sudah lebih dua kali berkunjung ke Sumatera Barat selama pandemi. Informasi ini menunjukkan bahwa wisatawan nusantara tetap

datang berkunjung ke Sumatera Barat walaupun kondisi pandemi masih berlangsung.

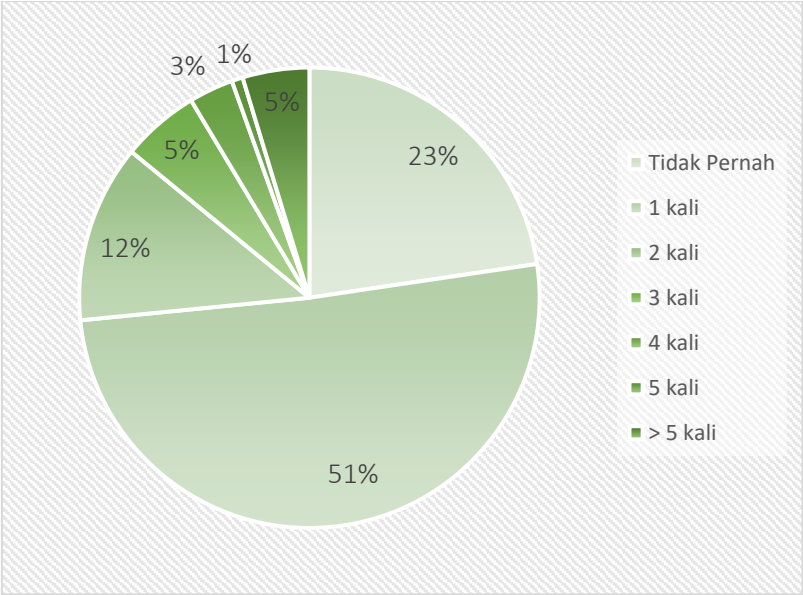

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 1 Kunjungan wisatawan pada saat pandemi Covid-19 ke Sumatera Barat

Apabila ditelaah lebih jauh lagi berdasarkan asal daerah dari wisatawan, sebagian besar wisatawan yang datang ke Sumatera Barat berasal dari Provinsi Jambi (35,16%) disusul oleh Provinsi Riau (18,75%) pada urutan kedua. Provinsi tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat sehingga sangat memungkinkan untuk pergerakan wisatawan dengan menggunakan jalur darat. Perjalanan dengan darat dapat dilakukan dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Namun demikian selama pandemi Covid-19 orang cenderung memilihi pergi dengan kendaraan pribadi atau melakukan *road trip.* Meskipun demikian asal daerah

wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat selama pandemi tidak hanya berasal dari pulau sumatera saja, terdapat beberapa wisatawan yang berasal dari provinsi di luar Pulau Sumatera seperti wisatawan dari Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Wisatawan Nusantara dari luar pulau sumatera melakukan perjalan ke Sumatera Barat tidak dengan menggunakan jalur darat namun menggunakan pesawat.

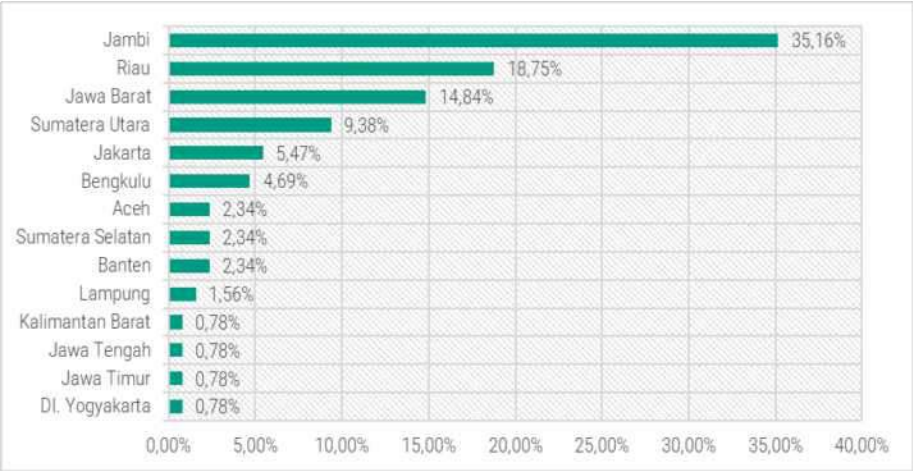

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 2 Wisatawan di Sumatera Barat berdasarkan asal daerah wisatawan

7.3.2. Persepsi Wisatawan terhadap Kecemasan dan Keamanan Berpergian

Dari hasil penggalian persespsi secara lebih mendalam, diperoleh informasi bahwa secara umum wisatawan nusantara baik yang sedang maupun sudah melaksanakan kegiatan wisata setuju bahwa Covid-19 telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Dalam hal ini wisatawan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka percaya bahwa Covid-19 ada dan mereka mempunyai potensi untuk tertular.

Persepsi terhadap kecemasan ini berbanding lurus dengan kekhawatiran dari wisatawan untuk berpergian. Hampir seluruh responden wisatawan menyatakan bahwa ada perasaan tidak aman ketika berpergian selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat dipahami karena ketika berpegiaan ke luar rumah maka wisatawan mempunyai potensi resiko tertular Covid-19 yang lebih besar apalagi jika mereka berpegian menggunakan transportasi umum dan juga terlibat kerumunan selama di perjalanan.

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 3 Persepsi responden terhadap kecemasan akibat covid dan keamanan berpergian

7.3.3. Persepsi Wisatawan terhadap Rencana Kunjungan dan Pola Kunjungan

Kekhawatiran dari responden tersebut juga diperkuat dengan persepsi responden terhadap rencana kunjungan wisata selama pandemi Covid-19. Dari hasil wawancara 57% wisatawan setuju dan 34% sangat setuju bahwa mereka mengurangi rencana kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat. Pengurangan jumlah kunjungan dilakukan karena mempertimbangkan dari

perkembangan kasus Covid-19 dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini menjadi pertimbangan dari wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah Sumatera Barat. Selain mengurangi kunjungan terkait dengan lokasi yang dikunjungi, sekitar 40% wisatawan menyatakan setuju bahwa mereka memilih lokasi yang tidak terlalu ramai, mereka menghindari untuk berkunjung ke kota besar yang ramai. Namun demikian terdapat 40% dari wisatawan tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka tetap mengunjungi lokasi yang termasuk kota besar untuk keperluan tertentu. Informasi ini menunjukkan bahwa responden masih memungkinkan untuk berkunjung ke kota besar yang ada di Sumatera Barat seperti Kota Padang untuk melakukan aktivitas wisata.

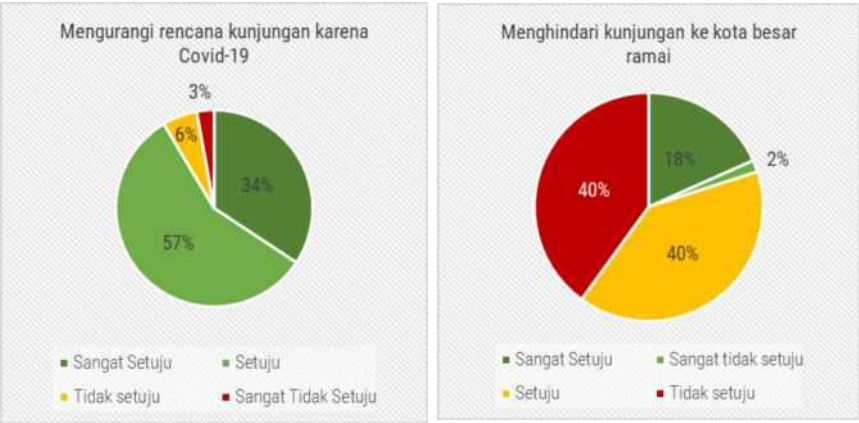

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 4 Persepsi wisatawan terhadap rencana kunjungan di masa pandemi

Dalam hal pola kunjungan terdapat fenomena yang menarik dimana banyak wisatawan yang diwawancarai menyatakan setuju untuk mengurangi

kunjungan wisata dalam bentuk grup. Konteks kunjungan wisata dalam bentuk grup ini terutama untuk grup besar seperti kunjungan wisata dari grup sekolah, grup kantor, grup perumahan dan lainnya. Walaupun demikian terdapat 36% yang menyatakan tidak setuju terhadap pengurangan kunjungan wisata secara grup hal ini karena pertimbangan Biaya jika wisata dilaksanakan secara mandiri dan sebagian lain menyatakan bahwa berwisata dengan grup juga bisa dilaksanakna selama menerapkan prinsip protokol kesehatan. Pola kunjungan wisata grup ini sepertinya lebih mengarah kepada kunjungan dalam grup kecil seperti keluarga. Berdasarkan jawaban responden bahwa sebagian besar responden setuju selama pandemi Covid-19 mereka lebih memilih berwisata dengan keluarga. Kunjungan dengan keluarga mengurangi potensi resiko penularan Covid-19 terutama pada saat perjalanan karena interaksi terbatas hanya dengan keluarga yang selama ini sudah tinggal satu rumah.

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 5 Persepsi wisatawan terhadap pola kunjungan wisata selama pandemi

7.3.4. Persepsi Wisatawan terhadap Kebersihan Jasa Wisata

Dalam melakukan aktivitas wisata, wisatawan mempertimbangakn tingkat kebersihan dan keamanan dari tempat rekreasi yang mereka kunjungi. Sebagian besar lokasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan merupakan wisata yang berada di tempat terbuka baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Hal ini karena menurut wisatawan berwisata di luar ruangan khususnya wisata alam dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan wisata di dalam ruangan. Sebagian besar responden 97% menyatakan setuju bahwa kebersihan dan keamanan tempat rekreasi merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih lokasi wisata selama pandemi Covid-19. Kondisi ini juga menjadi catatan untuk para pelaku usaha wisata agar bisa memastikan pengelolaan aktivitas wisata di lokasi mereka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak pengaturan dasar terkait dengan jaga jarak, pemakaian masker dan ketersediaan tempat cuci tangan perlu diperhatikan. Akan lebih baik lagi apabila pengelola dan unit usaha yang ada di destinasi wisata bisa mendaftarkan lokasinya untuk mendapat sertifikat CHSE[1]. Hal ini untuk lebih meyakinkan bahwa pengelolaan tempat wisata berusaha untuk menjamin kebersihan dan keamanan selama berwisata. Selain kebutuhan kebersihan dan keamanan di tempat rekreasi, responden juga menyatakan setuju bahwa selama perjalanan perlu dipastikan juga kebersihan dan keamanan. Kebersihan dan keamanan selama perjalanan terutama berkaitan dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama perjalanan terutama untuk penggunaan transportasi umum.

[1] Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 6 Persepsi wisatawan terhadap kebersihan dan keamanan di tempat rekreasi dan perjalanan

Terkait dengan produk wisata yang dinikmati wisatawan oleh wisatawan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pertimbangan kualitas dari layanan produk dan jasa pariwisata merupakan hal yang dipertimbangkan selama pandemi Covid-19. Dalam hal pemilihan tempat menginap responden menyatakan jika dananya mencukupi mereka akan memilih hotel dengan kualitas layanan yang baik untuk memastikan kebersihan dan keamanan tempat mereka menginap selama pandemi. Hal ini juga berlaku untuk preferseni makan di restoran dengan kualitas baik. 88% responden setuju bahwa mereka memilih untuk makan di restoran atau tempat makan dengan kualitas yang baik. Kondisi ini tidak lantas menyatakan bahwa responden yang diwawancarai semuanya makan di restoran yang harganya tinggi dengan pelayanan yang terbaik. Paling tidak preferensi ini menunjukkan bahwa responden mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan dari hotel dan restoran atau rumah makan di lokasi wisata.

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 7 Persepsi wisatawan terhadap pilihan hotel dan restoran selama pandemi

Terdapata informasi yang mernarik dari hasi wawancara terutama terkait dengan perilaku wisatawan dalam menerapkan protocol kesehatan diantaranya dalam penggunaan masker dan *handsanitizer*. Terdapat 22% responden yang menjawab tidak setuju terkait dengan pentingnya menggunakan masker dan *hand sanitizer* selama melakukan aktivitas wisata. Hal ini terjadi karena beberapa responden wisatawan menyatakan bahwa mereka tidak selalu memakai masker ketika di perjalanan dan tempat wisata. Selain itu juga mereka menyatakan tidak secara berkala menggunakan *hand sanitizer* untuk membersihkan tangan mereka setelah menyentuh barang atau benda yang banyak dipegang oleh publik. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar para pengelola wisata untuk dapat membuat mekanisme atau sistem yang bisa memastikan bahwa setiap wisatawan menerapkan protokol kesehatan selama melakukan aktivitas wisata guna mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

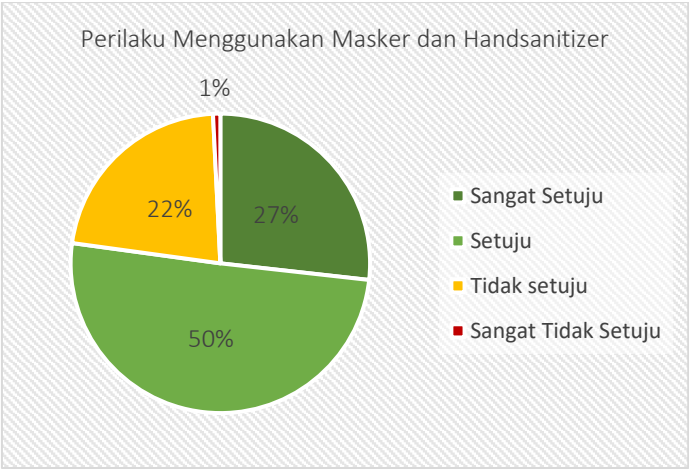

Sumber: Hasil survey wisatawan (2021)

Gambar 7. 8 Preferensi wisatawan terhadap perilaku menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer

BAB 8
KESIMPULAN

Jam Gadang - Kota Bukittinggi

wonderful
indonesia

Lampiran 1. Update Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Sektor akhir	ID Akhir	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	Perkebunan Semusim dan Tahunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perburuan	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	Pertambangan Bijih Logam	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian Tanaman Pangan	1	377.574	-	-	75.653	1	-	251	-	-	-
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	-	334.969	-	5.363	-	-	-	-	-	-
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	-	-	392.747	2.647	-	-	-	-	5	-
Peternakan	4	-	-	-	51.543	4.543	583	853	-	-	-
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	76.038	67.261	294.017	8.143	-	-	-	-	-	-
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	-	-	-	-	4.049	167.347	-	-	-	1.216
Perikanan	7	-	-	-	-	-	-	155.484	-	-	-
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	0	1	0	1	0	0	1	1	2	170
Pertambangan Bijih Logam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	49	134	51	90	49	44	685	2.867	4.400	136.409
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	1	599	3.518	526.688	4.444	42	107.373	15	95	2.225

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Industri Makanan Minuman Tembakau	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pertanian Tanaman Pangan	1	-	4.163.079	-	-	-	-	13	-	-	-
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	-	269.364	0	-	213	0	520	-	-	-
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	-	5.754.644	20.312	76	1.192	-	2.250	601.892	307	-
Peternakan	4	-	905.315	-	-	-	-	85	-	-	-
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	-	54.095	7	1.177	628.218	71.568	4.042	-	85.503	2.229
Perikanan	7	-	315.489	-	1	-	-	310	-	-	-
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	0	54	6	0	1	1	1	67	87	1
Pertambangan Bijih Logam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	38	8.006	74	3	20	6	3.264	218	1.171.604	22
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	6	552.025	2	505	217	33	1.702	390	3.313	50

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Alat Angkutan	Industri Furnitur	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Ketenagalistrikan	Pengadaan Gas dan Produksi Es	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Angkutan Rel
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pertanian Tanaman Pangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	-	-	-	430	-	2	-	-	-	-
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	-	6,319	1	-	-	-	-	-	-	-
Peternakan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	-	121,960	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan	7	-	60	970	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	0	3	2	10	0	7	727	217	1,097	0
Pertambangan Bijih Logam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	0	53	2,843	4,529	1	236	2,213,819	576	1,903	13
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	0	49	128	952	3	1,070	311	998	3,239	93

Sektor akhir	ID Akhir	Angkutan Darat	Angkutan Laut	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan Udara	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	Penyediaan Akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Jasa Informasi dan Komunikasi	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	Asuransi dan Dana Pensiun
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Pertanian Tanaman Pangan	1	-	-	-	-	-	9,155	311,888	-	-	-
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	-	-	-	-	-	100,030	792,314	0	418	-
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	-	-	-	-	-	14,225	131,666	-	-	-
Peternakan	4	-	-	-	-	-	49,384	332,814	-	-	-
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	-	-	-	-	-	-	38,585	-	-	-
Perikanan	7	-	-	-	-	-	54,892	672,307	-	-	-
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	368	22	15	183	34	43	221	350	34	13
Pertambangan Bijih Logam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	3,211	375	202	1,732	383	167	174	4,765	811	86
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	21,317	8,609	2,412	10,145	3,838	114,645	1,066,333	7,575	6,259	647

Sektor akhir	ID Akhir	Jasa Keuangan Lainnya	Jasa Penunjang Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Konsumsi RT & LNPRT	Konsumsi Pemerintah
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Pertanian Tanaman Pangan	1	-	-	-	-	22,593	380	721	8,939	152,542	-
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	-	-	-	19	13,831	1,044	35,615	43,944	5,105,842	-
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	-	-	-	-	4,972	81	849	4,039	188,979	-
Peternakan	4	-	-	-	-	13,351	2,815	7,384	13,098	1,584,621	-
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	-	-	-	-	6,095	-	-	-	2,706	-
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	-	-	-	-	13,868	88	2,222	191	46,757	-
Perikanan	7	-	-	-	-	15,455	11,709	20,352	38,580	6,707,748	-
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	52	6	57	70	51	277	136	331	5,447	-
Pertambangan Bijih Logam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	473	25	1,161	469	1,553	1,420	889	589	4,255	-
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	287	80	1,404	2,035	17,290	42,690	68,443	63,508	7,681,100	98,243

Sektor akhir	ID Akhir	PMTB & Perubahan Inventory	Total Ekspor	Total Output
		51	52	53
Pertanian Tanaman Pangan	1	260,984	4,335,197	9,718,970
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	2	413,089	4,092,390	11,209,398
Perkebunan Semusim dan Tahunan	3	2,163,257	8,807,445	18,097,905
Peternakan	4	4,041,339	1,403,389	8,411,118
Jasa Pertanian dan Perburuan	5	-	355,611	809,870
Kehutanan dan Penebangan Kayu	6	(18,543)	2,025,395	3,249,973
Perikanan	7	(5,911)	3,027,383	11,014,827
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	8	4	94,062	104,235
Pertambangan Bijih Logam	9	-	209,472	209,472
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10	782,466	7,760,826	12,118,041
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	11	0	35,317	35,317
Industri Makanan Minuman Tembakau	12	24,749	20,237,422	30,689,115

Lampiran 1. Update Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (lanjutan)

Sektor akhir	ID Akhir	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	Perkebunan Semusim dan Tahunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perburuan	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	Pertambangan Bijih Logam	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	781	3,516	4,307	18	344	161	2,924	2	8	468
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	0	1	1	0	1	0	1	0	1	18
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	717	3,450	1,321	128	862	244	2,111	0	21	11,522
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	160	958	114	8	167	18	33	1	3	418
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	-	-	-	-	(0)	-	0	-	(0)	(0)
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	1,975	6,088	11,881	1,197	2,149	297	2,288	180	148	5,921
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	-	-	-	-	68	-	-	20	10	780
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	-	-	-	-	310	16	-	54	56	8,118
Industri Alat Angkutan	21	-	0	-	-	0	0	0	0	-	0
Industri Furnitur	22	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Industri Makanan Minuman Tembakau	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	0	1,682	286,825	213	374	52	21	2,380	1,524	57
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	0	6	305	140	1	0	0	101	13	1
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	2	2,893	285	4	11,457	261	26	1,771	10,986	121
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	1	1,618	373	13	16	1,834	33	1,252	2,868	64
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	-	0	-	(0)	-	(0)	(0)	-	-	(0)
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	20	12,945	2,921	373	1,022	272	215	149,560	21,612	890
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	12	3,591	1,952	42	210	109	148	7,159	259,693	5,678
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	4	319	567	2	32	36	18	1,952	1,591	1,749
Industri Alat Angkutan	21	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0
Industri Furnitur	22	-	2,765	87	12	1,010	40	1	90	335	86

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Alat Angkutan	Industri Furnitur	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Ketenagalistrikan	Pengadaan Gas dan Produksi Es	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Angkutan Rel
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	1	2,066	140	-	0	288	8,208	2,914	15,112	1
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	0	380	5	-	0	3	8	16	173	0
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	10	41,089	1,902	-	-	214	678,132	595	24,079	-
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	0	258	49	6	0	542	2,361	1,806	17,019	18
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	0	0	-	-	-	(0)	-	-	-	-
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	61	4,267	1,866	4,573	1	752	146,070	11,975	78,128	168
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	40	6,711	345	412	-	714	2,176,458	1,472	9,391	502
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	21	319	215	2,681	3	255	86,151	4,040	6,040	78
Industri Alat Angkutan	21	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Industri Furnitur	22	1	15,703	52	-	-	-	4,918	-	-	-

Sektor akhir	ID Akhir	Angkutan Darat	Angkutan Laut	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan Udara	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	Penyediaan Akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Jasa Informasi dan Komunikasi	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	Asuransi dan Dana Pensiun
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	13,690	1,138	33	7,275	2,068	2,003	1,853	3,840	1,313	36
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	342	73	1	120	18	2	1	10	37	0
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	-	-	-	-	1,142	510	1,536	75	61	51
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	9,864	1,046	878	3,849	2,758	138	813	8,117	2,268	417
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	-	0	0	0	(0)	(0)	0	-	-	-
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	119,938	14,662	4,902	53,107	11,127	2,167	9,784	15,603	20,911	417
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	38,056	3,843	4	10,572	1,970	509	10,416	1,438	74	-
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	18,744	1,789	910	5,243	2,522	209	742	4,268	741	49
Industri Alat Angkutan	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Furnitur	22	-	-	-	-	-	75	67	-	2,598	2,098

Sektor akhir	ID Akhir	Jasa Keuangan Lainnya	Jasa Penunjang Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Konsumsi RT & LNPRT	Konsumsi Pemerintah
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	75	7	650	812	30,529	40,430	10,289	17,707	1,859,855	-
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	0	0	0	135	328	760	157	45	15,714	-
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	57	5	3,630	194	14,441	2,232	865	1,920	38,401	-
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	1,174	119	1,314	1,869	27,544	31,568	3,203	3,484	18,347	-
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	-	0	(0)	-	-	(0)	(0)	0	0	-
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	3,490	271	4,454	3,945	8,535	41,238	3,429	10,557	451,550	99
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	-	-	794	2,929	26,704	32,496	3,930	1,356	62,723	-
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	115	4	117	2,645	7,473	8,263	2,306	1,757	70,014	-
Industri Alat Angkutan	21	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Industri Furnitur	22	2,383	218	1,108	5,806	-	6,366	7,982	9,377	595,253	-

Sektor akhir	ID Akhir	PMTB & Perubahan Inventory	Total Ekspor	Total Output
		51	52	53
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13	124,525	411,282	2,863,798
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14	6,343	15,381	40,642
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15	12,877	925,527	1,797,728
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	16	(712)	167,308	317,374
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17	(0)	98,665	98,665
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18	140,299	5,349,124	6,739,424
Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	19	(195,303)	7,263,606	9,741,632
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	20	97,506	24,377	364,420
Industri Alat Angkutan	21	0	15,747	15,747
Industri Furnitur	22	354,826	94,390	1,107,647

Lampiran 1. Update Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (lanjutan)

Sektor akhir	ID Akhir	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	Perkebunan Semusim dan Tahunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perburuan	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	Pertambangan Bijih Logam	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	-	-	-	-	51	12	772	7	8	1,187
Ketenagalistrikan	24	634	1,952	2,392	2,301	166	490	6,807	195	349	24,969
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(0)	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	21	1,205	2,077	727	1	0	728	32	99	4,320
Konstruksi	27	60,463	65,754	486,718	18,963	3,810	48,733	16,951	499	1,568	99,717
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	30,218	31,010	89,728	40,396	4,844	11,500	18,762	390	992	93,257
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	158,517	213,664	268,098	269,911	15,456	39,256	136,149	1,648	3,172	251,575
Angkutan Rel	30	96	127	166	149	27	16	73	250	69	238
Angkutan Darat	31	62,149	367,720	366,023	48,659	14,325	11,445	162,987	12,980	19,361	999,625
Angkutan Laut	32	4,965	6,594	7,995	9,122	578	1,518	4,736	2,803	1,095	64,491

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Industri Makanan Minuman Tembakau	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	0	61	85	0	13	7	6	324	203	203
Ketenagalistrikan	24	73	22,993	44,709	333	1,479	746	820	83,116	175,342	1,885
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	4	4,573	612	25	57	136	166	6,740	9,528	201
Konstruksi	27	260	4,867	15,357	489	450	452	64	3,505	74,195	156
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	299	136,440	24,634	410	16,353	2,743	813	55,678	47,821	3,142
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	908	1,104,060	184,148	3,370	128,253	20,663	5,396	389,081	347,090	24,065
Angkutan Rel	30	1	761	199	4	46	97	6	785	7,583	70
Angkutan Darat	31	897	495,388	123,973	1,980	52,074	25,475	6,147	396,894	835,924	12,574
Angkutan Laut	32	618	43,106	30,608	155	8,096	1,200	186	17,350	73,454	884

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Alat Angkutan	Industri Furnitur	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Ketenagalistrikan	Pengadaan Gas dan Produksi Es	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Angkutan Rel
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	2	54	145	296	1	39	9,556	594	892	62
Ketenagalistrikan	24	13	2,022	1,229	1,840,686	1	8,617	141,960	45,161	79,781	3,758
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	-	(0)	-	0	-	-	-	-	(0)	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	4	131	152	1,147	0	20,021	3,564	6,126	8,027	93
Konstruksi	27	8	1,551	446	269	-	21,310	879,626	50,012	305,470	1,496
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	168	8,496	1,884	23,286	5	2,444	329,909	64,391	220,107	509
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	1,346	68,201	14,636	117,093	25	12,527	2,366,287	110,321	308,281	3,939
Angkutan Rel	30	1	73	15	133	0	94	4,752	633	12,585	11
Angkutan Darat	31	236	63,479	12,572	30,887	38	72,248	7,834,289	397,955	2,624,882	848
Angkutan Laut	32	45	2,648	552	3,945	1	1,077	88,193	45,368	107,607	138

Sektor akhir	ID Akhir	Angkutan Darat	Angkutan Laut	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan Udara	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	Penyediaan Akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Jasa Informasi dan Komunikasi	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	Asuransi dan Dana Pensiun
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	3,789	1,002	413	4,034	885	36	98	780	477	21
Ketenagalistrikan	24	131,500	7,798	7,198	68,649	97,270	36,179	32,286	371,823	11,290	1,820
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	(0)	-	-	-	-	(0)	(0)	-	(0)	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	15,157	2,978	1,652	5,587	8,131	2,278	2,462	3,670	365	352
Konstruksi	27	72,933	3,149	8,242	42,448	120,313	5,359	1,123	68,104	83,825	1,636
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	1,813,375	20,048	11,699	91,437	53,003	15,608	131,580	29,113	18,787	5,876
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	1,292,334	100,255	42,676	455,069	66,596	100,156	927,416	135,751	33,611	4,813
Angkutan Rel	30	2,175	80	43	993	1,760	127	513	2,689	111	865
Angkutan Darat	31	438,388	38,351	45,503	190,623	358,676	25,788	289,479	362,853	11,317	9,639
Angkutan Laut	32	44,604	4,424	1,946	18,430	64,775	3,807	34,671	26,741	1,208	407

Sektor akhir	ID Akhir	Jasa Keuangan Lainnya	Jasa Penunjang Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Konsumsi RT & LNPRT	Konsumsi Pemerintah
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	94	1	156	804	2,514	4,023	3,003	1,962	65,932	-
Ketenagalistrikan	24	8,120	896	24,474	7,971	186,208	60,355	66,703	140,172	905,420	-
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	-	-	-	0	0	0	0	(0)	(0)	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	639	3	599	5,767	13,250	8,805	24,671	42,357	431,250	20,330
Konstruksi	27	13,149	1,533	978,312	35,832	468,487	271,820	33,449	64,690	103,622	-
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	4,372	290	17,232	60,285	247,629	96,966	54,478	41,226	2,346,904	5,512
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	16,988	1,067	40,356	78,931	262,081	244,559	165,700	136,808	10,742,138	47,405
Angkutan Rel	30	870	13	198	6,056	1,465	938	269	994	46,091	26
Angkutan Darat	31	41,167	3,585	53,121	182,570	239,525	264,169	301,679	211,069	4,768,875	6,139
Angkutan Laut	32	837	104	1,717	13,741	11,334	9,536	6,606	6,406	509,703	1,493

Sektor akhir	ID Akhir	PMTB & Perubahan Inventory	Total Ekspor	Total Output
		51	52	53
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23	53,893	59,500	217,997
Ketenagalistrikan	24	28	1,190,568	5,851,707
Pengadaan Gas dan Produksi Es	25	-	2,354	2,354
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26	-	38,529	699,349
Konstruksi	27	43,208,643	8,277,877	56,027,705
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	28	640,772	1,225,029	8,191,847
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	29	5,364,404	10,326,579	37,152,829
Angkutan Rel	30	2,802	27,811	125,949
Angkutan Darat	31	689,191	9,267,430	32,853,170
Angkutan Laut	32	178,376	744,367	2,214,357

Lampiran 1. Update Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (lanjutan)

Sektor akhir	ID Akhir	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	Perkebunan Semusim dan Tahunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perburuan	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	Pertambangan Bijih Logam	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	1,240	1,755	2,020	2,319	433	1,133	1,228	257	901	27,631
Angkutan Udara	34	3,920	5,323	6,398	7,132	766	1,179	3,706	1,461	1,857	7,361
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	7,983	10,679	14,279	13,175	802	2,487	7,569	2,868	338	22,084
Penyediaan Akomodasi	36	4	859	419	9	19	26	33	38	27	11,343
Penyediaan Makan Minum	37	1,710	1,151	2,185	1,436	433	267	5,003	28	70	2,239
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	4,348	12,180	11,396	7,287	2,187	8,606	10,540	738	808	73,340
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	169,775	171,045	453,876	107,668	9,271	13,303	185,515	443	999	49,873
Asuransi dan Dana Pensiun	40	275	86	748	0	1	60	536	5	34	320
Jasa Keuangan Lainnya	41	81,102	98,213	181,848	58,346	5,101	6,631	92,101	549	1,094	55,135
Jasa Penunjang Keuangan	42	1,426	214	550	3	134	65	2,867	89	87	4,644

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Industri Makanan Minuman Tembakau	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	913	18,367	9,972	190	9,422	246	209	10,571	176,645	272
Angkutan Udara	34	251	88,218	36,386	856	7,649	2,132	2,345	98,577	213,508	3,430
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	52	62,631	10,661	255	7,640	1,577	513	27,060	101,500	2,201
Penyediaan Akomodasi	36	2	25,036	2,179	164	139	251	323	18,258	12,641	73
Penyediaan Makan Minum	37	7	6,187	1,178	29	939	151	55	8,351	12,570	402
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	303	510,026	23,155	831	8,534	2,418	4,142	303,428	189,739	3,587
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	915	142,101	43,999	423	2,234	1,242	1,279	90,947	109,954	2,572
Asuransi dan Dana Pensiun	40	10	33	83	0	2	1	3	617	14	1
Jasa Keuangan Lainnya	41	302	52,084	13,038	126	677	283	383	27,564	26,479	663
Jasa Penunjang Keuangan	42	66	3,592	2,384	31	116	45	32	5,218	4,552	74

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Alat Angkutan	Industri Furnitur	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Ketenagalistrikan	Pengadaan Gas dan Produksi Es	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Angkutan Rel
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	21	1,730	254	1,242	1	620	71,674	6,804	20,197	38
Angkutan Udara	34	62	7,998	2,965	10,204	5	3,940	438,844	73,930	512,399	639
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	65	5,728	2,643	6,470	2	1,535	408,332	21,076	152,833	2,719
Penyediaan Akomodasi	36	10	3,437	236	3,294	0	844	28,503	7,117	33,042	59
Penyediaan Makan Minum	37	10	454	288	8,069	2	78	77,443	4,645	51,767	197
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	149	18,759	3,180	52,408	42	9,251	486,839	239,621	826,640	5,552
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	75	5,832	1,497	132,402	41	3,410	199,745	107,907	621,885	852
Asuransi dan Dana Pensiun	40	2	2	12	443	0	69	14,563	7,506	18,997	4
Jasa Keuangan Lainnya	41	24	1,725	447	49,250	52	2,672	9,606	49,524	228,588	1,052
Jasa Penunjang Keuangan	42	4	342	43	223	-	1	18,148	5,347	19,073	52

Sektor akhir	ID Akhir	Angkutan Darat	Angkutan Laut	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan Udara	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	Penyediaan Akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Jasa Informasi dan Komunikasi	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	Asuransi dan Dana Pensiun
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	17,399	3,825	1,848	4,138	101,460	2,897	19,039	62,616	293	147
Angkutan Udara	34	316,477	22,801	24,455	281,267	124,609	10,278	57,107	135,181	15,887	5,127
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	824,455	225,786	48,492	652,203	76,881	6,149	53,166	26,161	2,480	473
Penyediaan Akomodasi	36	102,266	7,155	2,865	88,540	5,571	1,167	487	20,170	6,446	934
Penyediaan Makan Minum	37	57,593	5,429	3,150	64,836	3,556	848	9,689	10,327	6,030	131
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	880,312	240,442	55,426	985,530	255,971	54,637	83,517	3,853,218	192,211	47,656
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	152,588	9,261	7,074	75,274	24,022	29,164	185,207	116,497	37,384	11,970
Asuransi dan Dana Pensiun	40	859	2,588	2,165	6,044	3,350	451	1,774	12,170	72,078	11,344
Jasa Keuangan Lainnya	41	227,384	16,451	7,065	83,902	26,642	12,325	70,645	40,157	1,700	1,240
Jasa Penunjang Keuangan	42	5,942	831	320	4,292	1,196	1,651	8,113	20,220	1,992	17,949

Sektor akhir	ID Akhir	Jasa Keuangan Lainnya	Jasa Penunjang Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Konsumsi RT & LNPRT	Konsumsi Pemerintah
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	205	34	376	44,910	2,267	2,954	2,225	3,472	261,054	395
Angkutan Udara	34	39,462	2,096	66,777	64,326	646,296	91,327	57,800	43,239	5,840,179	1,199
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	1,678	213	3,507	7,540	24,390	27,769	12,316	13,144	1,021,830	2,720
Penyediaan Akomodasi	36	7,206	1,049	10,512	16,037	195,804	148,995	21,057	173,685	414,884	-
Penyediaan Makan Minum	37	2,055	212	1,971	5,443	74,607	16,095	2,118	75,866	15,116,356	244
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	84,075	13,244	466,694	381,978	602,821	376,524	147,098	185,073	6,509,050	77,453
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	32,203	4,080	110,090	28,582	14,526	24,046	38,689	54,427	1,301,073	91,848
Asuransi dan Dana Pensiun	40	3,568	202	18,644	1,259	32,697	1,903	1,883	2,565	537,665	-
Jasa Keuangan Lainnya	41	3,706	426	8,543	59,935	35,053	37,968	94,656	73,409	159,523	-
Jasa Penunjang Keuangan	42	59,061	12,595	1,662	6,985	697	811	1,852	1,082	-	-

Sektor akhir	ID Akhir	PMTB & Perubahan Inventory	Total Ekspor	Total Output
		51	52	53
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	33	47,368	233,988	1,181,211
Angkutan Udara	34	141,798	1,483,587	11,014,714
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	35	253,203	1,314,681	5,496,994
Penyediaan Akomodasi	36	-	1,663,790	3,037,002
Penyediaan Makan Minum	37	27,691	1,739,891	17,411,482
Jasa Informasi dan Komunikasi	38	644,989	3,628,104	22,586,054
Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	39	1,445	527,566	5,508,098
Asuransi dan Dana Pensiun	40	-	153,148	910,784
Jasa Keuangan Lainnya	41	-	149,534	2,154,922
Jasa Penunjang Keuangan	42	-	39,912	256,582

Lampiran 1. Update Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (lanjutan)

Sektor akhir	ID Akhir	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	Perkebunan Semusim dan Tahunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perburuan	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	Pertambangan Bijih Logam	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Real Estate	43	-	-	-	-	-	-	-	1,006	1,229	145,957
Jasa Perusahaan	44	6,238	16,765	6,939	11,173	6,054	5,454	10,494	1,520	1,788	127,930
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	-	4,073	78,832	-	-	-	958	141	203	6,783
Jasa Pendidikan	46	76	100	127	123	8	18	76	50	18	2,082
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	1,269	406	503	1,115	26	59	703	54	198	1,606
Jasa Lainnya	48	12,630	50,343	3,970	4,834	19,526	857	11,449	50	115	5,783
Input Antara Impor	49	835,869	913,934	1,588,633	1,417,117	94,099	77,212	748,662	15,016	20,542	1,594,151
Nilai Tambah Bruto	50	7,816,745	8,817,272	13,814,026	5,717,672	614,766	2,850,897	9,313,419	57,974	147,705	8,273,133
Total Input	51	9,718,970	11,209,398	18,097,905	8,411,118	809,870	3,249,973	11,014,827	104,235	209,472	12,118,041

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Industri Makanan Minuman Tembakau	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Real Estate	43	299	49,067	4,459	249	917	974	901	60,684	79,493	685
Jasa Perusahaan	44	1,074	23,774	9,130	118	2,591	557	756	27,275	41,630	2,190
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	38	19,804	5,364	49	305	305	412	46,279	11,074	642
Jasa Pendidikan	46	16	1,411	690	2	60	72	164	1,655	7,510	378
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	3	1,594	268	5	186	170	383	3,265	7,016	42
Jasa Lainnya	48	68	108,333	7,398	166	259	1,133	583	38,717	21,624	171
Input Antara Impor	49	10,706	5,316,911	920,400	14,721	143,977	68,986	26,702	2,150,717	2,022,261	139,794
Nilai Tambah Bruto	50	17,150	10,399,806	1,035,013	13,102	761,277	111,103	33,228	2,099,934	3,572,845	153,118
Total Input	51	35,317	30,689,115	2,863,798	40,642	1,797,728	317,374	98,665	6,739,424	9,741,632	364,420

Sektor akhir	ID Akhir	Industri Alat Angkutan	Industri Furnitur	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Ketenagalistrikan	Pengadaan Gas dan Produksi Es	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Angkutan Rel
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Real Estate	43	18	2,335	1,637	-	-	5,525	594,686	194,771	952,240	101
Jasa Perusahaan	44	46	970	967	142,594	89	6,895	697,516	70,975	230,593	1,630
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	10	823	188	17,051	12	6,622	28,720	5,839	23,682	24,247
Jasa Pendidikan	46	2	91	56	850	14	799	11,198	2,006	16,313	338
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	2	99	23	259	0	22	4,089	12,059	18,769	42
Jasa Lainnya	48	4	238	210	863	117	14,685	206,625	14,158	34,167	139
Input Antara Impor	49	5,542	195,497	78,410	2,634,713	356	96,153	11,516,726	910,398	3,170,056	28,119
Nilai Tambah Bruto	50	7,742	515,694	84,793	760,038	1,540	403,769	24,239,147	5,712,994	26,397,777	48,441
Total Input	51	15,747	1,107,647	217,997	5,851,707	2,354	699,349	56,027,705	8,191,847	37,152,829	125,949

Sektor akhir	ID Akhir	Angkutan Darat	Angkutan Laut	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan Udara	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	Penyediaan Akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Jasa Informasi dan Komunikasi	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	Asuransi dan Dana Pensiun
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Real Estate	43	303,521	17,747	11,840	153,197	27,617	37,128	193,883	269,520	24,766	11,223
Jasa Perusahaan	44	400,194	46,363	24,480	211,527	46,522	19,029	21,799	571,703	99,451	10,360
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	167,611	13,181	2,906	80,498	18,910	7,682	39,199	355,327	17,266	4,059
Jasa Pendidikan	46	100,855	5,085	4,022	56,766	7,124	1,787	1,381	7,429	43,508	7,172
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	74,943	11,005	3,031	40,025	17,206	588	3,684	538	4,089	6,757
Jasa Lainnya	48	189,013	19,828	10,357	84,246	46,510	22,803	200,348	419,488	1,924	2,286
Input Antara Impor	49	8,396,563	710,305	291,936	3,180,877	668,031	440,157	3,562,638	2,192,945	419,901	81,437
Nilai Tambah Bruto	50	16,595,413	646,630	551,050	3,992,060	3,244,549	1,850,770	8,108,668	13,424,824	4,364,177	661,277
Total Input	51	32,853,170	2,214,357	1,181,211	11,014,714	5,496,994	3,037,002	17,411,482	22,586,054	5,508,098	910,784

Sektor akhir	ID Akhir	Jasa Keuangan Lainnya	Jasa Penunjang Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Konsumsi RT & LNPRT	Konsumsi Pemerintah
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Real Estate	43	43,301	5,314	42,345	58,311	37,718	229,445	112,211	286,392	4,836,988	-
Jasa Perusahaan	44	57,336	3,070	140,723	57,126	105,990	170,378	103,199	71,153	139,523	41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	6,744	254	93,422	26,471	48,186	31,081	28,055	2,223	12,382	13,377,138
Jasa Pendidikan	46	13,321	395	25	20,853	33,342	47,482	17,094	17,114	7,583,231	9,396,936
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	3,067	431	9,609	6,089	592	7,573	16,673	18,682	2,984,212	1,812,417
Jasa Lainnya	48	787	608	16,592	11,683	53,009	47,345	39,679	133,180	5,566,317	94,609
Input Antara Impor	49	278,598	28,025	509,151	604,433	2,203,280	2,039,238	1,190,355	1,133,546	61,830,438	3,115,820
Nilai Tambah Bruto	50	1,424,208	176,103	7,078,908	2,331,356	10,749,724	13,508,162	3,721,875	5,599,749	-	-
Total Input	51	2,154,922	256,582	9,710,405	4,146,203	16,518,100	17,994,125	6,434,165	8,753,104	158,626,497	28,150,067

Sektor akhir	ID Akhir	PMTB & Perubahan Inventory	Total Ekspor	Total Output
		51	52	53
Real Estate	43	-	910,706	9,710,405
Jasa Perusahaan	44	69,678	320,831	4,146,203
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45	3,384	1,899,666	16,518,100
Jasa Pendidikan	46	2,470	580,430	17,994,125
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47	7,648	1,351,069	6,434,165
Jasa Lainnya	48	188,618	1,044,658	8,753,104
Input Antara Impor	49	19,840,622	5,930,009	155,404,683
Nilai Tambah Bruto	50	-	-	231,821,625
Total Input	51	79,568,817	120,880,928	792,432,833

Lampiran 2. Lampiran Dampak Aktivitas Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Sumatera Barat

No	Sektor	Kontribusi Akivitas Sektor Pariwisata terhadap			
		Nilai Output Sektoral (Rp Miliar)	Nilai Tambah Bruto Sektoral (Rp Miliar)	Nilai Output Sektoral (%)	Nilai Tambah Bruto Sektoral (%)
1	Pertanian Tanaman Pangan	292,0	234,9	3,0	3,0
2	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	550,1	432,7	4,9	4,9
3	Perkebunan Semusim dan Tahunan	229,6	175,3	1,3	1,3
4	Peternakan	250,1	170,0	3,0	3,0
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	9,6	7,3	1,2	1,2
6	Kehutanan dan Penebangan Kayu	27,4	24,0	0,8	0,8
7	Perikanan	434,5	367,4	3,9	3,9
8	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Batubara dan Lignit	0,4	0,2	0,3	0,3
9	Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8,0	5,5	0,1	0,1
11	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Makanan Minuman Tembakau	729,9	247,3	2,4	2,4
13	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10,0	3,6	0,3	0,3
14	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,1	0,0	0,2	0,2
15	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5,3	2,2	0,3	0,3
16	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4,5	1,6	1,4	1,4
17	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	30,3	9,5	0,5	0,5
19	Industri Barang Galian Logam Dasar dan bukan Logam	16,5	6,0	0,2	0,2
20	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,4	1,8	1,2	1,2
21	Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Industri Furnitur	3,7	1,7	0,3	0,3
23	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,3	0,5	0,6	0,6
24	Ketenagalistrikan	158,3	20,6	2,7	2,7

No	Sektor	Kontribusi Akivitas Sektor Pariwisata terhadap			
		Nilai Output Sektoral (Rp Miliar)	Nilai Tambah Bruto Sektoral (Rp Miliar)	Nilai Output Sektoral (%)	Nilai Tambah Bruto Sektoral (%)
25	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15,0	8,7	2,2	2,2
27	Konstruksi	111,0	48,0	0,2	0,2
28	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	290,7	202,7	3,5	3,5
29	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	2.291,8	1.628,4	6,2	6,2
30	Angkutan Rel	3,4	1,3	2,7	2,7
31	Angkutan Darat	2.675,4	1.351,4	8,1	8,1
32	Angkutan Laut	44,7	13,0	2,0	2,0
33	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	34,3	16,0	2,9	2,9
34	Angkutan Udara	150,5	54,5	1,4	1,4
35	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	138,6	81,8	2,5	2,5
36	Penyediaan Akomodasi	2.668,0	1.625,9	87,9	87,9
37	Penyediaan Makan Minum	9.489,9	4.419,5	54,5	54,5
38	Jasa Informasi dan Komunikasi	527,7	313,6	2,3	2,3
39	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	248,6	197,0	4,5	4,5
40	Asuransi dan Dana Pensiun	8,6	6,3	0,9	0,9
41	Jasa Keuangan Lainnya	135,4	89,5	6,3	6,3
42	Jasa Penunjang Keuangan	15,6	10,7	6,1	6,1
43	Real Estate	307,8	224,4	3,2	3,2
44	Jasa Perusahaan	1.131,6	636,3	27,3	27,3
45	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	69,8	45,4	0,4	0,4
46	Jasa Pendidikan	24,8	18,7	0,1	0,1
47	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	183,3	106,0	2,8	2,8
48	Jasa Lainnya	1.256,6	803,9	14,4	14,4
Total		24.589,1	13.615,3	6,1	5,9

LAMPIRAN

Air Terjun Sipiopiga - Kab. Pasaman Barat

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan analisis Nesparda Sumatera Barat Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan pariwisata terhadap seluruh sektor perekonomian di Sumatera Barat tahun 2019 cukup besar terhadap output wilayah sebesar Rp 28,72 triliun (atau sekitar 7,09% dari total output), terhadap Nilai Tambah Bruto sebesar Rp 15,92 triliun (atau sekitar 6,87% dari total Nilai Tambah Bruto). Sektor pariwisata yang terdampak paling besar dari adanya aktivitas pariwisata adalah sektor makan dan minum serta sektor akomodasi. Hal ini menunjukan peranan besar sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi di Sumatera Barat.

2. Peredaran uang dari aktivitas sektor pariwisata di Sumatera Barat tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 9,0 triliun yang bersumber dari pengeluaran wisatawan untuk belanja makan minum, akomodasi, sewa kendaraan, perjalanan dan jasa pariwisata lainnya.

3. Berdasarkan hasil survei *post traveler*, pengeluaran wisatawan nusantara di Sumatera Barat tahun 2019 rata-rata sebesar Rp 1,06 juta/orang/kunjungan. Wisatawan nusantara masih didominasi oleh wisatawan lokal asal Sumatera Barat dengan rata-rata pengeluaran Rp 836 ribu/orang/kunjungan, sementara untuk wisatawan luar Sumatera Barat rata-rata pengeluaran Rp 1,59 juta/orang/ kunjungan dimana sebagian besar berasal dari Riau dan Jambi.

4. Berdasarkan hasil survei *post traveler*, pengeluaran wisatawan mancanegara di Sumatera Barat tahun 2019 rata-rata sebesar Rp 8,41 juta/orang/kunjungan. Proporsi pengeluaran terbesar wisatawan mancanegara adalah untuk pengeluaran makan dan minum, belanja cinderamata dan akomodasi.

5. Pengeluaran investasi di Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Investasi sektor hotel dan restoran sebagai penyokong utama pariwisata berkontribusi paling besar dibanding sektor pariwisata lainnya. Total investasi seluruh sektor pariwisata tahun 2019 sebesar Rp 8,52 triliun, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 6,18 triliun.
6. Total pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Sumatera Barat tahun 2019 relatif kecil yaitu rata-rata kurang dari 1% dari total APBD, kecuali di beberapa daerah kabupaten/kota saja yang > 1% dari total APBD.
7. Proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021-2024 diproyeksi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk pemulihan pariwisata dan program vaksin serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan membuat sektor pariwisata mulai berangsur membaik. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan mancanegara diproyeksikan sebanyak 2.002 orang dan di tahun 2024 meningkat menjadi 2.585 orang. Sedangkan wisatawan nusantara di tahun 2021 juga meningkat dibandingkan tahun 2020 karena banyaknya wisatawan nusantara yang berkunjung dengan jalur darat. Jumlah wisatawan nusantara ini terus meningkat di tahun 2024 menjadi 9.519.417 orang.
8. Hasil survei *post traveler* maupun wawancara langsung di lokasi wisata tahun 2021 menunjukkan bahwa preferensi wisatawan untuk berwisata di masa pandemi covid-19 tahun 2021 tetap tinggi khususnya untuk kunjungan wisatawan nusantara yang berasal dari dalam Sumatera Barat sendiri dan luar Sumatera Barat terutama dari Jambi dan Riau. Preferensi destinasi wisata yang paling banyak dipilih adalah Kota Bukit Tinggi,

Pesisir Selatan dan Kota Padang. Namun demikian, untuk wisatawan mancanegara masih sangat kecil dibanding saat pandemi tahun 2020.

9. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan menjadi penilaian wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat adalah terkait minimnya wahana permainan, penataan PKL dan kemacetan, serta minimnya informasi mengenai obyek wisata yang tersedia.

8.2. Rekomendasi

Rekomendasi pengembangan pariwista Sumatera Barat berdasarkan hasil Nesparda Sumatera Barat Tahun 2019 ini adalah:

1. Mendorong peningkatan investasi prasarana dan sarana pariwisata di berbagai destinasi wisata melalui kemitraan sektor publik dan swasta serta kemudahan perizinan dan dukungan regulasi untuk kepastian berinvestasi.
2. Mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah dalam struktur APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Sumatera Barat untuk pembangunan kepariwisataan daerah.
3. Mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif untuk kapitalisasi potensi dan sumberdaya lokal serta penguatan citra Sumatera Barat sebagai kota wisata, kota kuliner, dan kota budaya.
4. Meningkatkan promosi pariwisata Sumatera Barat melalui berbagai media dan penyelenggaraan *event* kepariwisataan baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional melalui koordinasi bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pelaku industri pariwisata.
5. Membangun sistem pencatatan data kunjungan wisatawan yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah provinsi maupun

kabupaten/kota di seluruh Sumatera Barat, khususnya pencatatan pengunjung di hotel/penginapan, imigrasi dan jasa biro perjalanan wisata (untuk wisatawan mancanegara dan luar Sumatera Barat), dan pencatatan di lokasi obyek wisata (untuk wisatawan lokal dan luar Sumatera Barat).

6. Melakukan edukasi dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mendukung kegiatan kepariwisataan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
7. Pembangunan pariwisata di masa pandemi covid-19 dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat di berbagai destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2017). Data Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik. (2019). Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bangun, W. (2010). Teori Ekonomi Mikro. Bandung: Refika Aditama.

Burkart, A., & Medlik, S. (1981). Tourism Past, Present nad Future. London: Heinman.

Clawson, M., & Knetsch, J. (1975). Economic of Outdor Recreation. Baltimore: The john Hopkins Press.

Damanik, J., & Weber, H. (2006). Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogykarta : PUSPAR UGM dan Andi.

Middleton, V., & Clarke, J. (2001). Marketing in Travel and Tourism (Third Edition ed.). Ofxord: Butterwoth-Heinemann.

Ritchie, J. R., & Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destinantion a Sustainable Tourism Perspective. Trowbridge, UK: CABI Publishing.

Vanhove, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Yoeti, O. A. (2008). Ekonomi Pariwisata. Jakarta: PT.Kompas Media.

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No.7 Kota Padang

dispar.sumbarprov.go.id

@dispar.sumbar

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat